



**Jurnal
ILMU KEPOLISIAN**

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. Jurnal akademik kami adalah sumber referensi, baik bagi para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas mengenai segala hal yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian* diterbitkan dalam edisi cetak ISSN: 2620-5025, dan edisi online E-ISSN: 2621-8410 (<http://u.lipi.go.id/1532313039>). Sesuai dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2019, Jurnal Ilmu Kepolisian telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23/E/KPT/2019, tanggal 8 Agustus 2019 (Sinta 4).

Jurnal Ilmu Kepolisian berisi artikel hasil penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian, yaitu Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Sosiologi, Ilmu Administrasi, Ilmu Kriminologi. Selain itu, Jurnal Ilmu Kepolisian juga mencakup banyak penelitian dan ulasan tentang ilmu kepolisian dalam arti yang lebih luas. Redaksi mengundang pada ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas. Tulisan dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410

Website: <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index>

Alamat Redaksi / Tata Usaha:

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK,
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - 12160

Telp : 021-7222234, Faks: 021-7207142

No. Rek. : BRI 0193-01-030673-509 A.n. Jurnal Studi Kepolisian

E-mail : jurnalkepolisian@gmail.com



**Jurnal
ILMU KEPOLISIAN**

Pelindung	Gubernur/Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Drs. Yazid Fanani, M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua Bidang PPITK STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Drs. Sofyan Nugroho, S.H., M.Si., M.H.
Penanggungjawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK STIK Lemdiklat Polri Kombes Pol. Dr. Firman Fadillah, M.H
Dewan Pakar	Prof. Dr. Iza Fadri, S.H., M.H. Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. Prof. Dr. Indria Samego, M.A. Prof. Dr. Indrianto Senoadji, S.H., M.H. Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D. Prof. Dr. Eko Indra Hery, M.H. Prof. Dr. Chrysnanda Dwi Laksana, M.Si.
Pimpinan Redaksi	Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si.
Redaktur Pelaksana	Rahmadsyah Lubis, S.Pd., M.Pd. Dr. Syafruddin, S.Sos, M.Si
Dewan Redaksi	Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si. Dr. Sutrisno, M.Si. Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum. Dr. Benyamin Lufpi, S.S., M.Hum. Dr. Yopik Gani, S.I.P., M.Si.
Sekretaris	Kombes Pol. Prasetyo Rachmat Purboyo, S.I.K., M.H. AKBP Yustinus Setyo Indriyono, S.H., S.I.K. Kopol I Gusti Bagus Nyoman Subudi Erna Yatmi, S.Pd.
Bendahara	Sri Badri Kustiah, S.A.P.
Produksi	Kopol Afriska Nababan, S.H., S.I.K. IPTU Vivi Novianti, S.A.P.



Jurnal ILMU KEPOLISIAN

Jurnal Ilmu Kepolisian

Volume 16

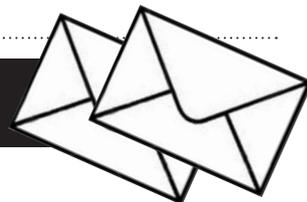
Nomor 2

Agustus 2022

ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410

DAFTAR ISI

- 5 **Dari Redaksi**
- 8 **Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Anggota Korps Brimob Polri**
Rio Adi Putra, Jarot Prianggono
- 24 **Strategi Pemolisian Dalam Pencegahan Konflik Tawuran Antar Warga Oleh Polres Metro Jakarta Selatan**
Fandi Arisca, Akhyar Yusuf Lubis
- 41 **Strategi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Terkait Dengan Radikalisme Dan Terorisme**
Ilham Prisgunanto, Rahmadsyah Lubis, Tigor Sitorus
- 56 **Strategi Penguatan Sinergitas Polri Dengan Kementerian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di Indonesia Dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri**
Bima Anggalaksana
- 67 **Sinergi Polisi-Masyarakat Dalam Pencegahan Potensi Radikalisme**
Sutrisno, Zulkarnein Koto
- 79 **Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua Dengan Pendekatan Mediasi Humanistik**
Thomas Agung Kurnianto, Puguh Santoso, Anang Puji Utama



Pembaca yang kami hormati,

Selamat bertemu kembali para Pembaca di Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 16 No. 2. Sesuai dengan amanat dari program Presisi Kapolri dalam upaya transformasi organisasi, seperti penataan kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0 dan perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, maka tema yang diusung dalam edisi ini adalah Strategi Polri Presisi dan Sinergi Polisional Guna Memelihara dan Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Kami berterimakasih kepada kontributor penulis dari luar yang antusias dengan jurnal ini dalam upaya ikut serta dalam menyuburkan ilmu kepolisian dan menjadi kolega dan patner dalam komunitas keilmuan studi kepolisian. Hubungan harmonis ini tentu saja harus dikembangkan dan ditumbuhsuburkan dalam upaya menciptakan iklim keilmuan dan tradisi pemikiran yang bisa melahirkan difusi inovasi dan terobosan dalam ilmu kepolisian ke depan.

Artikel pertama, yang dihadirkan oleh Jurnal Ilmu Kepolisian edisi ini, yang ditulis oleh Rio Adi Putera dan Jarot Prianggono berjudul *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Anggota Korps Brimob Polri*. Tulisan ini membahas sejauhmana gaya kepemimpinan dan budaya organisasi mempengaruhi motivasi anggota. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif agar pengaruh kedua faktor tersebut dapat diukur. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menjadikan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi sebagai variabel independent dan motivasi kerja sebagai variabel dependen. Survei dilakukan terhadap 138 responden anggota Korps Brimob Polri baik Pelopor maupun Gegana. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan dengan koefisien determinan sebanyak 54% dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan dengan koefisien determinan sebesar 66,5%. Kedua variabel ini juga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja.

Artikel kedua yang ditulis oleh Fandi Arisca dan Akhyar Yusuf Lubis berjudul *Strategis Pemolisian Dalam Pencegahan Konflik Tawuran Antar Warga oleh Polres Metro Jakarta Selatan*. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik konflik yang terjadi, faktor yang memengaruhinya, serta upaya yang telah dilakukan sehingga memberikan saran konstruktif bagi Polres Metro Jakarta Selatan dalam mengelola masalah sosial serta memberikan wacana positif dalam perkembangan Ilmu Kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena strategi pemolisian yang dilakukan oleh Polrestro Jaksel dan fenomena konflik tawuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan merupakan konflik laten yang telah lama terjadi, mengarah pada tindakan anarkis destruktif, kerap terjadi di akhir pekan, dan melibatkan 2 pihak di lokasi *slum area* dengan kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan yang rendah; (ii) faktor-faktor yang menyebabkan konflik tawuran dapat diidentifikasi dalam kategori faktor pemicu (*trigger*), faktor inti (*pivotal factors/root*

causes), faktor penggerak (*mobilizing factors*) dan faktor yang memperburuk (*aggravating factors*); dan (iii) strategi pemolisian yang telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan belum efektif dalam mencegah terjadinya konflik antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan.

Artikel ketiga, yang ditulis oleh Ilham Prisgunanto, Rahmadsyah Lubis dan Tigor Sitorus berjudul *Strategi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Terkait Dengan Radikalisme dan Terorisme*. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa terorisme dan radikalisme adalah kejahatan berat yang mengancam peradaban manusia. Seiring perkembangan zaman kejahatan terorisme dan radikalisme juga menggunakan jejaring internet dalam operasi kerja dan rekrutmen anggotanya. Cyber terorisme dan radikalisme menggunakan media sosial untuk melancarkan isu hoax di dalamnya. Penelitian ini ingin melihat pengaruh hoax isu terorisme dan radikalisme di jejaringan Internet terhadap sikap anggota Polri di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Komunikasi dan Perilaku Publik. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dan pengolahan data regresi linear sederhana dengan penyebaran kuesioner kepada 742 responden. Penelitian ini menunjukkan hampir tidak ada pengaruh hoax isu terorisme dan radikalisme terhadap sikap anggota Polri di lapangan (0,02%) dan masih ada anggota Polri yang meragukan keseriusan penanganan pemberantasan terorisme dan radikalisme oleh Polri.

Artikel keempat, yang ditulis oleh Bima Anggalaksana berjudul *Strategi Penguatan Sinergitas Polri Dengan Kementerian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir di Indonesia Dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri*. Tulisan ilmiah ini membahas sinergitas Polri dengan kementerian lembaga untuk menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif secara faktual yang dirasakan masih belum didukung secara ideal untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri baik dalam hal komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus karena obyek penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah kebijakan yang akan senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan sinergitas Polri dengan kementerian lembaga, antara lain melalui strategi penguatan MoU antara Polri dan Bapeten dan penguatan posisi Indonesia di dalam Badan Atom Internasional (IAEA). Hal lain yang ditunjukkan hasil penelitian ini adalah bahwa sinergitas dapat terbangun melalui dua cara, yaitu komunikasi dan koordinasi.

Artikel kelima, yang ditulis oleh Ronald Andry Mauboy berjudul *Penggunaan Kekuatan Satuan Brimob Polda Maluku Utara Terhadap Penanganan Konflik Toboko Mangga Dua di Kota Ternate*. Artikel ini mendiskusikan penanganan konflik yang terjadi di Kelurahan Toboko Mangga Dua Kota Ternate yang dilakukan oleh Satuan Brimob. Penulis menggunakan analisa SWOT sebagai pisau analisis setiap aspek yang ada pada masyarakat maupun Satuan Brimob Kota Ternate sehingga konflik yang terjadi di Kelurahan Toboko Mangga Dua ini bisa diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlag anggota Brimob yang dikerahkan sangat kurang sehingga ada kebutuhan untuk meminta tambahan anggota. Pergeseran anggota Brimob dari satu pulau ke pulau lain sangat memerlukan waktu dan tenaga sehingga dapat menjadi ancaman karena akan mempengaruhi kondisi fisik anggota yang juga akan berpengaruh terhadap penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate. Hal lain yang diungkapkan adalah kebiasaan masyarakat di kota Ternate yang menjadikan minuman keras sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga dapat memicu terjadinya konflik Toboko Mangga Dua sewaktu-waktu.

Sedangkan artikel keenam yang ditulisa oleh Thomas Agung Kuarnainto, Puguh Santoso, dan Anang Puji Utama berjudul *Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik*. Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah konflik Papua dengan pendekatan mediasi humanistik. Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan mengandalkan kajian pustaka sebagai metode analisisnya. Tulisan ini mengungkapkan bahwa melalui mediasi humanistik, pemerintah Indonesia melakukan dialog dua arah untuk mendengar aspirasi dan keinginan masyarakat Papua. Penulisan ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia melibatkan seluruh lapisan masyarakat Papua di dalam mewujudkan kedamaian dan penyelesaian konflik di propinsi paling timur Indonesia ini.

***Salam Dari Kami
Redaksi***

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Anggota Korps Brimob Polri

Rio Adi Putra¹, Jarot Prianggono²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK¹, Jl. Tirtayasa No.6, RW.4, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160

Correspondence : ¹ rioadiputra05@gmail.com, ² komputerstik@gmail.com

Abstrak

Anggota Brimob adalah aset sumber daya manusia Polri yang strategis sehingga motivasi kerja anggota sangat berpengaruh dan berdampak terhadap kinerja individu dan organisasi. Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan menjadi salah satu faktor terpusat seorang pimpinan dalam organisasi yang menentukan terhadap motivasi, sedangkan budaya dalam suatu organisasi menjadi faktor lain dalam memotivasi anggotanya. Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi menjadi pilihan strategis dalam Korps Brimob Polri untuk menentukan motivasi anggotanya. Permasalahannya adalah sejauhmana gaya kepemimpinan dan budaya organisasi mempengaruhi motivasi anggota Korps Brimob Polri. Penelitian ini adalah studi untuk mengukur pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja anggota Brimob Polri. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif agar pengaruh kedua faktor tersebut dapat diukur. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menjadikan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi sebagai variabel independent dan motivasi kerja sebagai variabel dependen. Survei telah dilakukan terhadap 138 responden anggota Korps Brimob Polri baik Pelopor maupun Gegana. Hasil analisis memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan dengan koefisien determinan sebanyak 54% dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan dengan koefisien determinan sebesar 66,5%. Kedua variabel juga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja.

Abstract

Brimob members are strategic human resource assets of the Police so that the work motivation of members is very influential and has an impact on individual and organizational performance. Several studies have revealed that leadership style is one of the central factors of a leader in an organization that determines motivation, while culture in an organization is another factor in motivating its members. The leadership style and organizational culture are strategic choices in the Brimob Police Corps to determine the

motivation of its members. The problem is the extent to which leadership style and organizational culture influence the motivation of members of the Police Mobile Brigade Corps. This research is a study to measure the influence of leadership style and organizational culture on the work motivation of members of the Police Mobile Brigade. The research was conducted with a quantitative approach so that the influence of these two factors can be measured. The method used is multiple linear regression analysis by making the leadership style and organizational culture as independent variables and work motivation as the dependent variable. The survey has been conducted on 138 respondents from the Brimob Police Corps members, both Pioneers and Gegana. The results of the analysis show that leadership style has a significant effect with a determinant coefficient of 54% and organizational culture has a significant effect with a determinant coefficient of 66.5%. The two variables also simultaneously have a significant effect on work motivation.

Keywords: leadership style, organizational culture, work motivation, multiple linear regression

Pendahuluan

Keberhasilan Brimob sebagai korps khusus di Polri sangat ditentukan oleh kualitas personelnya. Salah satu yang mempengaruhi kualitas personel adalah motivasi kerja. Sehingga dapat diartikan bahwa seluruh personel Brimob dituntut memiliki motivasi yang baik agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Personil Brimob merupakan aset SDM Polri yang penting sehingga motivasi kerja anggota harus dijaga dengan baik agar kualitas kinerja dapat memuaskan. Dari perspektif manajemen sumber daya manusia dan teori perilaku organisasi, motivasi kerja merupakan salah satu variabel penting yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Oleh karena itu, motivasi kerja merupakan parameter penting dari efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dan perilaku organisasi. (Stephen Robbin, 2008; Ivan Cevich, 2010).

Kualitas kinerja personel dalam suatu organisasi kepolisian kemudian sangat bergantung pada kemampuan pimpinan untuk dapat menciptakan lingkungan yang mampu memotivasi anggota organisasi tersebut. Hal ini menjadi tantangan bagi pimpinan Polri untuk memotivasi personel agar bekerja maksimal. Seorang pemimpin dituntut untuk mengetahui kebutuhan personelnya sehingga dapat menjadikan pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai motivasi kerja agar kinerjanya dapat lebih memuaskan.

Salah satu kekhawatiran yang dimiliki sebagian besar organisasi seperti Polri adalah memanfaatkan personel mereka yang merasa positif tentang pekerjaan serta memotivasi karyawan yang tidak puas untuk berakhir dalam situasi yang saling menguntungkan baik bagi perusahaan maupun pekerja. Ulrich (2002) menyatakan bahwa seorang pekerja yang termotivasi akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai misi, tujuan dan sasarannya. Ini juga akan melibatkan semua untuk membangun budaya organisasi yang kuat. Selain itu, karyawan yang termotivasi akan merasa memiliki kemitraan strategis dengan organisasi dan komitmen serta loyalitas mereka akan meningkat dari hari ke hari (Anne, 1994).

Demikian juga menurut penelitian Buttner dan Moore (1997) tentang “Karyawan yang Bahagia Membuat Karyawan yang Produktif”. Mereka menemukan bahwa ketika sikap dan motivasi karyawan meningkat sebesar 5%, dampak pada kepuasan pelanggan meningkat sebesar 1,3%, dan pendapatan meningkat sebesar 5%. Jadi, karyawan yang termotivasi biasanya menghasilkan lebih dari yang lain dan karenanya kepuasan pelanggan meningkat. Karyawan yang termotivasi dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan dan menjadikan tempat kerja sebagai tempat di mana

karyawan ingin berinteraksi, bukan sekedar tempat “mengambil gaji” (Nandanwar, Surnis, Nandanwar 2010). Selain itu, organisasi yang termotivasi dengan baik pasti akan memiliki karyawan yang lebih termotivasi dan karenanya mereka akan lebih produktif dan ini akan mengarah pada penghematan biaya yang ekstrem (Urichuck, 2002). Karyawan/anggota yang puas memiliki dampak positif pada budaya perusahaan/organisasi, menghasilkan banyak keuntungan/hasil yang tidak berwujud tetapi sama pentingnya (Yongsun, Barbara, Christy, 2002). Mereka juga melihat bahwa orang, termotivasi dengan mengirim mereka ke luar negeri untuk tinggal dan bekerja, dipandang sebagai sumber daya yang berharga karena mereka memberi lebih dari biasanya ketika mereka kembali.

Di sisi lain, Deci dan Ryan (1985), memastikan bahwa organisasi yang karyawannya memiliki motivasi rendah sangat rentan terhadap tantangan internal dan eksternal karena karyawannya tidak akan berusaha keras untuk menjaga stabilitas organisasi. Organisasi yang tidak stabil akhirnya berkinerja buruk. Perusahaan perlu memotivasi karyawan mereka dan membuat mereka tetap termotivasi untuk mendapatkan keuntungan produktivitas dan memastikan daya saing mereka. Terkadang orang yang diberi tanggung jawab merasa termotivasi dan melakukan yang terbaik dan bekerja keras sesuai dengan itu (Ludivine, 2011). Mansoor (2008) juga melihat bahwa motivasi adalah tentang menciptakan lingkungan di mana karyawan akan termotivasi dan karenanya bekerja dengan upaya penuh mereka. Jadi, organisasi harus memotivasi karyawannya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan mencapai visi dan misi perusahaan (Philip, Yu-Fang, Liang-Chih, 2007). Jonathan, Christine dan Yvonne (2002) mengidentifikasi bahwa motivasi yang lebih besar akan memiliki efek langsung pada peningkatan produktivitas melalui upaya yang lebih besar dan kemungkinan inovasi.

Personil Korps Brimob banyak melakukan tugas penunjang dan pendampingan bagi tugas operasional Polri untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perilaku dan sikap melayani masyarakat secara profesional, berintegritas dan manusiawi menjadi penting untuk membangun citra polisi. Dalam era pemolisian yang demokratis, sikap dan perilaku anggota dalam melayani masyarakat dituntut untuk mengedepankan metode pemolisian yang humanis dan profesional. Cara-cara penggunaan kekerasan dan kebrutalan dalam pemolisian sudah tidak sesuai lagi sebagai “polisi sipil”, sehingga motivasi kerja anggota mendukung terwujudnya sikap dan perilaku positif dari dampak tingginya motivasi kerja anggota organisasi.

Rasionalitas fokus pada penelitian Korps Brimob, praktis karena Korps Brimob merupakan salah satu unit organisasi di tingkat Mapolres yang memiliki peran dan fungsi dalam memberikan dukungan penuh terhadap terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketertiban di masyarakat. Selain itu, peran strategis Brimob lebih spesifik terkait dengan tugas kepolisian dengan intensitas tinggi yang dibebankan kepada Korps Brimob.

Organisasi kepolisian khususnya anggota Brimob merupakan aset sumber daya manusia yang paling strategis dan penting dalam mendukung tugas kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Gaya kepemimpinan merupakan variabel yang penting dan menarik untuk dikaji dalam penelitian ini karena fenomena gaya kepemimpinan khususnya gaya kepemimpinan otokratis diasumsikan sebagai ciri gaya kepemimpinan dalam organisasi Brimob yang cenderung militeristik.

Penelitian ini menempatkan gaya kepemimpinan transaksional, gaya kepemimpinan otokratis dan gaya transformasional sebagai variabel gaya kepemimpinan yang dianggap berpengaruh langsung terhadap motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan indikator penting dari perspektif manajemen

sumber daya manusia, sehingga kajian motivasi kerja anggota Brimob merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji terkait dengan gaya kepemimpinan. Anggota organisasi yang memiliki motivasi kerja yang baik akan mencerminkan sikap dan perilaku yang positif terhadap pelaksanaan tugas di lapangan dalam pelayanan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Motivasi kerja yang memiliki dimensi intrinsik dan ekstrinsik akan berimplikasi pada bagaimana anggota organisasi bersikap dan berperilaku terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Mengingat anggota Brimob juga mengemban tugas yang berorientasi pada pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perilaku positif anggota Brimob dalam memberikan fungsi pelayanan menjadi sangat penting. Anggota organisasi yang tidak memiliki motivasi yang tinggi tentunya akan berimplikasi pada kematangan psikologisnya.

Dengan adanya Satgas Brimob yang harus siap bekerja setiap saat dan mencakup seluruh wilayah Indonesia, maka diperlukan motivasi kerja yang tinggi untuk dapat dan mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas yang diamanatkan negara kepada unit-unit Brimob. Menurut pengamatan sebagai anggota Brimob, tingkat motivasi kerja anggota Brimob tidak menunjukkan peningkatan yang diharapkan yang ditunjukkan dengan fenomena banyaknya anggota yang mengusulkan untuk pindah ke unit organisasi kepolisian lain yang dianggap memberikan kebutuhan yang lebih baik bagi setiap individu anggota. dari organisasi. Fakta empiris yang menunjukkan fenomena tersebut adalah sejumlah data usulan mutasi personel satuan kerja Brimob Polri yang jumlahnya cukup signifikan. Pada tahun 2020 ada lebih dari 200 anggota Brimob yang mengusulkan untuk dipindahkan ke satuan kerja fungsi kepolisian lainnya. Selain itu, pada tahun 2019 dan 2020 terdapat 71 kasus anggota Brimob yang melanggar disiplin, kode etik dan disertai yang pelanggarannya cukup tinggi (Muhammad Bagus, 2021).

Fenomena empiris yang terjadi seperti data di atas menunjukkan keyakinan akan pentingnya motivasi kerja anggota untuk berkomitmen melaksanakan tugas di unit kerjanya yang bertugas. Fenomena tingginya jumlah anggota Brimob yang akan dimutasi ke unit organisasi lain di lingkungan institusi kepolisian menunjukkan permasalahan rendahnya motivasi kerja karena tidak terpenuhinya kebutuhan individu yang mendorong motivasi kerja. Gaya kepemimpinan diharapkan mampu menciptakan motivasi kerja bagi anggota organisasi yang merupakan variabel yang diduga mempengaruhi motivasi kerja anggota Brimob. Berdasarkan fenomena dan data empiris tersebut, maka penting dilakukan penelitian ini untuk mengkaji gaya kepemimpinan yang diduga mempengaruhi motivasi kerja anggota Brimob dan latar belakang masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian berikut ini. Permasalahan empiris yang memperkuat terjadinya permasalahan motivasi kerja anggota Brimob memperkuat anggapan bahwa permasalahan motivasi kerja merupakan isu penting yang dikaji dalam penelitian ini.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa pertanyaan penelitian menarik yang disusun untuk dianalisis dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitiannya adalah:

- 1) Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja anggota Korps Brimob Polri?
- 2) Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja anggota Korps Brimob Polri?
- 3) Apakah gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja anggota Korps Brimob?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja anggota Korps Brimob Polri; (2) Menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja polisi anggota Korps Brimob; dan (3) Menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja anggota Brimob.

Teori dan Konsep Penelitian

1. Ilmu Kepolisian

Ilmu Kepolisian merupakan konsep ilmiah yang menjelaskan seluk beluk kepolisian dan kegiatan pemolisianannya. Ada banyak definisi yang diberikan oleh berbagai ahli, khususnya para ahli ilmu kepolisian. Pertama, menurut Prof. Mr. Djokosoetono (dalam Ismail, 2015), ilmu kepolisian (*Politie Wetenschappen*) adalah segala pengetahuan (kompleks) yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas kepolisian. Ismail dkk. Al. (2020) juga menyatakan bahwa konsep ilmu kepolisian merupakan konsep ilmu terapan, yang dimaksudkan untuk membantu kehidupan suatu masyarakat. Dr. A. Wahyurudhanto juga menyatakan bahwa Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang dapat digunakan, dipadukan, dan diramu dengan tujuan untuk melihat, memahami, mengkaji, mengobati dan mengelola berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat serta permasalahan dalam mengelola fungsi kepolisian. dan lembaga untuk mendukung tugas kepolisian. dalam menciptakan tatanan sosial. Definisi konseptual inilah yang dijadikan dasar acuan sekaligus batasan penelitian ini agar selalu dalam ranah penelitian ilmu kepolisian.

2. Gaya Kepemimpinan Transformasional

Gaya kepemimpinan transformasional adalah paradigma di mana pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk bekerja melampaui harapan dengan membuat mereka lebih sadar akan pentingnya dan nilai tujuan, mempengaruhi mereka untuk melampaui kepentingan diri sendiri demi kebaikan kelompok atau organisasi, dan dengan menarik. untuk kebutuhan tingkat tinggi mereka (Burns, 1978). ; Bas, 1985). Bass (1985, 1995) dan Bass dan Avolio (1991, 1997) mengkonseptualisasikan model kepemimpinan transformasional dengan empat komponen: pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual dan pertimbangan individual. Pengaruh ideal adalah kepribadian atau karakteristik dan atribut perilaku yang memungkinkan seorang pemimpin untuk menanamkan kebanggaan dan rasa hormat pada pemimpin dan menjadikannya panutan yang dapat dipercaya dan energik bagi para pengikutnya (Rowold & Heinitz, 2007). Dengan demikian, pengaruh ideal seorang pemimpin berfungsi untuk mengubah pengikut dengan menciptakan perubahan dalam tujuan, nilai, kebutuhan, keyakinan, dan aspirasi mereka (Rowold & Heinitz; Yukl, 2002). Transformasi ini dicapai dengan menarik konsep diri pengikut, yaitu nilai-nilai dan identitas pribadi mereka. Tujuannya adalah untuk menarik komitmen, memberi energi kepada karyawan, menciptakan makna dalam kehidupan karyawan, menetapkan standar keunggulan, dan mempromosikan cita-cita yang tinggi. Ini kemudian akan menjembatani kesenjangan antara masalah organisasi saat ini dan tujuan dan aspirasi masa depan (Huang, Cheng, & Chou, 2005).

3. Gaya Kepemimpinan Otoriter

Dalam gaya kepemimpinan otoriter, Alkahtani et al. (2011) menegaskan bahwa otokratis juga

disebut sebagai kepemimpinan otoriter adalah pendekatan di mana pemimpin memiliki kontrol penuh atas proses pengambilan keputusan, menyusun strategi pada pendekatan organisasi, termasuk teknik pemecahan masalah dan memanfaatkan peluang dengan sedikit memperhatikan saran dan pendapat dari pengikut. Studi tentang atribut menguntungkan dari kepemimpinan otokratis telah menekankan waktu dan kenyamanan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Nanjundeswaraswamy dan Swamy (2012), pemimpin dapat memutuskan suatu organisasi atau kelompok tanpa berkonsultasi atau meminta persetujuan dari sekelompok besar orang. Dalam argumen yang sama, Northouse (2017) menegaskan bahwa beberapa keputusan memerlukan sifat kepemimpinan yang kuat untuk didekati dan hal-hal yang harus dilakukan secara efisien dan tepat waktu. Solaja dkk. (2016) berpendapat bahwa jika pemimpin atau manajer adalah orang yang paling berpengetahuan atau berpengalaman dalam kelompok, teknik tersebut pada akhirnya akan mengarah pada proses pengambilan keputusan yang efektif dan cepat.

4. Gaya Kepemimpinan Paternalistik

Meneliti penerapan gaya kepemimpinan paternalistik, Dedahanov et al. (2016) dan Jogulu (2010) menemukan bahwa hal itu paling dapat diterapkan pada saat kurangnya kepemimpinan terutama dalam kelompok kecil yang ditandai dengan manajemen organisasi dan waktu yang buruk serta masalah dengan pengembangan dan penerapan strategi yang efektif. Menurut Steers et al. (2012), seorang paternalis yang kuat mengendalikan tim atau organisasi, memberikan tugas kepada anggota yang tepat, dan menetapkan peta jalan strategis termasuk tenggat waktu dan kualitas tugas. Namun, seperti teknik kepemimpinan otoriter, studi menganggap pendekatan kepemimpinan menjadi masalah yang disebut diktator dan orang-orang dengan kontrol penuh (Chen et al., 2014; Chan, 2014). Menurut Dinham dkk. (2011) dan Jeon et al. (2010), kedua pendekatan (paternalistik dan otoriter) memiliki ruang yang sangat kecil untuk keterlibatan karyawan dan umpan balik yang mengarah pada kegagalan untuk mendorong keterlibatan moral, dan kebencian mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Bartol (2010) tentang pemberdayaan kepemimpinan dan kreativitas karyawan, mengungkapkan bahwa pengawasan ketat yang dilakukan oleh beberapa pendekatan kepemimpinan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres mengakibatkan seseorang menjadi tidak termotivasi, takut, kesal, dan kurang bekerja. Seperti yang ditunjukkan Bello (2012), teknik ini sebagian besar didasarkan pada atribut dan kemampuan seorang pemimpin. Dalam skenario di mana dia lemah, tidak kompeten, dan tidak memiliki pemikiran kritis dan keterampilan memecahkan masalah, seluruh organisasi dapat menderita konsekuensi besar.

5. Gaya Kepemimpinan Laissez-Faire

Pendekatan kepemimpinan laissez-faire mengandaikan elemen-elemen mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif melalui menjadikan karyawan bagian dari organisasi yang lebih besar, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan menumbuhkan mentalitas yang berorientasi pada tujuan. Menurut Bellom (2012) dan Zareen et al. (2015), tipe pemimpin ini menginspirasi melalui bekerja dengan pengikut untuk mencapai tujuan bersama sambil mempromosikan efikasi diri individu dan keyakinan untuk melampaui harapan di tingkat pribadi dan organisasi.

6. Gaya Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan dan pemimpin adalah orang yang memiliki pemikiran dalam merancang pekerjaan, prosedur kerja dan mekanisme kerja. Kepemimpinan transaksional lebih berperan

sebagai manajer, karena sebagai manajer seorang pemimpin lebih berperan dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat prosedural, manajerial, metodologis dan fisik. Kepemimpinan transaksional lebih menitikberatkan pada sistem penghargaan yang diberikan kepada anggota organisasi sesuai dengan prestasi dan kinerja anggota organisasi. Kepemimpinan transaksional tampaknya lebih cocok diterapkan di kalangan staf yang belum dewasa dan lebih menekankan pada pelaksanaan tugas untuk mendapatkan insentif daripada aktualisasi diri. Bentuk kepemimpinan transaksional didasarkan pada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pemimpin dalam organisasi memperhatikan agar bawahan dapat melakukan pekerjaan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi dan pemimpin memahami serta memenuhi kebutuhan bawahan untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Gaya kepemimpinan transaksional berusaha untuk merencanakan pekerjaan agar dapat dilakukan dengan baik oleh bawahan dan mengembangkan komunikasi timbal balik sehingga pemimpin dan bawahan berkontribusi pada organisasi.

7. Gaya Kepemimpinan Otokratis

Pemimpin otokratis cenderung sejalan dengan teori X yang beranggapan bahwa manusia pada umumnya kurang inisiatif, malas, suka diperintah dan butuh pengawasan. Dalam ulasan ini, banyak definisi yang dikemukakan oleh peneliti disorot dan dibahas. Pro dan kontra menggunakan gaya kepemimpinan otokratis juga dicatat. Gaya kepemimpinan otokratis cenderung kurang mendorong berkembangnya ide-ide kreatif untuk pemecahan masalah sehingga pemimpin dituntut untuk menahan diri dalam melakukan pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Sebagai pemimpin, mereka menempatkan diri mereka di depan kelompok karena mereka memfasilitasi kemajuan dan menginspirasi staf untuk mencapai tujuan organisasi. Northouse (2015) mengutip Harry S. Truman, Presiden Amerika Serikat ke-33 yang pernah berkata, "Seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat membujuk orang untuk melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan, atau melakukan apa yang terlalu malas untuk mereka lakukan. melakukan". Proses kepemimpinan melibatkan mempengaruhi staf dan diarahkan pada pencapaian tujuan. Adalah pengaruh tindakan, sikap, perasaan dan tujuan seorang bawahan dalam suatu sistem sosial oleh seorang pemimpin dengan kemauan dan kerjasama yang siap dari bawahan yang bersangkutan. Ketika mempengaruhi staf, gaya kepemimpinan tertentu dipamerkan. Eze (2011) mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai pola sikap atau tindakan pemimpin menurut persepsi anggota organisasi. Adeyemi dan Adu (2011) lebih lanjut menegaskan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara khas di mana seorang pemimpin berhubungan dengan stafnya dan menangani tugas-tugas yang ada di depan kelompoknya.

8. Budaya Organisasi

Robbins (2002) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Schein (1985) mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangkan oleh sekelompok orang ketika mereka belajar memecahkan masalah, beradaptasi dengan lingkungan eksternal, dan berintegrasi dengan lingkungan internal. Sedangkan Brown (1998) sebagaimana dikutip oleh Kenneth et al., (2007) mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola yang dipelajari dari keyakinan, nilai, dan cara menghadapi pengalaman yang telah dikembangkan sepanjang sejarah organisasi yang bermanifestasi dalam pengaturan material dan perilaku organisasi. Berdasarkan beberapa definisi budaya organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah norma, nilai, asumsi, keyakinan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui

oleh seluruh anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam menjalankan aktivitasnya baik bagi karyawan. atau untuk kepentingan orang lain.

9. Motivasi Kerja

Secara teoritis, motivasi karyawan mengukur komitmen, kreativitas, dan energi yang dibawa individu untuk tugas yang diberikan. Terlepas dari ukuran organisasi atau industri, motivasi karyawan dapat memiliki pengaruh tambahan pada pertumbuhan dan kinerja organisasi. Menurut Lazaroiu (2015), kurangnya motivasi tenaga kerja dapat menyebabkan masalah seperti kepuasan diri, ketidaktertarikan, dan keputusasaan yang meluas. Studi telah menunjukkan bahwa karyawan merasakan kontribusi dan kinerja mereka dalam hal efek jangka panjangnya terhadap organisasi dan membuat perbedaan. Mempertimbangkan pandangan individu yang mengarah pada hasil positif memberikan perasaan pencapaian dan nilai (Yahaya, dan Ebrahim, 2016; Northouse, 2018).

10. Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow

Maslow mengemukakan teori bahwa ada lima tingkat kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh karyawan di tempat kerja (Mary & Ann, 2011). Sebelum seorang karyawan dapat pindah ke tingkat hierarki yang lebih tinggi, dia harus puas dan mendapatkan kebutuhan dari tingkat sebelumnya. Lima tingkat kebutuhan manusia yang dijelaskan Maslow dalam teorinya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Pertama, kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan setiap individu untuk bertahan hidup. Mereka seperti makanan, udara, tempat tinggal, dan air. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka karyawan tidak akan dapat melewati level ini (Mary & Ann, 2011). Kedua, kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan yang berkaitan dengan perasaan aman dan tenteram karyawan seperti memiliki asuransi kesehatan, keamanan kerja, dll. Ketiga, kebutuhan sosial – cinta & memiliki berhubungan dengan interaksi dengan orang lain. Hubungan individu dengan orang-orang disekitarnya. Seperti memiliki teman dan merasa diterima oleh orang lain. Keempat, Kebutuhan Harga Diri merupakan perasaan yang penting. Kebutuhan akan penghargaan diklasifikasikan menjadi kebutuhan internal dan eksternal (Vance & Pravin 1976). Kebutuhan penghargaan internal berhubungan dengan harga diri seperti rasa hormat dan prestasi. Kebutuhan penghargaan eksternal adalah kebutuhan seperti status sosial dan pengakuan yang datang dengan pencapaian. Terakhir, kebutuhan Aktualisasi Diri adalah kebutuhan untuk mencapai potensi penuh Anda sebagai karyawan. Menurut Vance & Pravin (1976) kebutuhan ini tidak pernah sepenuhnya terpenuhi. Kebutuhan Aktualisasi Diri seperti kebenaran, kebijaksanaan dan keadilan (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Model Teori Hirarki Kebutuhan Maslow

Hipotesis Penelitian

- Ho: Tidak ada pengaruh kedua variabel bebas terhadap motivasi kerja
- H1: Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja
- H2: Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja
- H3: Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi kuantitatif sebagai pendekatan utama yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian kuantitatif eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel yang telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian atau hipotesis. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, dimulai dengan studi pustaka dan studi lapangan untuk merumuskan masalah dan merumuskan pertanyaan penelitian. Kemudian dilakukan perencanaan penelitian dengan menentukan jumlah sampel dari populasi, menyusun kuesioner dan menentukan objek kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik cluster proportional random sampling terhadap 5.820 populasi Korps Brimob Polri. Dengan menggunakan rumus slovin maka hasil sampling minimal yang dapat diperoleh dari total populasi adalah sekitar 99 sampel. Namun target sampling untuk penelitian ini adalah sekitar 180 sampel, karena validitas penelitian ini akan meningkat apabila target sampling berada di atas minimal sampling. Pembagian angket sebagai salah satu kegiatan survei dilanjutkan dengan uji coba instrumen. Jika instrumen tidak memenuhi persyaratan, maka perlu dilakukan penghapusan item-item instrumen yang tidak layak dan dilakukan survei kembali. Setelah melewati uji validitas dan reliabilitas instrumen, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi-asumsi yang memenuhi syarat data, jika memenuhi analisis data dengan beberapa uji hipotesis, maka dilakukan langkah-langkah untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Penelitian kuantitatif ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dua variabel bebas yang digunakan adalah variabel gaya kepemimpinan (X_1) dan variabel budaya organisasi (X_2), sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah variabel motivasi kerja (Y). Pengukuran data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Skala Likert dengan ketentuan bahwa setiap item dalam dimensi variabel disertai dengan lima pilihan jawaban yang terdiri dari skala 1 sampai 5. Lima pilihan yang digunakan dalam skala likert untuk mengukur variabelnya adalah: 1 untuk “sangat tidak setuju”, 2 untuk “tidak setuju”, 3 untuk “biasa”, 4 untuk “setuju”, dan 5 untuk “sangat setuju”.

Analisis kuantitatif yang dilakukan adalah analisis data statistik. Analisis data statistik dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pengujian instrumen, tahap pengujian asumsi, dan tahap pengujian hipotesis. Pada tahap pengujian instrumen dilakukan dua macam uji statistik, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya pada tahap pengujian asumsi ada empat pengujian yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Terakhir, pada tahap pengujian hipotesis, ada empat pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Keempat uji tersebut adalah Uji T (Uji Signifikansi Parsial), Uji F (Uji Signifikansi Simultan), uji koefisien determinasi, dan uji persamaan regresi.

Hasil Penelitian dan Analisis

Penelitian ini dilakukan pada 180 responden. Semua responden tersebut dapat diidentifikasi data identitasnya ke dalam kategori data XXXX. Penelitian ini menemukan bahwa dari 150 responden mayoritas beridentitas laki-laki (97,2%), dari pelopor petugas divisi (75,6 %), bintara (73,3%), memiliki jabatan sebagai anggota peleton/satuan (87,2%), berstatus kawin lajang (93,3%), pengalaman kerja kurang dari 3 tahun sebagai Polri (85%), pendidikan terakhir SMA/SLTA (85%), berpengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi di Polri sebanyak 1 sampai 3 kali (96,1%), berminat memperoleh beasiswa studi untuk melanjutkan pendidikan tinggi (98,8%), dan memiliki pengalaman ditugaskan oleh pimpinan untuk membantu pengamanan di luar tugas Korps Brimob.

Langkah pertama dari pengujian statistik penelitian ini adalah pengujian instrumen. Dari 55 butir angket yang dibagikan kepada 180 responden, diketahui bahwa butir angket dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dari hasil pengukuran reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach (KR-20), nilai reliabilitasnya sebesar 0,96 yang berarti seluruh instrumen dinilai baik dan dapat dipercaya untuk mengungkapkan informasi di lapangan. Sedangkan untuk pengujian validitas instrumen dengan menggunakan Point Measure Correlation (PTMEA CORR) didapatkan bahwa kolom PTMEA CORR bernilai positif (>0) yang artinya semua item pertanyaan pada instrumen angket dianggap valid.

Selanjutnya adalah pengujian asumsi. Pada tahap pengujian asumsi, ada empat pengujian yang dilakukan. Pertama adalah uji normalitas. Pengujian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov penelitian ini adalah 0,072 atau lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hasil uji normalitas untuk data residual dapat diasumsikan bernilai normal. Pengujian asumsi selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, dimana hasil pengujian ini menggunakan uji heteroskedastisitas Glejser dalam Aplikasi SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan untuk variabel gaya kepemimpinan adalah 0,486 dan untuk variabel budaya organisasi adalah 0,206. Hasil ini menyatakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam uji asumsi ini. Yang ketiga adalah uji autokorelasi menggunakan metode Durbin Watson. Hasilnya adalah dcount (2.233) lebih besar dari dU (1.7514) dan kurang dari 4-dU (2.3074). Dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel bebas tidak terdapat gejala sisa autokorelasi dari analisis regresi. Yang terakhir adalah uji Multikolinearitas, dimana hasil untuk kedua variabel bebas tersebut adalah kedua variabel tersebut memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Artinya tidak terdapat multikolinearitas yang kuat antara kedua variabel independen pada asumsi uji.

Terakhir, tahap pengujian hipotesis. Langkah pertama dari pengujian ini adalah uji t atau uji signifikansi parsial. Uji t pertama untuk variabel kepemimpinan menunjukkan bahwa t hitung (4,056) lebih besar dari t tabel (1,97743) dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan uji t kedua untuk variabel budaya organisasi menunjukkan bahwa t hitung (8,564) lebih besar dari t tabel (1,97743) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan dan variabel budaya organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi kerja di kepolisian (lihat tabel 1).

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,932	1,859		6,956	,000
	Style	,079	,020	,286	4,056	,000
	Culture	,325	,038	,603	8,564	,000

a. Dependent Variable: Motivasi

Tabel 1. Tabel Hasil Uji T

Tahap pengujian hipotesis selanjutnya adalah uji F atau uji signifikansi simultan. Hasil uji F antara variabel Gaya Kepemimpinan dan variabel budaya organisasi pada variabel motivasi kerja menunjukkan bahwa F hitung yang diperoleh adalah 158,831. Nilai F hitung ini lebih besar dari F tabel sebesar 3,06. Selain itu, nilai signifikansi kedua variabel secara simultan adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan dan variabel budaya organisasi secara simultan berpengaruh sangat signifikan terhadap variabel motivasi kerja (lihat tabel 2).

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1885,712	2	942,856	158,831	,000 ^b
	Residual	801,389	135	5,936		
	Total	2687,101	137			

a. Dependent Variable: Motivation

b. Predictors: (Constant), Culture, Style

Tabel 2. F Test result table

Langkah terakhir adalah uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi untuk variabel gaya kepemimpinan menghasilkan nilai R Square sebesar 0,540 artinya besarnya pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap variabel motivasi kerja adalah sebesar 54%. Sedangkan variabel budaya organisasi menghasilkan R Square sebesar 0,665 yang berarti besarnya pengaruh variabel budaya organisasi terhadap variabel motivasi kerja sebesar 66,5% (lihat tabel 3 & 4).

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,735 ^a	,540	,536	3,01565

a. Predictors: (Constant), Style

Table 3. Leadership Style Variable's R Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,816 ^a	,665	,663	2,57109

a. Predictors: (Constant), Culture

Tabel 4. Organizational Culture's R Square

Uji hipotesis selanjutnya adalah uji persamaan regresi. Pengujian ini menunjukkan bahwa koefisien variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,079, dan variabel budaya organisasi sebesar 0,325.

Maka nilai konstanta adalah 12.932. Jadi nilai hasil persamaan regresi (R Square) diperoleh Dengan menggunakan rumus $Y = B_1 X_1 + B_2 X_2 + C$, dimana $Y = \text{Motivasi}$, $X_1 = \text{Gaya Kepemimpinan}$, $X_2 = \text{Budaya Organisasi}$, $B_1 = 0,079$, $B_2 = 0,325$, dan $C = 12,932$ adalah 0,702 (Lihat tabel 5).

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,838 ^a	,702	,697	2,43644

a. Predictors: (Constant), Culture, Style

Tabel 5. Hasil Uji Persamaan Regresi

Pembahasan

Analisis Uji Hipotesis

Penelitian ini melakukan tiga langkah uji hipotesis untuk menguji ketiga hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya. Uji pertama adalah uji t parsial. Pengujian ini bertujuan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua (H1 dan H2). Pengujian kedua adalah uji F untuk menguji hipotesis ketiga bahwa secara bersama-sama variabel gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja anggota Brimob Polri (H3). Tahap ketiga adalah uji koefisien determinasi, yaitu pengujian untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel bebas gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap variabel terikat motivasi kerja.

Uji hipotesis pertama adalah uji t parsial. Uji t parsial ini dilakukan dua kali untuk setiap uji variabel. Hasil uji t parsial pertama untuk gaya kepemimpinan, berdasarkan koefisien output diperoleh t hitung sebesar 4,056. Sedangkan t tabel ($df = n-1 = 177$; 0,05) diperoleh nilai sebesar 1,97346, dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nilai t dan nilai signifikansi memberikan kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, artinya hipotesis H1 dapat diterima. Kedua, hasil uji t parsial kedua untuk variabel budaya organisasi, berdasarkan koefisien output, diperoleh t hitung sebesar 8,564 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,97346 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian secara parsial budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Dengan demikian hipotesis H2 dapat diterima. Dengan demikian, melalui uji t parsial H1 dan H2 menunjukkan bahwa kedua hipotesis dapat diterima

Tahap pengujian hipotesis selanjutnya adalah Uji F. Hasil uji F signifikansi simultan variabel gaya kepemimpinan dan variabel budaya organisasi terhadap motivasi kerja diperoleh F hitung sebesar 158,831. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 3,05. Selain itu, nilai signifikansi kedua variabel secara simultan adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh sangat signifikan terhadap motivasi kerja. Dengan demikian hipotesis H3 dapat diterima.

Tahapan terakhir dari uji hipotesis adalah uji koefisien determinasi. Kontribusi variabel bebas dalam model regresi yang memiliki kemampuan menjelaskan variasi variabel terikat ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Menurut Ghazali (2016) koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square (R²) pada tabel Model Summary. Hasil uji koefisien determinasi pada tabel Model

Summary gaya kepemimpinan menghasilkan nilai R Square sebesar 0,540, artinya besarnya pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap variabel motivasi kerja adalah 54,0%. Sedangkan hasil koefisien determinasi budaya organisasi menghasilkan R Square sebesar 0,665, artinya besarnya pengaruh variabel budaya organisasi terhadap variabel motivasi kerja adalah 66,5%. Menurut Chin (1998), nilai R-Square dikategorikan kuat jika lebih dari 0,67, sedang jika lebih dari 0,33 tetapi lebih rendah dari 0,67, dan lemah jika lebih dari 0,19 tetapi lebih rendah dari 0,33. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan dalam model regresi ini memiliki kontribusi yang sedang karena hanya memiliki koefisien sebesar 0,540. Sedangkan variabel budaya organisasi memiliki kontribusi sedang karena memiliki koefisien determinasi sebesar 0,665.

Analisis Uji Pengaruh

Satu-satunya bentuk pengujian statistik yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat adalah uji persamaan regresi linier berganda. Persamaan garis yang mewakili hubungan antar variabel sehingga dapat digunakan untuk membuat perkiraan dan peramalan disebut persamaan regresi. Perhitungan untuk menentukan nilai koefisien masing-masing variabel regresi dapat dilakukan dengan aplikasi SPSS.

Hasil perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai persamaan regresi diperoleh koefisien gaya kepemimpinan sebesar 0,079 dan koefisien budaya organisasi sebesar 0,325 dan nilai konstanta sebesar 4,130. Dengan demikian persamaan pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap motivasi adalah: $Y = 0,079 X_1 + 0,325 X_2 + 12,932$. Dijelaskan bahwa nilai R untuk gaya kepemimpinan adalah 0,735. Nilai tersebut berarti bahwa hubungan antara variabel bebas/prediktor X1 gaya kepemimpinan dengan variabel terikat/respon Y cukup kuat, persentasenya adalah 73,5%. Sedangkan nilai R untuk variabel bebas/prediktor X2 budaya organisasi adalah 0,816, sedikit lebih kuat dari gaya kepemimpinan, yaitu 81,6%. Jadi motivasi kerja anggota Brimob Polri sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi.

Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari penelitian ini diperoleh koefisien determinasi gaya kepemimpinan $r^2 = 0,54$. Nilai ini berarti, 54% variabel bebas/prediktor X1 gaya kepemimpinan dapat menjelaskan/menjelaskan variabel terikat/respon Y motivasi kerja. Sedangkan koefisien determinasi budaya organisasi adalah $r^2 = 0,665$. Nilai ini berarti bahwa 66,5% variabel bebas/prediktor X2 budaya organisasi dapat menjelaskan/menjelaskan variabel terikat/respon Y motivasi kerja.

Kesimpulan

Pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja dipelajari secara kuantitatif dengan analisis regresi. Penelitian ini berawal dari adanya kesadaran untuk meningkatkan motivasi kerja di jajaran anggota Brimob Polri dikarenakan peran Brimob yang harus selalu berada di garda terdepan dalam melaksanakan tugas keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh anggota garda depan dan gegana. Variabel gaya kepemimpinan dan budaya organisasi penting untuk diteliti karena memiliki hubungan yang erat dengan motivasi anggota.

Dengan kesadaran akan pentingnya peningkatan motivasi kerja dan beberapa landasan teori tentang motivasi kerja, maka dirumuskan variabel gaya kepemimpinan dan budaya organisasi untuk merumuskan masalah guna merumuskan beberapa hipotesis. Hipotesis pertama gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, hipotesis kedua budaya organisasi berpengaruh

signifikan terhadap motivasi kerja dan hipotesis ketiga gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja anggota. dari Brimob Polri.

Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja anggota Brimob. Walaupun memiliki pengaruh yang signifikan, namun nyatanya faktor gaya kepemimpinan dalam penelitian ini memberikan kontribusi yang sedang terhadap motivasi sebesar 54%. Sedangkan variabel budaya organisasi, walaupun berpengaruh signifikan terhadap motivasi, kontribusi budaya organisasi juga masih pada taraf sedang dengan koefisien determinasi sebesar 66,5%. Hasil hipotesis ketiga (H3) mengungkapkan bahwa secara bersama-sama gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Dengan demikian semua hipotesis yang telah dirumuskan diterima.

Saran

Masalah yang muncul pada akhir penelitian adalah variabel gaya kepemimpinan hanya memberikan kontribusi sedang, dan variabel budaya organisasi juga memiliki kontribusi sedang. Hal ini sangat mungkin terjadi karena responden ekstrim sebanyak 11% atau 20 orang masih masuk dalam perhitungan uji koefisien determinasi. Kemungkinan lainnya adalah reliabilitas responden dalam pengisian kuesioner sudah baik namun masih pada tingkat yang kurang optimal. Bisa jadi karena pada saat pengisian kuisisioner masih terdapat kurangnya pemahaman sebagian responden mengenai formulir yang harus diisi atau karena budaya patuh pada pimpinan untuk selalu memberikan nilai yang baik sehingga menjadi bias. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya sebaiknya diberikan keterbukaan atau kebebasan untuk melakukannya sesuai apa adanya.

Kedua variabel dalam penelitian ini juga tidak terlalu kuat secara bersama-sama, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan agar ada tambahan faktor yang menjadi variabel ketiga atau faktor gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang dirinci lebih lanjut dari segi faktor-faktor tersebut sehingga dapat dapat meningkatkan variabel motivasi kerja lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Alkahtani, A. H., Abu-Jarad, I., Sulaiman, M., & Nikbin, D. (2011). The impact of personality and leadership styles on leading change capability of Malaysian managers. *Australian Journal of Business and Management Research*, 1(2), 70-98.
- Bello, S.M. (2012). Impact of ethical leadership on employee job performance. *International Journal of Business and Social Science*, 3(11).
- Bolden, R. (2016). Leadership, management and organisational development. In Gower handbook of leadership and management development (pp. 143-158). Routledge.
- Chan, S.C. (2014). Paternalistic leadership and employee voice: Does information sharing matter?. *Human Relations*, 67(6), 667-693.
- Chen, X.P., Eberly, M.B., Chiang, T.J., Farh, J.L., & Cheng, B.S. (2014). Affective trust in Chinese leaders: Linking paternalistic leadership to employee performance. *Journal of management*, 40(3), 796-819.

- Choi, S. L., Goh, C. F., Adam, M. B. H., & Tan, O. K. (2016). Transformational leadership, empowerment, and job satisfaction: the mediating role of employee empowerment. *Human resources for health*, 14(1), 73.
- Christensen, L.B., Johnson, B., Turner, L.A., & Christensen, L.B., (2011). Research methods, design, and analysis.
- Dedahanov, A.T., Lee, D.H., Rhee, J., & Yoon, J., (2016). Entrepreneur's paternalistic leadership style and creativity: The mediating role of employee voice. *Management Decision*, 54(9), 2310-2324.
- Djamin, A., 2010. *Kumpulan Tulisan Prof. Dr. A'waloedin Djamin, MPA*. Jakarta: PTIK.
- Dinham, S., Anderson, M., Caldwell, B., & Weldon, P. (2011). Breakthroughs in school leadership development in Australia. *School Leadership and Management*, 31(2), 139-154.
- Elliot, A. J., Dweck, C. S., & Yeager, D. S. (Eds.). (2017). *Handbook of competence and motivation: Theory and application*. Guilford Publications.
- Furqon, 1997. *Statistik Terapan Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Gibson, R. (2011). *Rethinking the future: rethinking business, principles, competition, control & complexity, leadership, markets and the world*. Hachette UK.
- Harold, C. M., & Holtz, B. C. (2015). The effects of passive leadership on workplace incivility. *Journal of Organizational Behavior*, 36(1), 16-38.
- Hasibuan, M., 1984. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herzberg, F., 1967. *Work and The Nature of Man*. Cleveland And New York: World Publishing Co.
- Jeon, Y. H., Merlyn, T., & Chenoweth, L. (2010). Leadership and management in the aged care sector: a narrative synthesis. *Australasian journal on ageing*, 29(2), 54-60.
- Jogulu, U. D. (2010). Culturally-linked leadership styles. *Leadership & Organization Development Journal*, 31(8), 705-719.
- Ketokivi, M., & Mantere, S. (2010). Two strategies for inductive reasoning in organizational research. *Academy of Management Review*, 35(2), 315-333.
- Lazaroiu, G., 2015. Employee motivation and job performance. *Linguistic and Philosophical Investigations*, 14, p.97.
- Lewis, S., (2015). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. *Health promotion practice*, 16(4), 473-475.
- Liaw, Y. J., Chi, N. W., & Chuang, A. (2010). Examining the mechanisms linking transformational leadership, employee customer orientation, and service performance: The mediating roles of perceived supervisor and coworker support. *Journal of Business and Psychology*, 25(3), 477-492.
- Löfsten, H. (2016). New technology-based firms and their survival: The importance of business networks,

- and entrepreneurial business behaviour and competition. *Local Economy*, 31(3), 393-409.
- Nanjundeswaraswamy, T. S., & Swamy, D. R. (2012). A literature review on quality of work life and leadership styles. *International Journal of Engineering Research and Applications*, 2(3), 1053-1059.
- Northouse, P. G. (2017). *Introduction to leadership: Concepts and practice*. Sage Publications.
- Northouse, P.G., (2018). *Leadership: Theory and practice*. Sage publications.
- Nyberg, A. J., Pieper, J. R., & Trevor, C. O. (2016). Pay-for-performance's effect on future employee performance: Integrating psychological and economic principles toward a contingency perspective. *Journal of Management*, 42(7), 1753-1783.
- Pekerti, A. A., & Sendjaya, S. (2010). Exploring servant leadership across cultures: Comparative study in Australia and Indonesia. *The International Journal of Human Resource Management*, 21(5), 754-780
- Professionals Australia (2017). *Motivation and Teams - Professionals Australia*. [online] Professionals Australia. Available at: <http://www.professionalsaustralia.org.au/support/career-progression/movingmanagement/management-guides/motivation-teams/> [Accessed 6 Aug. 2018].
- Robbins, S. P., 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi edisi kelima diterjemahkan oleh : Halida dan Dewi Sartika*. Jakarta: Erlangga.
- Robbins, S.P., 2008. *Perilaku Organisasi diterjemahkan oleh : Hadyana Pujaatmaja*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Solaja, M. O., Idowu, E. F., & James, E. A. (2016). Exploring the relationship between leadership communication style, personality trait, and organizational productivity. *Serbian Journal of Management*, 11(1), 99-117.
- Steers, R.M., Sanchez-Runde, C. and Nardon, L., (2012). Leadership in a global context: New directions in research and theory development. *Journal of World Business*, 47(4), pp.479-482.
- Sullivan, J. L., 1992. *Introduction To Police Science diterjemahkan oleh Kunarto*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian.
- Yahaya, R. and Ebrahim, F., (2016). Leadership styles and organizational commitment: literature review. *Journal of Management Development*, 35(2), 190-216.
- Zareen, M., Razzaq, K. and Mujtaba, B.G., 2015. Impact of transactional, transformational, and laissez-faire leadership styles on motivation: A quantitative study of banking employees in Pakistan. *Public Organization Review*, 15(4), 531-549.
- Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. *Academy of management journal*, 53(1), 107-128.

Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Konflik Tawuran Antar Warga oleh Polres Metro Jakarta Selatan

¹Fandi Arisca, ²Akhyar Yusuf Lubis

Sekolah Kajian Strategik dan Global Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian,
Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No.4, Senen, Jakarta Pusat, 10430
2008.fandiarisca@gmail.com

Abstrak

Konflik merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam hubungan sosial dan sering menjadi bagian positif dari pembangunan. Namun demikian konflik yang mengarah pada tindakan anarkis dan destruktif perlu dicegah, salah satunya dengan upaya pemolisian. Konflik berupa tawuran sudah sering terjadi antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan, dan dalam periode tahun 2014-2016 kasusnya cukup banyak. berkaitan dengan hal ini, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik konflik yang terjadi, faktor yang memengaruhinya, serta upaya yang telah dilakukan, sehingga memberikan saran konstruktif bagi Polres Metro Jakarta Selatan dalam mengelola masalah sosial serta memberikan wacana positif dalam perkembangan Ilmu Kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena strategi pemolisian oleh Polrestro Jaksel dan fenomena konflik tawuran. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap peristiwa konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan merupakan konflik laten yang telah lama terjadi dan mengarah pada tindakan anarkis destruktif. Konflik yang kerap terjadi di akhir pekan ini melibatkan 2 pihak di lokasi slum area dengan kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan yang rendah; 2) Faktor-faktor yang menyebabkan konflik tawuran dapat diidentifikasi dalam kategori faktor pemicu (trigger), faktor inti (pivotal factors / root causes), faktor penggerak (mobilizing factors) dan faktor yang memperburuk (aggravating factors); dan 3) Strategi pemolisian yang telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan belum efektif dalam mencegah terjadinya konflik antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan.

Kata Kunci: konflik; strategi; pencegahan; pemolisian.

Abstract

Conflict is something that naturally occurs in social relationships and is often a positive part of

development. However, conflicts that lead to anarchic and destructive actions need to be prevented, one of which is policing efforts. Conflicts in the form of brawls have often occurred between residents of Manggarai Village and Pegangsaan Village, and in the 2014–2016 period there were quite a number of cases. In connection with this, this study aims to determine the characteristics of the conflicts that occur, the factors that influence them, and the efforts that have been made, so as to provide constructive suggestions for the South Jakarta Metro Police in managing social problems and provide positive discourse in the development of Police Science. This study uses a qualitative approach to explore in depth the phenomenon of the South Jakarta Police's policing strategy and the phenomenon of brawl conflict. The research method used is a case study of the incident of a brawl conflict between residents of Manggarai Village and Pegangsaan. The results showed that: 1) The conflict between the residents of Kelurahan Manggarai and Pegangsaan was a latent conflict that had occurred for a long time and led to destructive anarchic actions. Conflicts that often occur on weekends involve 2 parties in slum areas with low social, economic and educational conditions; 2) The factors that cause brawl conflicts can be identified in the categories of triggers, pivotal factors / root causes, mobilizing factors and aggravating factors; and 3) The policing strategy that has been carried out by the South Jakarta Metro Police has not been effective in preventing conflicts between the residents of Manggarai Village and Pegangsaan.

Keywords: conflict; strategy; prevention; policing.

Pendahuluan

1. Latar Belakang Permasalahan

Bapak pemolisian modern, Sir Robert Peel menjelaskan tentang 9 prinsip penegakan hukum. Pada prinsip pertama Beliau menekankan tentang arti penting pencegahan, "The Basic mission that for the police exist is to prevent crime and disorder". Bahwa tujuan mendasar keberadaan polisi adalah untuk mencegah kejahatan dan ketidakteraturan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan dan ketidakteraturan sosial merupakan tujuan utama dari setiap upaya pemolisian yang dilakukan. Konflik tawuran sebagai bentuk dari ketidakteraturan sosial memerlukan upaya pemolisian yang mengedepankan pencegahan sebagai wujud dari paradigma proactive policing.

Jakarta Selatan merupakan bagian dari wilayah Ibu kota Negara Indonesia yang telah mengalami perkembangan dan pembangunan modernisasi. Namun demikian, pembangunan belum dilakukan secara merata sehingga masih terdapat beberapa slum area berupa pemukiman padat dan kumuh yang kerap menyimpan berbagai potensimasalah sosial. Potensi masalah sosial ini dapat berkembang menjadi konflik yang destruktif apabila tidak diintervensi dengan upaya pemolisian. Tingginya konflik tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan mendasari perlu dilakukannya penelitian terhadap fenomena konflik tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Dari data yang dihimpun dalam periode Tahun 2014–2016, tercatat jumlah konflik tawuran yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dalam periode Tahun tersebut berjumlah 61 peristiwa konflik tawuran yang terdiri dari konflik tawuran antar pelajar, antar ormas dan antar warga. Konflik tawuran antar warga menempati urutan intensitas tertinggi dibandingkan 2 jenis konflik tawuran lainnya.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah peristiwa konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan yang terjadi pada tanggal 20 November 2016 dan kembali

berulang pada tanggal 17 Desember 2016. Penelitian dengan menggunakan metode studi kasus ini dilakukan karena adanya indikasi awal bahwa Kelurahan Manggarai memiliki tingkat konflik tawuran antar warga tertinggi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Jumlah konflik tawuran antar warga yang terjadi di setiap Polsek wilayah hukum Polrestro Jaksel dalam periode tahun 2014 – 2016, diketahui bahwa yang tertinggi terjadi di wilayah hukum Polsek Tebet dengan jumlah 19 peristiwa dari keseluruhan peristiwa sejumlah 28 dalam periode tahun 2014 – 2016. Untuk jumlah konflik tawuran antar warga di setiap Kelurahan wilayah hukum Polsek Tebet, konflik tawuran antar warga yang tertinggi terjadi di Kelurahan Manggarai sebanyak 12 kali selama periode tahun 2014 – 2016.

Indikasi kedua yang menguatkan perlu dilakukannya penelitian ini adalah adanya peningkatan jumlah konflik tawuran di wilayah Kelurahan Manggarai pada tahun 2016. Pada tahun 2015 jumlah konflik tawuran di Kelurahan Manggarai sebanyak 2 kali dan tahun 2016 meningkat sejumlah 4 kali. Indikasi ketiga yang menguatkan perlu dilakukannya studi kasus ini yaitu bahwa pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan belum dapat menyentuh akar masalah yang mendasari terjadinya konflik. Hal ini menyebabkan dampak pemolisian yang dilakukan hanya bersifat temporer. Indikasi keempat yang menguatkan perlu dilakukannya studi kasus ini adalah bahwa konflik tawuran yang terjadi antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan telah mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil. Kerugian ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi korban luka ataupun yang mengalami kerusakan properti akibat konflik tawuran yang terjadi. Secara tidak langsung kerugian non-materiil berupa rasa takut yang mengancam masyarakat khususnya kelompok rentan yang bermukim di sekitar di wilayah Kelurahan Manggarai dan Pegangsaan.

Fenomena konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan merupakan konflik lintas batas wilayah yuridiksi. Kelurahan Pegangsaan berada di wilayah hukum Polsek Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat. Perbedaan wilayah yuridiksi ini memerlukan upaya sinergitas polisional yang baik antara Polrestro Jaksel dengan Polrestro Jakpus. Indikasi kelima yang menguatkan penelitian terhadap fenomena ini adalah asumsi adanya kelemahan pada hubungan sinergitas polisional antara Polrestro Jaksel dengan Polrestro Jakpus dalam mencegah terjadinya konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan.

Berdasarkan 5 indikasi tersebut, Peneliti berasumsi bahwa strategi pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan belum dapat mencegah terjadinya konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena pencegahan merupakan bagian penting dari paradigma kepolisian modern yang tengah dikedepankan oleh kepolisian di berbagai negara maju dan berkembang. Kepolisian dituntut berperan aktif mendeteksi setiap potensimasalah sosial yang ada serta secara proaktif melakukan upaya pencegahan dengan mengintervensi potensimasalah sosial tersebut guna mewujudkan keteraturan sosial.

Mengingat kompleksitas fenomena yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan beberapa referensi teori dan konsep seperti Konsep Ilmu Kepolisian dan Gunung Es Kepolisian Proaktif menurut Dahniel (2008) dalam menganalisa konflik tawuran sebagai bentuk masalah sosial yang memerlukan strategi proaktif kepolisian. Sebagai suatu bidang ilmu interdisipliner, Konsep ini akan diperkaya dengan Konsep Community Policing menurut Community Policing Consortium (1994) dan Problem Oriented Policing model SARA menurut Eck dan Spelman (1987), Teori Konflik menurut Simmon Fisher (2001) dan Klem (2007) serta Teori Manajemen Strategik menurut Wheelen dan Hunger (2012) untuk menganalisa fenomena strategi pemolisian yang dilakukan

Polres Metro Jakarta Selatan dalam mencegah konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan.

Merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Eliantoro Jalmaf dan Kadek Citra Dewi Suparwati tentang fenomena pemolisian terhadap konflik sosial, dapat diketahui bahwa konflik tawuran antar warga masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini memerlukan upaya pemolisian yang serius dalam pengelolaannya guna menjaga stabilitas Kamtibmas. Dalam jurnal berjudul *Conflict in Africa : A Search for Conflict Prevention Strategy* yang ditulis oleh Dr. John Tor Tsuwa dan Edwin Ochoga (2016) dijelaskan bahwa pemerintah negara-negara di Afrika harus lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan yang berfokus pada deteksi dini dan mewujudkan good governance. Jurnal ini memberikan gambaran tentang pentingnya upaya pencegahan terhadap suatu permasalahan konflik. Beberapa penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa pemolisian yang berfokus pada pencegahan terhadap konflik sosial merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk meneliti fenomena strategi pemolisian dalam pencegahan konflik sosial sebagai bagian dari paradigma pemolisian proaktif yang tengah dikedepankan dalam sistem kepolisian di Indonesia saat ini. Penulisan skripsi ini mengambil judul “Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Konflik Tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan (Studi Kasus Konflik Tawuran Antar Warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan)”. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan saran konstruktif bagi Polres Metro Jakarta Selatan dalam mengelola masalah sosial serta memberikan wacana positif dalam perkembangan Ilmu Kepolisian.

Berkaitan dengan penjelasan dalam latar belakang tersebut, maka ada tiga tujuan utama dilakukannya penelitian ini. Pertama adalah mengeksplorasi dan mendeskripsikan karakteristik konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan. Kedua, mengeksplorasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan. Terakhir, mengeksplorasi dan menganalisis strategi pemolisian dalam pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

2. Kerangka Teori

a. Konsep Pencegahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa pengertian pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah atau penegahan atau penolakan agar sesuatu tidak terjadi. Dalam konsep pemolisian masyarakat sebagai suatu paradigma pemolisian modern saat ini, tugas kepolisian lebih diprioritaskan pada berbagai kegiatan pencegahan kejahatan, serta pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menurut Reksodiputro (1996) “Pemolisian adalah suatu inisiasi dari pencegahan dan pengendalian terhadap kejahatan serta peradilan pidana dari hampir keseluruhan konteks sosio kultural (Reksodiputro, 1996, Chryshnanda D.L., 2003: 6).

Gangguan Kamtibmas atau permasalahan sosial yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peristiwa tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Pegangsaan. Peneliti mengkaji berbagai upaya pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka mencegah

terjadinya peristiwa tawuran antar warga tersebut. Sebagai sebuah institusi yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan keteraturan sosial, kepolisian harus melakukan pencegahan terhadap berbagai peristiwa permasalahan sosial.

b. Konsep Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*)

Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) merupakan suatu model pemolisian modern yang tengah dikembangkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Salah satu konsep pemolisian masyarakat yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan pemolisian masyarakat adalah *Community Policing Consortium* (1994), yang menegaskan tentang sebuah usaha bersama diantara polisi dan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kejahatan dan ketidakteraturan, serta melibatkan seluruh bagian masyarakat dalam mencari solusi masalah tersebut. Polisi tidak dapat berdiri sendiri dalam mengendalikan setiap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Terdapat dua komponen utama dalam konsep *Community Policing*, yaitu kemitraan (*partnership*) dan pemecahan masalah (*problem solving*).

Pengertian kemitraan (*partnership*) sehubungan dengan konsep pemolisian masyarakat terdapat dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan atau penanggulangan gangguan Kamtibmas (Mabes Polri, Pasal 3 huruf c: 2015). Dalam mewujudkan kemitraan, Polisi harus membangun hubungan kesetaraan dengan masyarakat sehingga tidak ada "gap" di antara keduanya. Dengan kesetaraan yang ada dan didukung hubungan positif diantaranya maka kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk mendukung tugas kepolisian akan terwujud.

Salah satu konsep pemecahan masalah yang dalam pemolisian masyarakat dikenalkan oleh Herman Goldstein (1979) sebagai konsep Problem Oriented Policing. Konsep tersebut menjelaskan bahwa pemolisian yang berorientasi pada masalah merupakan bentuk dari pemolisian masyarakat dimana Polisi secara fokus mengidentifikasi setiap informasi yang berhubungan dengan masalah sosial yang ada untuk membantu pengambilan tindakan kepolisian yang tepat. Upaya ini tidak dapat dilakukan sepihak oleh Polisi, melainkan harus didukung dengan usaha bersama dari elemen masyarakat yang ada.

Konsep *Problem Oriented Policing* menurut Herman Goldstein dikembangkan oleh William Spelman dan John E. Eck (1987) dengan menggunakan model SARA yang terdiri dari scanning, analysis, respons, dan assessment (William Spelman dan John E. Eck, 1987 : 2). *Scanning* merupakan tahap pengidentifikasian setiap informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. *Analysis* merupakan tahap pengumpulan data dan informasi terkait masalah untuk menentukan ruang lingkup, sifat dan penyebab masalah tersebut. *Response* yaitu penggunaan informasi dalam menganalisa dan merumuskan tindakan yang tepat dalam memecahkan masalah dengan melibatkan berbagai instansi dan komunitas lain yang berkompeten. *Assessment* yaitu mengevaluasi akibat dari tindakan yang dilakukan dalam pemecahan masalah. Hasil ini dapat digunakan untuk menilai kembali masalah dan perubahan tindakan atau mempertahankan kondisi positif yang dihasilkan (disadur dari Anthony A. Braga, 2008: 15, menyadur dari Eck dan Spelman, 1987).

a. Konsep Tawuran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari kata tawuran adalah perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal. Merujuk dari pengertian tersebut, tawuran merupakan perkelahian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam setiap kelompok yang berselisih paham. Penelitian ini mengkaji peristiwa tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan. Peristiwa perkelahian antar warga kedua wilayah kelurahan tersebut, melibatkan puluhan bahkan ratusan orang warga.

b. Ilmu Kepolisian

Ilmu Kepolisian digunakan untuk mempelajari tugas kepolisian berupa masalah-masalah sosial, dengan tujuan untuk mewujudkan keteraturan sosial. Dalam penelitian ini, konflik tawuran antar warga di Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan merupakan salah satu bentuk masalah sosial, sedangkan strategi pemolisian dalam pencegannya merupakan bentuk pengelolaan lembaga kepolisian (Polres Metro Jakarta Selatan) terhadap masalah sosial tersebut. Fenomena ini dapat dipelajari dengan konsep Ilmu Kepolisian.

c. Teori Manajemen Strategik

Wheelen dan Hunger dalam bukunya *Strategic Management and Business Policy* (2012) menjelaskan bahwa "A comprehensive plan that states how a corporation will achieve its mission and objectives". Strategi adalah sebuah perencanaan komprehensif yang menyatakan bagaimana korporasi dapat mencapai misi dan tujuannya. Dalam penelitian ini fenomena strategi merupakan upaya yang telah direncanakan secara komprehensif oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam batasan tujuan pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan.

Manajemen strategik merupakan seperangkat keputusan dan aksi manajemen yang menentukan tindakan organisasi dalam jangka panjang. Proses ini terdiri dari empat elemen dasar yaitu (1) environmental scanning, (2) strategy formulation, (3) strategy implementation, dan (4) strategy evaluation (disadur dari Thomas L. Wheelen dan Hunger, 2012: 5).

Environmental scanning adalah proses memonitor, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi dari lingkungan baik internal maupun eksternal kepada orang-orang penting dalam organisasi. *Strategy formulation* adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk membuat sebuah tata kelola manajemen yang efektif dari peluang dan ancaman dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. *Strategy implementation* adalah sebuah proses dimana strategi dan kebijakan diletakkan dalam serangkaian aksi melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. *Evaluation and control* adalah sebuah proses dimana aktivitas dan pencapaian hasil organisasi dimonitor sehingga hasil yang dicapai dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

d. Teori Konflik Sosial

Teori konflik sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik menurut Simmon Fisher (2001) dan teori konflik menurut Klem (2007). Teori konflik sosial menurut Simmon Fisher (2001) ini akan digunakan Peneliti dalam menganalisa gambaran umum konflik yang

terjadi antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan. Sementara teori Klem membagi suatu konflik dalam 4 karakteristik faktor-faktor penyebabnya, yaitu: triggers (pemicu), pivotal factors/root causes (faktor inti/penyebab), mobilizing factors (faktor yang memobilisasi), aggravating factors (faktor yang memperburuk) (disadur dari Jamil, 2007: 16, menyadur dari Klem, 2007).

Triggers (pemicu) adalah peristiwa yang memicu konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri. *Pivotal factors / root causes* (faktor inti / penyebab) adalah terletak pada akar konflik yang perlu ditangani untuk mengatasi konflik. *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi), masalah/situasi yang memobilisasi kelompok untuk melakukan kekerasan. *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk), faktor yang memberikan tambahan pada poin a dan b tapi tidak cukup untuk menimbulkan konflik itu sendiri (disadur dari Jamil, 2007: 16, menyadur dari Klem, 2007). Dalam penelitian ini, teori konflik sosial digunakan untuk menganalisis deskripsi konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan.

3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi yaitu jurnal internasional berjudul *Conflict in Africa : A Search for Conflict Prevention Strategy* yang ditulis oleh Dr. John Tor Tsuwa dan Edwin Ochoga pada tahun 2016, yang berfokus pada konflik di Afrika dan strategi pencegahan konflik dengan studi kasus konflik di Sudan dan Darfur. Meskipun sama-sama mengkaji tentang konflik, terdapat perbedaan mendasar yang terletak pada objek dan lokasi penelitian. Objek dan lokasi penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah konflik yang bersifat vertikal antara warga dengan pemerintah di Afrika, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah konflik yang bersifat horizontal antar warga.

Penelitian lain yang dijadikan referensi berjudul *Konflik dan Kebijakan Penyelesaian Konflik (Studi Kasus Konflik Sosial Komunitas Masyarakat Etnis Sumbawa dan Komunitas Masyarakat Etnis Bali di Wilayah Hukum Polres Sumbawa)*, oleh Eliantoro Jalmaf pada tahun 2016. Penelitian tersebut berfokus pada penanganan konflik sosial, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi pemolisian dalam pencegahan konflik sosial.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena pencegahan merupakan suatu bentuk dari paradigma pemolisian modern. Selain itu beberapa teori yang digunakan juga memiliki nilai kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya, yakni Teori yang digunakan dalam penelitian ini lebih memiliki nilai kebaruan, dengan digunakannya Teori Konflik menurut Klem (2007), Teori Manajemen Strategik menurut Wheelen dan Hunger (2012) serta Konsep Ilmu Kepolisian menurut Dahniel (2008).

4. Permasalahan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah strategi pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan belum dapat mencegah terjadinya konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan. Penyelenggaraan strategi pemolisian yang belum dilakukan secara optimal dan komprehensif hanya memberikan dampak pencegahan yang temporer. Konflik antar

warga yang belum terselesaikan hingga ke akar masalahnya dapat muncul kembali di permukaan sosial dalam bentuk gangguan nyata yang mengganggu stabilitas Kamtibmas. Rumusan masalah ini yang mendasari dilakukannya penelitian. Beberapa pertanyaan penelitian yang akan dikaji yaitu:

- a. Bagaimana karakteristik konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan?
- b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan?
- c. Bagaimana strategi pemolisian dalam pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan oleh Polres Metro Jakarta Selatan?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena strategi pemolisian oleh Polrestro Jaksel dan fenomena konflik tawuran. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap peristiwa konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan yang terjadi pada tanggal 20 November 2016 dan kembali berulang pada tanggal 17 Desember 2016. Dalam penelitian ini sumber data atau informasi yang dipilih penulis dalam rangka memperoleh data serta informasi yang mendalam dikelompokkan ke dalam sumber data primer dan sekunder. Sumber data / informasi primer merupakan manusia yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan fenomena yang diteliti dengan pertimbangan memiliki banyak informasi penting yang berhubungan dengan fokus penelitian. Sumber data primer penelitian ini terdiri dari sejumlah petinggi di Polrestro Jaksel maupun Polsek setempat, termasuk: Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kabag Ops, Kabag Ren, Kasat Binmas, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kapolsek Tebet Kanit Binmas Polsek Tebet, Kanit Intelkam Polsek Tebet, Kanit Reskrim Polsek Tebet, Bhabinkamtibmas wilayah Manggarai, Pokdar Kamtibmas wilayah Manggarai, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga Kelurahan Manggarai, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga Kelurahan Pegangsaan, Pejabat Kelurahan Manggarai, dan Pejabat Kelurahan Pegangsaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, kemudian akan dilakukan analisis terhadap hasil data yang diperoleh. Analisis data penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data berupa 3 tahapan yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum

a. Gambaran Umum Polres Metro Jakarta Selatan

Penelitian dilakukan pada fenomena yang berada di wilayah hukum instansi Polres Metro Jakarta Selatan, Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Pegangsaan. Polres Metro Jakarta Selatan merupakan satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta

Selatan. Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan meliputi seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas wilayah 15.184,5 Ha. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Tebet, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Jagakarsa dan Kecamatan Pesanggrahan. Di setiap kecamatan terdapat Polsek (Kepolisian Sektor) yang berada di bawah struktur Polres Metro Jakarta Selatan dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di wilayahnya.

b. Gambaran Umum Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Pegangsaan

Kelurahan Manggarai terletak di dalam wilayah Kecamatan Tebet. Kantor Kelurahan Manggarai terletak di Jalan Lapangan Menara Air, RT 07 / RW 11, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Kelurahan Manggarai memiliki luas wilayah 95,30 Ha dengan jumlah penduduk pada bulan September 2016 menurut data di kelurahan Manggarai sejumlah 33.825 orang yang terdiri dari 11.222 Kepala Keluarga. Kelurahan manggarai terdiri dari 12 Rukun Warga (RW) dan 152 Rukun Tetangga (RT). Menurut keterangan Lurah Manggarai bahwa 90% warga manggarai termasuk kalangan menengah ke bawah. Wilayah yang padat penduduk dan tingkat perekonomian yang rendah menjadikan Kelurahan Manggrai sebagai wilayah yang rentan terhadap berbagai gangguan Kamtibmas dan permasalahan sosial.

Disisi lain, Kelurahan Pegangsaan terletak di Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Luas wilayahnya 98,25 Ha dan dihuni sejumlah 26.894 penduduk dengan 8.999 Kelapa Keluarga. Kelurahan Pegangsaan memiliki jumlah penduduk sebesar 21. 261 jiwa yang terdiri dari 10.866 laki-laki dan 10.755 perempuan. Dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk di Kelurahan Manggarai, kepadatan penduduk di Kelurahan Pegangsaan lebih rendah dari kepadatan penduduk Kelurahan Manggarai.

Karakteristik Konflik Tawuran Antar Warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan

Konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan pertama kali terjadi pada tahun 1988. Sebagai besar konflik yang terjadi berupa tawuran, dengan indikasi tindakan anarkis dan destruktif. Namun demikian konflik tersebut terhenti dalam kurun waktu yang cukup lama hingga kembali terjadi pada akhir tahun 2014. Pemolisian yang dilakukan dalam mengelola konflik ini cukup berhasil untuk mencegah konflik selama periode tahun 2015 sehingga tidak terjadi peristiwa tawuran selama periode tersebut. Namun demikian, dampak pemolisian yang dilakukan Polrestro Jaksel hanya bersifat temporer. Pada akhir tahun 2016 kembali terjadi aksi tawuran antar kedua pihak. Peristiwa ini tidak dikelola dengan optimal sehingga aksi tawuran kembali berulang selang waktu 1 bulan berikutnya.

Untuk pihak yang terlibat dalam konflik, mereka adalah warga Kelurahan Manggarai dan Pegangsaan yang tinggal di slum area berupa pemukiman padat penduduk dan kumuh. Kedua pihak yang berkonflik memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Hal ini yang menjadi sumber konflik dan belum menjadi perhatian para pengemban kepentingan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi. Lokasi utama tempat kejadian konflik biasanya terjadi di sekitar Jembatan Pintu Air yang merupakan perbatasan antara Kelurahan Manggarai dengan

Kelurahan Pegangsaan. Sementara waktu terjadinya konflik biasanya berlangsung akhir pekan.

Dampak dari konflik sosial antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan adalah terjadinya bentrok fisik berupa tawuran antar warga kelurahan yang selalu mengakibatkan korban luka. Selain korban luka juga terdapat korban yang mengalami kerusakan barang berupa motor ataupun mobil. Konflik tawuran yang terjadi dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan kondisi konflik. Terdapat korban penjarahan saat konflik tawuran yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2014. Selain kerugian materiil yang dirasakan para korban, kerugian non materiil juga dirasakan seluruh warga para pihak serta warga yang berada di sekitar lokasi konflik. Seluruh warga merasa trauma apabila mendengar suara petasan. Kekhawatiran dan rasa takut warga Kelurahan Manggarai terutama wanita dan anak-anak.

Terkait dengan kondisi konflik terbaru, diketahui bahwa peristiwa konflik tawuran yang sebelumnya terjadi pada tahun 2014 dapat dicegah selama periode tahun 2015. Konflik ini kembali berulang pada tanggal 20 November 2016 dan kembali terjadi pada tanggal 17 Desember 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemolisian yang dilakukan oleh Polrestro Jaksel belum didasari identifikasi masalah substantif menurut Herman Goldstein (1979). Masalah substantif ini merupakan pivotal factors / root causes (akar masalah / faktor inti) yang dijelaskan oleh Klem (2007). Pemolisian yang belum menyentuh akar masalah sebagai masalah substantif hanya bersifat temporer dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Sehingga konflik tawuran kembali terjadi apabila timbul peristiwa pemicu (trigger) dalam interaksi sosial di antara warga kedua belah pihak.

Faktor-faktor Penyebab Konflik Tawuran Antar Warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan.

Dalam mendeskripsikan faktor-faktor penyebab konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan, Penulis merujuk Teori Konflik Sosial menurut Klem (2007) yang menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Klem membagi 4 karakteristik faktor-faktor penyebabnya, yaitu:

a. *Triggers* (pemicu)

Faktor pemicu merupakan peristiwa yang memicu konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri. Berikut ini merupakan faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya tawuran antar warga Manggarai RW 04 dengan Kelurahan Pegangsaan RW 06 adalah permasalahan sepele antara anak kecil ataupun kelompok pemuda. Peristiwa yang sering menjadi faktor pemicu konflik tawuran diantaranya yaitu:

1. Saling ejek antar kelompok anak kecil.
2. Kelompok anak kecil yang memaksa meminta uang ke orang lain melintasi batas wilayah Kelurahan.
3. Adanya kembang api atau petasan yang diarahkan ke pemukiman warga.

b. Pivotal factors / root causes (faktor inti / akar masalah),

Faktor inti terletak pada akar konflik yang perlu ditangani untuk mengatasi konflik. Pada kasus

ini, faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya konflik adalah kondisi sosial, ekonomi, pendidikan warga Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Pegangsaan yang rendah. Kondisi ini diakibatkan pemukiman warga yang tidak layak di lokasi slum area, masih banyaknya warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan rendahnya tingkat pendidikan warga. Kondisi ini belum pernah tersentuh oleh para pemangku kepentingan baik pihak kepolisian maupun instansi pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan konflik yang terjadi antara kedua pihak tidak diselesaikan secara tuntas.

c. *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi)

Mobilizing factors, merupakan masalah/situasi yang memobilisasi kelompok untuk melakukan kekerasan. Dari kasus yang dianalisis, diketahui bahwa adanya suara petasan yang diarahkan ke pemukiman warga dapat menggerakkan warga untuk turun ke jalan melakukan aksi tawuran. Provokasi yang disampaikan oknum pemuda juga dapat menggerakkan anggota kelompok yang awalnya hanya berdiam di lokasi aman menjadi ikut turun ke jalan melakukan aksi tawuran. Konformitas kelompok untuk membela anggota kelompoknya dapat menggerakkan dirinya untuk ikut dalam aksi tawuran.

d. *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk)

Aggravating factors merupakan faktor yang memberikan tambahan pada poin adanb tapi tidak cukup untuk menimbulkan konflik itu sendiri. Saat berlangsung konflik tawuran, terdapat beberapa faktor yang dapat memperburuk keadaan. Faktor tersebut yaitu adanya pembiaran dari orang tua terhadap kegiatan anak-anaknya di malam hari, dugaan adanya oknum yang menyuplai petasan kepada warga Kelurahan Pegangsaan dalam jumlah banyak untuk menyerang warga Kelurahan Manggarai dan pengaruh minuman keras serta narkoba. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas faktor pemicu dan faktor inti (akar masalah).

Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Konflik Tawuran Antar Warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan oleh Polres Metro Jakarta Selatan

Berikut ini merupakan rincian dari strategi pemolisian yang dilakukan oleh petugas Polres Metro Jakarta Selatan terhadap konflik yang terjadi diantara Warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan, yaitu:

a. **Strategi Pemolisian yang Telah Dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan**

Strategi pemolisian dalam pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan yang telah dilakukan oleh Polrestro Jaksel telah banyak dilakukan oleh kepolisian setempat. Beberapa strategi yang dimaksud tersebut dapat ditemui melalui sejumlah dokumen dan kebijakan yang diadakan oleh Polrestro Jaksel. Berikut penjelasan lebih detailnya:

1. **Dokumen Perencanaan Strategi Polrestro Jaksel**

Polres Metro Jakarta Selatan telah memiliki perencanaan strategi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Fakta ini dapat diketahui dari adanya data sekunder berupa dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Tahunan 2017 yang didalamnya memuat strategi Polres Metro Jakarta Selatan. Renstra dan Renja tahunan merupakan bentuk manajemen strategi jangka panjang, karena dalam penyusunannya dilakukan perencanaan yang

matang untuk pelaksanaan kegiatan Polrestro Jakarta Selatan 5 tahun kerja (Renstra) dan 1 tahun kerja (Renja Tahunan). Manajemen strategik sebagai seperangkat keputusan dan aksi manajemen yang menentukan tindakan organisasi dalam jangka panjang yang terdiri dari empat elemen dasar yaitu (1) *environmental scanning*, (2) *strategy formulation*, (3) *strategy implementation*, dan (4) *strategy evaluation* (disadur dari Thomas L. Wheelen dan Hunger, 2012: 5).

Namun, dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen perencanaan strategi Polrestro Jaksel berupa Renstra dan Renja tahunan belum merencanakan strategi pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan secara optimal. Hal ini dikarenakan proses penyusunannya yang tidak sesuai dengan Teori Manajemen Strategik menurut Wheelen dan Hunger (2012), Konsep *Community Policing* menurut *Community Policing Consortium* (1994) dan Konsep Gunung Es Kepolisian Proaktif menurut Dahniel (2008).

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Konflik Tawuran

Pada awal tahun 2015, Polres Metro Jakarta Selatan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Antisipasi Tawuran. SOP ini memuat panduan cara bertindak dalam pencegahan, pengamanan dan penindakan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan. Dalam SOP antisipasi konflik tawuran, terdapat SOP pencegahan dan pengamanan tawuran yang hanya memuat langkah-langkah yaitu: a) Identifikasi Masalah; b) Pergelaran Personel; c) Patroli; d) Sinergitas 3 Pilar; e) Buat Posko; dan f) Sosialisasi dan Spanduk.

Dalam hal ini, secara garis besar diketahui bahwa sosialisasi tentang SOP Pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan tidak dilakukan secara menyeluruh kepada anggota Satker terkait. Fakta ini menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi yang sinergis antara masing-masing Satker dalam pencegahan konflik tawuran antar warga. Dalam Konsep Gunung Es Kepolisian Proaktif dikenal 3 strategi pada fungsi deteksi dini dan preemtif, strategi pada fungsi preventif dan strategi pada fungsi represif investigatif. Ketiga strategi ini dilakukan bersama-sama, saling berhubungan dan saling mendukung satu dengan lainnya (*Simultaneous Strategy to Social Problem*). Sat Binmas yang bergerak pada fungsi deteksi dini, preemtif dan preventif di Polrestro Jaksel tidak mendistribusikan SOP pencegahan konflik tawuran yang diketahuinya kepada Satker lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan masing-masing fungsi tidak saling berhubungan dan mendukung satu dengan lainnya. Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemolisian yang dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan belum sesuai dengan Konsep Gunung Es Kepolisian Proaktif menurut Dahniel (2008) yang juga dikenal sebagai strategi simultan terhadap masalah sosial (*Simultaneous Strategy to Social Problem*).

3. Langkah Pemolisian dalam Pencegahan Konflik Tawuran

Strategi pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan yang dilakukan dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan masih bersifat reaktif. Fakta ini dapat diketahui dari pembahasan Dokumen Renstra, Renja dan SOP sebelumnya. Kurang optimalnya perumusan dan substansi dokumen tersebut menunjukkan kurang proaktifnya Polres Metro Jakarta dalam mengelola fenomena konflik tawuran antar warga sebagai suatu masalah sosial. Aktualisasi strategi Polrestro Jaksel dapat diketahui dari langkah pemolisian yang telah

dilakukan sehubungan fenomena konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan. Diketahui bahwa konflik sosial yang terjadi antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan telah terjadi sejak lama. Secara garis besar, sebelum aksi tawuran tanggal 20 November 2016 dan sesudahnya, telah banyak strategi pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, yang mana ini mencakup: a) Strategi pada Fungsi Deteksi Dini dan Preemptif; Strategi pada Fungsi Preventif; dan c) Strategi pada Fungsi Investigatif dan Represif

Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan tentang fenomena strategi pemolisian yang telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, berikut merupakan penerapan strategi pemolisian yang telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan (*Existing Policy Strategy*):

- 1) Polrestro Jaksel belum dapat mengidentifikasi fenomena konflik antara warga Manggarai dengan Pegangsaan sebagai suatu masalah yang perlu dikelola dengan serius dalam dokumen strategi Polrestro Jaksel (Renstra dan Renja). Hal ini dikarenakan penyusunan dokumen yang berisi strategi Polrestro Jaksel (Renstra & Renja) tidak melibatkan Bhabinkamtibmas dan Fungsi Intelkam untuk mendeteksi masalah sosial yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan sebagai dasar dari penyusunan strategi, program, kegiatan dan pengalokasian anggaran dalam dokumen strategi Polrestro Jaksel.
- 2) SOP Pencegahan Tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Tambak (Pegangsaan) tidak disosialisasikan kepada seluruh personel yang dilibatkan, tidak memuat kegiatan yang harus dilakukan secara rinci oleh personel dan belum dievaluasi berdasarkan perkembangan Situasi Kamtibmas.
- 3) Kurangnya Sinergitas Polisional yang dibangun oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan Polres Metro Jakarta Pusat dan Pemerintah Daerah Jakarta Selatan dan Pusat.
- 4) Pemolisian hanya bertumpu pada Bhabinkamtibmas dan Kapolsubsektor Manggarai.
- 5) Tidak ada kegiatan pembinaan potensi masyarakat melalui Pembinaan Keamanan Swakarsa (Binkamsa). Sehingga tidak ada upaya masyarakat untuk mengaktifkan Siskamling ataupun ronda kampung.
- 6) Upaya mediasi tidak melibatkan Tokoh Pemuda yang memiliki pengaruh besar dalam setiap peristiwa konflik tawuran.
- 7) Bimbingan penyuluhan yang dilakukan belum menyentuh kelompok Pemuda.
- 8) Patroli dialogis melalui Door to Door System (DDS) kurang tidak dilakukan secara rutin. Patroli hanya dilakukan oleh personel piket Polres dan Polsek yang berdiam di Posko selama kurang lebih 1 jam dan melanjutkan ke beberapa lokasi rawan Kamtibmas lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan patroli hanya bersifat temporer saja.
- 9) Pergelaran pasukan yang melakukan pengamanan hanya berfokus pada personel Polsek Tebet tanpa melibatkan personel Polres secara rutin terencana.
- 10) Kurangnya penggalangan Intelijen sehingga deteksi dini dari Fungsi Intelkam belum dapat memberikan peringatan dini (*early warning*).

- 11) Kring serse tidak dilakukan karena kurangnya kontrol dari pimpinan Fungsi Reskrim. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya informasi yang diterima Polres terkait perkembangan situasi Kamtibmas di lokasi rawan konflik.

b. Strategi Pemolisian yang Diharapkan dalam Pencegahan Konflik Tawuran (*Future Policing Strategy*)

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada Sub Bab sebelumnya diketahui bahwa strategi pemolisian yang telah dilakukan oleh Polrestro Jaksel belum sesuai dengan Konsep Gunung Es Kepolisian menurut Dahniel (2008), Konsep Community Policing menurut Community Policing Consortium (1994), Konsep Problem Oriented Policing model SARA menurut Eck dan Spelman (1987), Teori Manajemen Strategik menurut Wheelen dan Huger (2012) dan Teori Konflik Sosial menurut Fisher (2001) dan Klem (2007). Kondisi ini mengakibatkan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan masih terus terjadi dan mengarah pada tindakan anarkis destruktif sebagai suatu ambang gangguan yang setiap saat dapat berkembang menjadi gangguan nyata.

Penulis mencoba memberikan rekomendasi tentang strategi pemolisian yang diharapkan ke depan dalam pencegahan konflik tawuran antar warga berdasarkan analisa Ilmu Kepolisian dengan Konsep Gunung Es Kepolisian Proaktif (Dahniel: 2008), Konsep Community Policing (Community Policing Consortium: 1994), Konsep Problem Oriented Policing model SARA (Eck dan Spelman: 1987), Teori Manajemen Strategik (Wheelen dan Hunger: 2012) dan Teori Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial (Klem: 2007) sebagai berikut:

- 1) Melibatkan Bhabinkamtibmas dan Fungsi Intelkam untuk mendeteksi setiap masalah sosial sebagai dasar penyusunan Renstra dan Renja Polres Metro Jakarta Selatan.
- 2) Mengevaluasi SOP Pencegahan Tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan dengan mencantumkan kegiatan setiap personel yang dilibatkan secara rinci dan jelas sertamensosialisasikan SOP tersebut kepada seluruh personel yang dilibatkan.
- 3) Membangun sinergitas polisional dengan Polres Metro Jakarta Pusat, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Pusat dengan membentuk Tim Terpadu Pencegahan Tawuran yang berfokus dalam mengatasi kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan warga yang rendah sebagai akar masalah konflik.
- 4) Menunjuk personel Satuan Binmas Polres Metro Jakarta Selatan dan Personel Polsek Tebet yang memiliki kompetensi untuk mendukung tugas tanggung jawab Bhabinkamtibmas dalam melakukan pemolisian guna mencegah konflik yang terjadi.
- 5) Menyusun perencanaan dan melaksanakan Pembinaan Keamanan Swakarsa di wilayah Manggarai guna meningkatkan potensi masyarakat dalam melakukan pemolisian di wilayah pemukimannya dengan mengaktifkan Siskamling atau ronda kampung.
- 6) Menginisiasi upaya mediasi yang melibatkan seluruh elemen warga Manggarai dan Pegangsaan terutama kelompok pemuda yang memiliki peran besar dalam setiap peristiwa konflik tawuran.
- 7) Melakukan bimbingan penyuluhan melalui Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas kepada

warga khususnya kelompok pemuda di Kelurahan Manggarai. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam membangun daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap setiap potensi konflik sosial.

- 8) Patroli dialogis dengan tehnik Door to Door System(DDS)oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas secara bergantian ke seluruh warga Manggarai.
- 9) Melakukan pergelaran pasukan pengamanan yang melibatkan personel Polres dan Polsek Tebet secara rutin terencana. Pengamanan dilakukan dengan memperhatikan waktu rawan konflik.
- 10) Meningkatkan penggalangan kepada seluruh tokoh masyarakat di Kelurahan Manggarai berdasarkan pemetaan Intelijen. Pemetaan intelijen dilakukan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Kelurahan Manggarai yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas Kamtibmas.
- 11) Memerintahkan personel Reskrim untuk aktif menggali informasi perkembangan situasi Kamtibmas melalui program Kring Serse.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap strategi pemolisian dalam pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Kelurahan Pegangsaan oleh Polres Metro Jakarta Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan merupakan konflik laten yang telah lama terjadi dan mengarah pada tindakan anarkis destruktif. Konflik yang kerap terjadi di akhir pekan ini melibatkan 2 pihak di lokasi slum area dengan kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan yang rendah. Konflik bersumber dari kekecewaan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar para pihak yang berada di wilayah hukum Polres yang berbeda (Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat).
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik tawuran dapat diidentifikasi dalam kategori faktor pemicu (trigger), faktor inti (pivotal factors / root causes), faktor penggerak (mobilizing factors) dan faktor yang memperburuk (aggravating factors). Faktor pemicu (trigger) dalam konflik ini merupakan peristiwa kecil seperti rebutan lahan parkir, saling ejek antar kelompok anak kecil, kelompok anak kecil yang mencari tambahan uang melintasi batas wilayah dan adanya petasan yang diarahkan ke pemukiman warga. Faktor inti (pivotal factors / root causes) yang menjadi akar masalah mendasar dari konflik ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar para pihak berupa kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan yang rendah karena kondisi pemukiman yang padat dan kumuh, rendahnya warga yang memiliki pekerjaan tetap dan sebagian besar warga berpendidikan rendah. Faktor penggerak (mobilizing factors) yaitu adanya suara petasan di sekitar pemukiman warga, adanya provokasi dari oknum kelompok pemuda dan konformitas warga untuk membela kelompoknya. Faktor terakhir penyebab konflik merupakan faktor yang memperburuk keadaan (aggravating factors) yang terdiri dari sikap pembiaran orang tua terhadap kegiatan anak-anaknya dan adanya oknum yang menjual serta menyuplai petasan kepada warga yang berkonflik serta pengaruh dari Miras dan Narkoba yang dikonsumsi oleh kelompok Pemuda.

- c. Strategi pemolisian yang telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan belum efektif dalam mencegah terjadinya konflik antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan karena belum dapat mengidentifikasi konflik yang terjadi sebagai suatu masalah sosial yang perlu dikelola secara serius, pemolisian yang dilakukan masih bersifat reaktif, pemolisian yang dilakukan belum dapat mengintervensi akar masalah konflik, strategi antar fungsi belum berjalan secara sinergis dan simultan serta pemolisian yang dilakukan belum dapat melibatkan secara aktif warga dan stake holder strategic dalam mengatasi akar masalah konflik tawuran.

Sedangkan saran konstruktif khususnya bagi Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Polres Metro Jakarta Selatan perlu memberi rekomendasi kepada Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk membangun fasilitas pemukiman warga Manggarai yang lebih layak dan manusiawi (melakukan relokasi), memberikan pelatihan kerja dan informasi peluang kerja kepada warga Kelurahan Manggarai.
- b. Polres Metro Jakarta Selatan perlu melibatkan Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Pusat serta Polres Metro Jakarta Pusat dalam mengadakan kegiatan positif warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan secara bersama seperti kegiatan olah raga, keagamaan, kerja bakti. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan sosial antara warga Manggarai dengan Pegangsaan yang harmonis.
- c. Polres Metro Jakarta Selatan perlu membentuk Satuan Tugas Khusus Pencegahan Konflik Tawuran yang terdiri dari personel Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Tebet, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng untuk melakukan upaya pemolisian secara bersama yang berfokus pada pencegahan konflik tawuran antar warga Kelurahan Manggarai dengan Pegangsaan yang bersifat lintas wilayah yuridiksi

Daftar Pustaka

- Creswell, John W. 2012. *Research Design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boyd, Edward dan David Skelton. 2012. *Policing 2020: what kind of police service do we want in 2020?*, London: Policy Exchange
- Fridell, Lorie dan Mary Ann Wycoff. 2004. *Community Policing the Past, Present and Future*, Washington D.C.: Police Executive Research Forum.
- Scott, Michael S. 2000. *Problem Oriented Policing: reflection on the first 20 years*, Wasington D.C.: U.S. Department of Justice, Office Community Oriented Policing Services.
- Weisburd, David. 2008. *The Effect of Problem Oriented Policing on Crime and Disorder, USA*: National Research Council.

- Braga, Anthony A. 2008. *Problem Oriented Policing and Crime Prevention*, 2nd edition, New York: Criminal Justice Press.
- Wheelen, Thomas L. dan J. David Hunger. 2012. *Strategic Management and Business Policy: toward global sustainability*, 13th ed, New Jersey: Pearson Education.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jamil, Mukhsin. M. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Eck, John dan William Spelman. 1987. "Problem Solving: problem-oriented policing". *Police Executive Research Forum*, Washington, D.C.: National Criminal Justice Reference Service.
- Tsuwa, John Tor dan Edwin Ochoga. 2016. "Conflict in Africa: A Search for Conflict Prevention Strategy". *The International Journal of Humanities and Social Studies*, Kolkata: Globeedu Group.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat*.

Strategi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Terkait dengan Radikalisme dan Terorisme

**Ilham Prisgunanto, Rahmadsyah Lubis
dan Tigor Sitorus**

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jln. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

email: lubisptik@yahoo.com; prisgunanto@gmail.com

Abstract

Terrorism and radicalism is seriously criminal which give bad impact for human civilization. More over terrorism and radicalism come and uses internet networking for their work operation especially for recruitmen new their members. Cyber terrorism and radicalism right now always operate social media to make fake information (hoax). This research would explain the impact of fake information terrorism and radicalism issues in internet networking to police officer behaviour. Teoretical studies this paper talk about management of communication and behavioural aspects. Data analysis this research quantitative and regretion linear for 742 respondens. Finding this research explain there are no impact fake information terrorism and radicalism to police officer behaviour. There are only 0,02% give impact for that factor. Beside that there are few police officer not believe the headquarter (MABES) would be handle terrorism and radicalism criminal.

Keyword : fake information, terrorism, radicalism, behaviour, social media

Abstrak

Terorisme dan radikalisme adalah kejahatan berat yang mengancam peradaban manusia. Seiring perkembangan zaman kejahatan terorisme dan radikalisme juga menggunakan jejaring internet dalam operasi kerja dan rekrutmen anggotanya. Cyber terorisme dan radikalisme menggunakan media sosial untuk melancarkan isu hoax di dalamnya. Penelitian ini ingin melihat pengaruh hoax isu terorisme dan radikalisme di jejaringan internet terhadap sikap anggota Polri di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen komunikasi dan perilaku publik. Metode penelitian kuantitatif dengan pengolahan data regresi linear sederhana dengan penyebaran kepada 742 responden. Temuan penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh hoax isu terorisme dan radikalisme terhadap sikap anggota Polri di lapangan, pengaruhnya sangat kecil hanya (0,02%). Diketahui anggota Polri masih ada yang meragukan penanganan serius pemberantasan terorisme dan radikalisme oleh Polri.

Kata Kunci : Hoax, terorisme, radikalisme, sikap, media social

Perdahuluan

Dunia telah memasuki era 4.0 ditandai dengan kehadiran jejaring internet dalam kehidupan manusia bahkan dalam genggaman manusia. Semua itu mengubah tatanan baru peradaban manusia dengan munculnya informasi sebagai komoditas modal dasar interaksi antar manusia. Dengan kehadiran internet of thing menyebabkan perputaran informasi sedemikian cepat dan menandai arus baru dalam globalisasi yang masif dan berdampak gelombang baru dalam berbagai hal termasuk kejahatan teroris dunia.

Satu yang diakui kejahatan teroris makin canggih dan modern tidak seperti dulu yang hanya mengandalkan dunia pemberitaan jejaring media mainstream. Saat ini Gerakan teroris yang memang dasar dari pergerakan adalah publikasi informasi telah merubah haluan ledakan dan serangannya bukan secara konvensional melainkan modern dengan mengandalkan media sosial. Tak heran informasi tentang teroris sedemikian menyebar yang ditandai dengan ramainya penyebaran berita hoax terkait radikalisme dan terorisme di dunia cyber digital dimaksud. Nyata saat ini bahwa kekuatan radikalisme dan terorisme bergeser dari dunia nyata ke dunia cyber digital untuk keperluan publikasi diri mereka dan merekrut anggota baru, merencanakan, membangun komunikasi bahkan meluncurkan kampanye ruang cyber digital dimaksud.

Penyebaran berita hoax terkait-terorisme dan radikalisme telah berdampak luar biasa untuk keberadaan dan pengalihan sumber daya pergerakan kelompok-kelompok teroris dan radikal di Indonesia. Mengingat kekuatan gerakan radikal yang menyebabkan teror saat ini telah tidak lagi utuh sebagai gerakan terorganisir yang masif, maka dunia cyber digital menjadi jalur alternatif yang menjanjikan guna membangun kekuatan Kembali. Dari para pelaku menyebut bahwa penyebaran berita hoax terkait jihad, penyebaran paham baru, simpatik dan pengaruh terkait terorisme dan radikalisme. Oleh karena itu Polri harus melakukan pencegahan penyebaran berita hoax dan konter terorisme di samping kegiatan kontra radikalisasi untuk mencegah masyarakat dan aparat negara yang rentan terkena terpengaruh radikal.

Sesuai pernyataan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, bahwa “Ada 31 satu kasus radikalisme dan terorisme dari Tahun 2015 sampai Juni 2017. Dari kasus itu, ada 336 orang tersangka yang ditangkap dan sebagian besar tersangka ditangkap proses pencegahan. Jadi terlihat 336 tersangka ditangkap sebelum beritanya terekspos dan meledak. Dari dua tahun ini, pola radikalisme dan terorisme mulai berubah, mereka bergerak sendirian dan teradikalisasi melalui jejaring internet. Lewat internet ini pula, pelaku bisa melakukan pelatihan cara menyerang lawan, membom dan lainnya tanpa tatap muka yang tentu saja terpantau oleh aparat keamanan.

Perubahan pola dan aksi radikalisme dan terorisme tersebut mendorong Polri mengubah pendekatan dan proses tindak pencegahannya, yakni dari pendekatan konvensional berubah menjadi pendekatan dunia cyber digital dengan cara menguatkan kerja aparat kepolisian berbasis informasi teknologi juga dan melakukan langkah Langkah-langkah untuk menekan sistem komunikasi pelaku penyebaran berita hoax terkait teroris dan melakukan counter kontra narasi yang ada.

Istilah penyebaran berita hoax terkait-terorisme pertama kali diperkenalkan oleh Barry Collin di tahun 1997. Seorang senior peneliti *the Institute for Security and Intelligence* di California.

Collins mendefinisikan penyebaran berita hoax terkait terorisme sebagai gabungan dari hal yang berhubungan antara dunia maya dengan tindakan teroris. Sementara menurut *National Police Agency of Japan* (NPA) penyebaran berita hoax terkait terorisme adalah serangan elektronik melalui jejaring komputer terhadap infrastruktur kritis yang berpotensi besar mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi bangsa.

Sementara menurut *The U.S Department of Justice* menyatakan bahwa penyebaran berita hoax terkait terorisme merupakan semua aktivitas illegal berkaitan dengan pengetahuan teknologi komputer dan ditambahkan OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) penyebaran berita hoax terkait terorisme yaitu perilaku illegal yang tidak etis atau sah berkaitan dengan pemrosesan otomatis transmisi data.

Pengertian tentang penyebaran berita hoax terkait terrorism sebenarnya terdiri dari dua aspek, yaitu; penyebaran berita hoax terkait *space* dan *terrorism*, sementara para pelakunya disebut dengan penyebaran berita hoax terkait teroris. Para *hackers* dan *crackers* juga disebut dengan penyebaran berita hoax terkait *terrorist*, karena seringkali kegiatan yang mereka lakukan di dunia cyber digital (Internet) dapat meneror serta menimbulkan kerugian yang besar terhadap korban target, mirip seperti layaknya aksi radikalisme dan terorisme. Keduanya mengeksploitasi dunia cyber digital (internet) untuk kepentingannya masing-masing.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan penyebaran berita hoax terkait terorisme termasuk mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai cara, terutama juga tindakan teror menyerang akses informasi dan data informatika (penyebaran berita hoax terkait terorisme).

Unsur tersebut mengakibatkan munculnya ketakutan korban secara massal dan memaksa kepada pihak lain agar melakukan tindakan tertentu, misalnya menyediakan dana untuk perjuangan kelompok, pembebasan tawanan, dan pembatalan kebijakan tertentu. Ada juga radikalisme dan terorisme yang bersifat nasional atau domestik dan menamakan diri *single issue terrorist* yang menunjuk pada kelompok yang menggunakan taktik ekstremis untuk mendukung isu tertentu, misalnya motif ketidaksenangan terhadap teknologi dan lain-lain.

Penanganan penanggulangan radikalisme dan terorisme meliputi dua aspek, yaitu; pencegahan (anti) dan pemberantasan (kontra). Tindakan-tindakan memerangi, membasmi, dan eliminasi radikalisme dan terorisme yang bersifat represif harus disertai langkah-langkah pencegahan yang memadai seperti pengamanan wilayah teritorial, kerja sama antarnegara, menyempurnakan sistem deteksi, memperkuat sistem prosedur pengawasan, memperkuat mekanisme pengamanan orang-orang penting dan instalasi vital, peningkatan sistem koordinasi dan pengamanan serta informasi.

Pencegahan tidak bisa dilakukan melalui pendekatan hukum saja, tetapi lebih menggunakan aspek social meliputi memahami segala aspek kehidupan masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen anak bangsa untuk mengeliminasi akar permasalahan teroris dan radikalisme. Usaha berbagai pihak untuk memahami akar permasalahan radikalisme dan terorisme menyimpulkan persoalan kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan merupakan persoalan paling mendasar yang harus diselesaikan. Bahkan, fenomena globalisasi menjadi salah satu faktor signifikan yang menjadikan radikalisme dan terorisme mendapat tempat di media massa. Tindakan mereka menyebarkan berita-berita hoax yang sifatnya merekrut, mengajak, memprovokasi, mengagitasi juga

menyebarkan hasil aksi amaliyah Jihad dalam bentuk pemboman objek vital milik pemerintah dan masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda di Indonesia ini.

Penyelesaian persoalan penyebaran berita hoax terkait radikalisme dan terorisme, tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan berbagai sudut pandang reaktif karena sesuai Teori Gunung Es (*Iceberg Theory*) terdapat beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk mencari akar penyebab sebuah permasalahan tersebut. Pada sebuah Gunung es biasanya yang tampak hanya bagian atasnya saja, sementara ke bawahnya yang tidak tampak justru semakin besar. Meski demikian permasalahan, penyelesaian Reaktif langsung kepada satu kejadian akan sangat melelahkan Roger Shuy (1988:116).

Moch Chairil Anwar (2019) menyatakan aksi-aksi radikalisme terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi keutuhan NKRI, dan survei nasional tentang daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme yang dilaksanakan oleh BNPT tahun 2017 – 2018, dengan skor 42,58 dari rentang 0 – 100 atau kategori sedang. “Data penanganan konten radikalisme dan terorisme dari Kementerian Kominfo tahun 2017 sampai dengan Maret 2019 sudah berjumlah 13.032 konten. Selanjutnya daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme yang dilaksanakan BNPT tahun 2019, pengguna media sosial dalam mencari informasi mengenai agama termasuk tinggi dengan skor 39,89, dalam internalisasi kearifan lokal termasuk pemahaman agama. “Pengguna media sosial yang tinggi merupakan tantangan karena menjadi media efektif penyebaran konten radikal. Di satu sisi menjadi peluang emas untuk intensifikasi penyebaran konten kontra-radikal. Berdasarkan fenomena dan fakta empiris yang disajikan di atas, maka cukup menarik dilakukan penelitian tentang Strategi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax terkait konten Terorisme dan radikalisme.

Dari berbagai fenomena dan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditarik permasalahan pokok dalam penelitian ini, yakni; “Bagaimana strategi pencegahan penyebaran berita hoax terkait aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia ini?” Lebih lanjut maka diturunkan ke dalam problematika, apakah ada pengaruh isi berita dan narasi hoax muatan terorisme dan radikalisme terhadap sikap masyarakat terhadap teroris? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi aksi penyebaran berita hoax terkait radikalisme dan terorisme?

Metode Penelitian

Paradigma penelitian ini adalah positivistik atau bisa juga disebut strukturalis naturalis dengan mengutamakan nilai obyektivistik dalam penelitian. Dalam hal ini penelitian model empirik dengan mengandalkan penangkapan panca indera untuk mengukur pada nilai yang dicapai dan ditanggapi oleh responden. Bila merujuk dari perspektif teori maka jelas penelitian ini bersifat positivistik dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data seperti; dokumentasi terhadap berbagai data sekunder terkait dengan penelitian dan penyebaran kuesioner, yang juga didukung dengan pengambilan data kualitatif melalui pendalaman (*indepth interview*) kepada pihak-pihak berkompeten, serta melakukan *focus group discussion* (FGD). Instrumen Penelitian yang digunakan adalah kuesioner, berisi sejumlah pertanyaan dari indikator-indikator semua variabel penelitian. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan mampu mengukur apa yang ingin diukur dengan batas minimum validitas suatu alat ukur dengan besaran $r \geq 0,361$. Dengan demikian, apabila korelasi antara butir dan faktor bernilai $< 0,361$ maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban responden, yang akan diukur dengan menggunakan *pengujian alpha Cronbach* dan nilai *r pearson correlations* yang jika besarnya adalah $> 0,60$. menunjukkan data tersebut reliabel. Penelitian ini dengan jelas menggunakan pendekatan campuran analisis data kuantitatif dan kualitatif. Untuk itu dengan cara melakukan survei pendapat umum yang dalam hal ini populasinya adalah campuran antara anggota Polri di wilayah dengan masyarakat. Anggota Polri di wilayah pada semua satuan guna memenuhi model acak yang digunakan dalam pengukuran statistika. Satuan dimaksud adalah mereka yang berhubungan langsung kepada masyarakat, seperti; Reskrim, Lalu Lintas, Narkoba, Intelkam, Sabhara dan Bina Mitra. Demikian juga dengan masyarakat yang dijaring menjadi responden adalah mereka yang pernah berhubungan dengan layanan polisi bagian tersebut sehingga akan terlihat persepsi mereka akan Hoax dan terorisme dan radikalisme.

Dari pengukuran populasi, maka jelas bahwa tiap-tiap Polda sampel yang menjadi responden yang dikumpulkan adalah 742 orang responden adalah anggota Polri di lapangan. Sampel yang diambil dianggap bisa memenuhi ukuran populasi seluruh Polda di Indonesia, alhasil ketepatan jawaban akan penelitian bisa dipertanggungjawabkan secara obyektif ilmiah. Di samping itu penelitian ini melakukan metode campuran (*mix method*) dengan model triangulasi pengumpulan informasi guna mendapat jawaban lebih komprehensif, yakni dengan beberapa narasumber. Metode analisis data penelitian ini akan melakukan pengolahan data deskriptif-analitis dengan menggunakan operasi pengolahan data distribusi frekuensi untuk tiap jawaban dan untuk mengukur tingkat berita hoax pada jajaran Polres dan Polda dengan menggunakan pengukuran statistik rata-rata (*mean*) dengan pengukuran terpusat pada pembobotan penilaian (Wimmer and Dominick, 2006).

Dengan menggunakan pola survei pendapat umum, maka akan didapat pendapat dan penilaian responden akan penanganan isu pesan informasi hoax berita terorisme dan radikalisme juga tanggapan masyarakat akan isi pesan tersebut itu sendiri. Di samping itu juga akan diketahui penilaian dan pendapat dari anggota Polri di lapangan terhadap penanganan hoax isu terorisme dan radikalisme dan juga akan sikap terorisme dan radikalisme yang ada.

Skala yang digunakan adalah likert dengan ketentuan Sangat Setuju = 5, Setuju = 4, Netral = 3, Tidak Setuju = 2 dan Sangat Tidak Setuju = 1. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini;

H_0 : Tidak ada pengaruh Pesan/Berita Media Sosial isu Hoax Terorisme, Radikalisme terhadap Ketakutan Anggota Polri di Lapangan.

H_A : Ada pengaruh Pesan/Berita Media Sosial isu Hoax Terorisme, Radikalisme terhadap Ketakutan Anggota Polri di Lapangan.

Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear dan akan diketahui model pengaruh timbal balik dengan rumus regresi kenaikan $Y = a + bx$, guna melihat indeks pengaruh media sosial isu hoax terorisme dan radikalisme. Untuk analisis deskriptif dengan menggunakan pembobotan nilai tengah dengan menggunakan mean (rata-rata) dari jawaban masing-masing variabel yang ada. Dengan demikian akan diketahui. Lokasi/Wilayah Sasaran Penelitian, berdasar pertimbangan waktu dan anggaran yang tersedia, penelitian ini dilakukan di beberapa Polda yang dianggap memenuhi keterwakilan pemanfaatan media sosial dengan hoax terorisme dan radikalisme untuk keseluruhan

satuan anggota Polri yang mewakili Indonesia. Dengan pertimbangan Polda-Polda yang pernah terjadi Tindakan terorisme dan radikalisme, wilayah-wilayah Polda yang menjadi pilihan lokasi penelitian adalah, Polda Sumatera Selatan, Polda Bali, Polda Riau, Polda Sulawesi Tengah

Temuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan analisis Per-Polda untuk melihat perkembangan terbaru tentang strategi pencegahan Hoax bermuatan terorisme dan radikalisme yang ada di tiap wilayah hukum yang anda. Temuan penelitian ini yakni: pemanfaatan media sosial anggota Polri akan hoax isu terorisme dan Radikalisme dari beberapa factor, seperti regulasi, SDM, IT, Anggaran, Sinergitas antar instansi. Guna melihat keseriusan dan validitas data maka diuji dengan pengukuran alpha cronbach maka didapat nilai sebagai berikut:

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.745	8

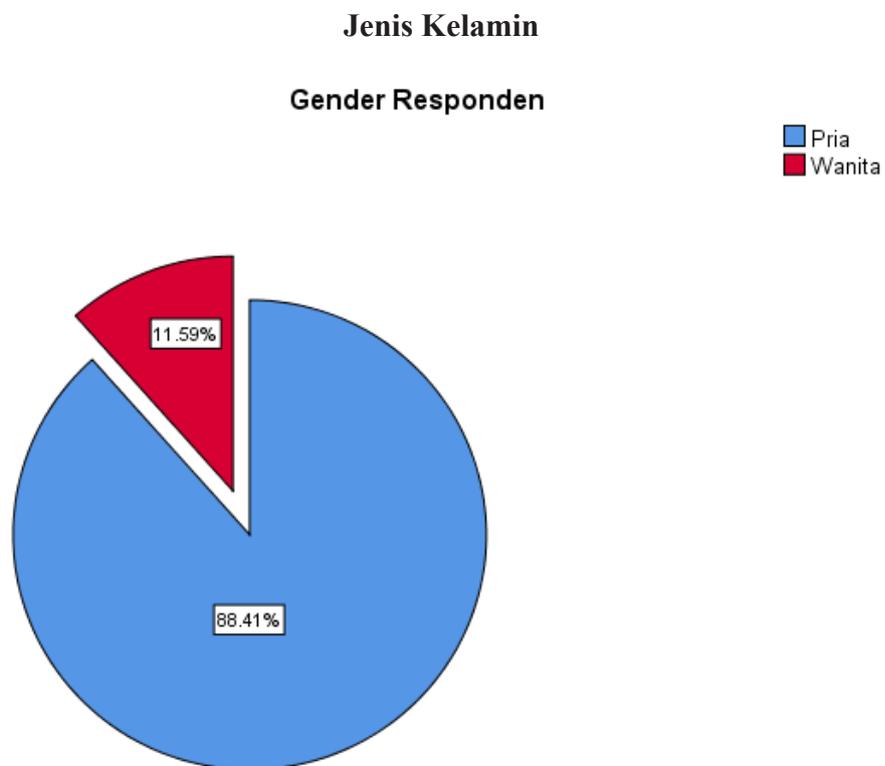
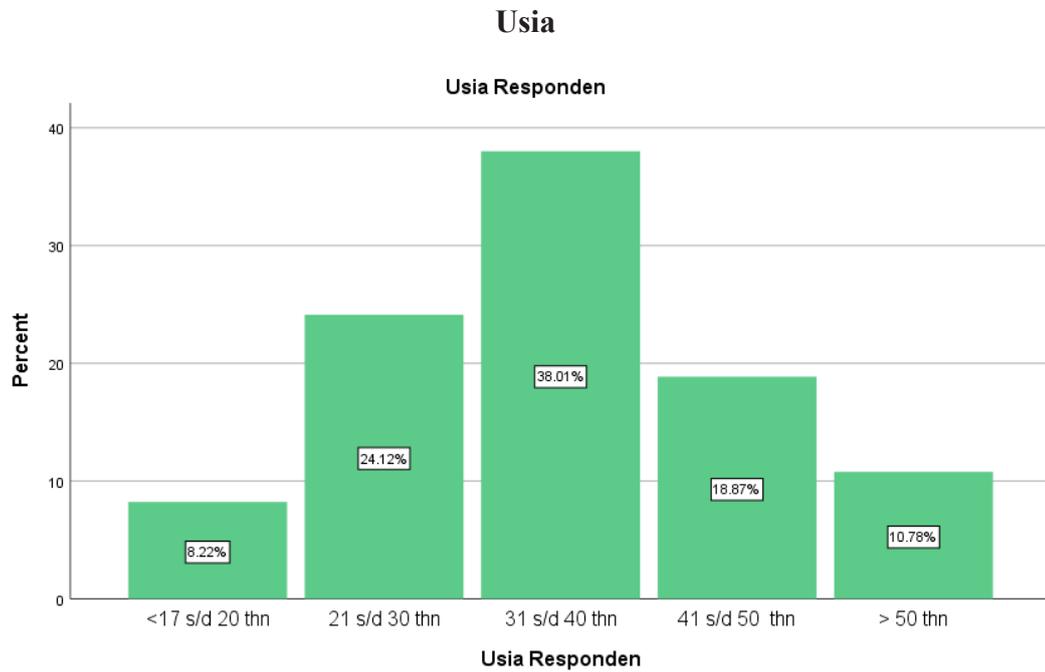
Nilai 0,745 berada di atas nilai 0.7 dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini sudah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena memiliki nilai keajegan jawaban yang sudah disyaratkan nilai pengujian statistik yang ada. Keajegan adalah kekonsistenan jawaban responden ketika menjawab kuesioner yang ada.

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
REGULASI	27.5877	15.474	.378	.742
SDM	27.4627	13.936	.595	.692
IT	27.8466	14.662	.439	.738
ANGGARAN	27.9113	14.895	.447	.732
SINERGITAS	27.4054	15.254	.415	.724
AGAMA	27.7936	13.171	.716	.668
ANTINEGARA	27.6956	13.544	.517	.702
REKRUT	27.8230	13.356	.516	.702

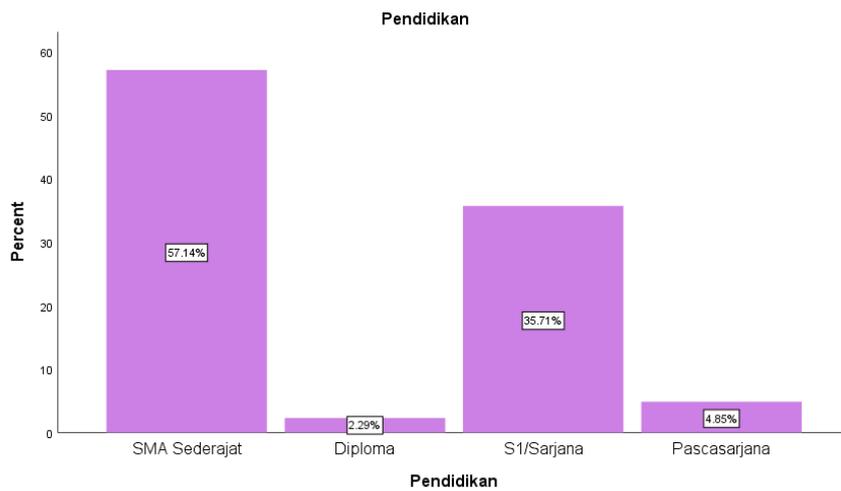
Dari tabel di atas juga terlihat bahwa ketepatan jawaban atau validitas jawaban kuesioner sudah sesuai dengan kaidah statistik karena dari tabel *r square* dengan *df* (30-2= 28, 0,05) maka didapat nilai batas $r = 0,361$, sedangkan nilai semua *r/corrected item* di atas tidak ada yang berada di bawah 0,361 dengan demikian jelas, bahwa penelitian ini sudah memenuhi angka validitas yang ada.

Penilaian Anggota Polri Terhadap Faktor-Faktor Dalam Menggunakan Media Sosial Isu Terorisme dan Radikalisme

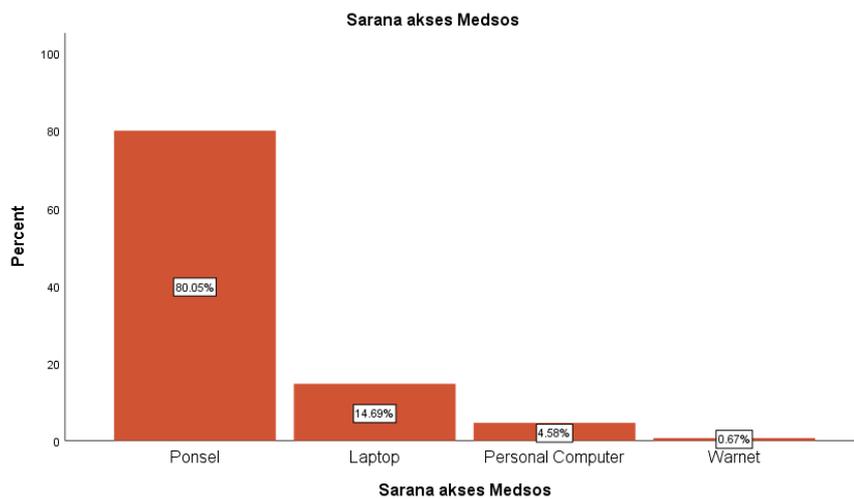
Data Personal/Diri



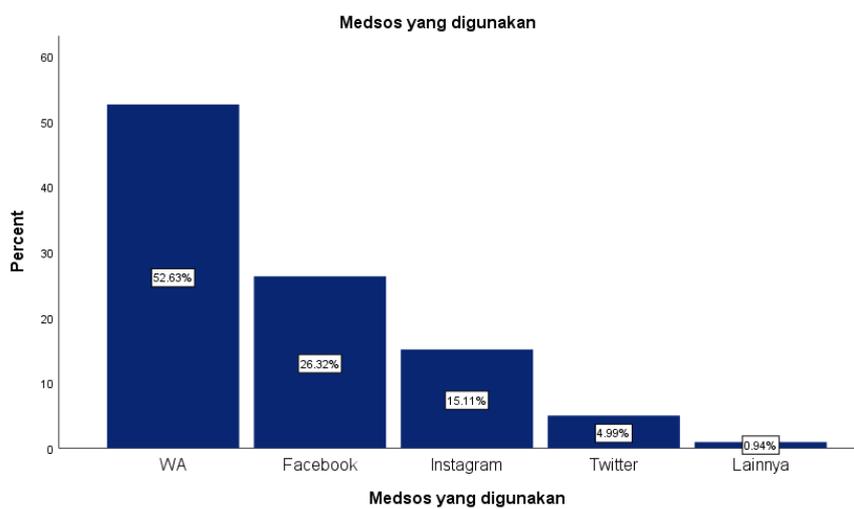
Pendidikan



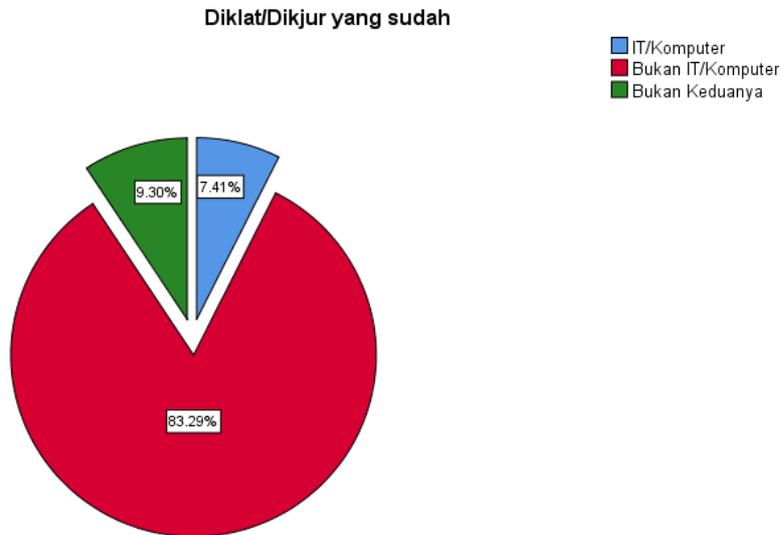
Gawai Bermedia Sosial



Media Sosial



Pendidikan Kejuruan



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden anggota Polri kebanyakan yang mengisi kuesioner ini adalah berusia antara 31 s/d 40 tahun (38,01%). Dapat dikatakan bahwa usia ini adalah anggota Polisi yang sudah memiliki pengalaman yang banyak tentang operasional polisi. Jenis kelamin responden yang menjawab survei ini adalah Pria (88,41%) dan wanita (11,59%) dapat diartikan isu teroris dan radikalisme lebih disukai pria daripada wanita.

Dari sisi tingkat pendidikan responden yang terbanyak menjawab adalah SMU sederajat (57,14%). Dilihat dari gawai mengakses internet yang paling banyak adalah menggunakan telepon cerdas/Ponsel (80,05%), keefisienan mengakses internet menjadi perhitungan mereka dalam menggunakan jejaring internet.

Media sosial yang paling banyak digunakan adalah WA (WhatsApp) (52,63%) baik dalam bekerja dan berinteraksi social satu dengan yang lain. Dengan demikian jelas mereka berusia mapan dan cukup untuk menjawab bijak tentang penelitian ini. Apalagi pendidikan responden yang terbanyak mereka yang sudah terdidik. Tapi bila melihat dari Pendidikan kejuruan kebanyakan bukan IT (83.29%). Dengan demikian pemahaman akan IT anggota Polri masih sangat minim dalam survei ini.

Penilaian Anggota Polri PerPolda Terhadap Berita Hoax Isu Terorisme dan Radikalisme di Jejaring Internet

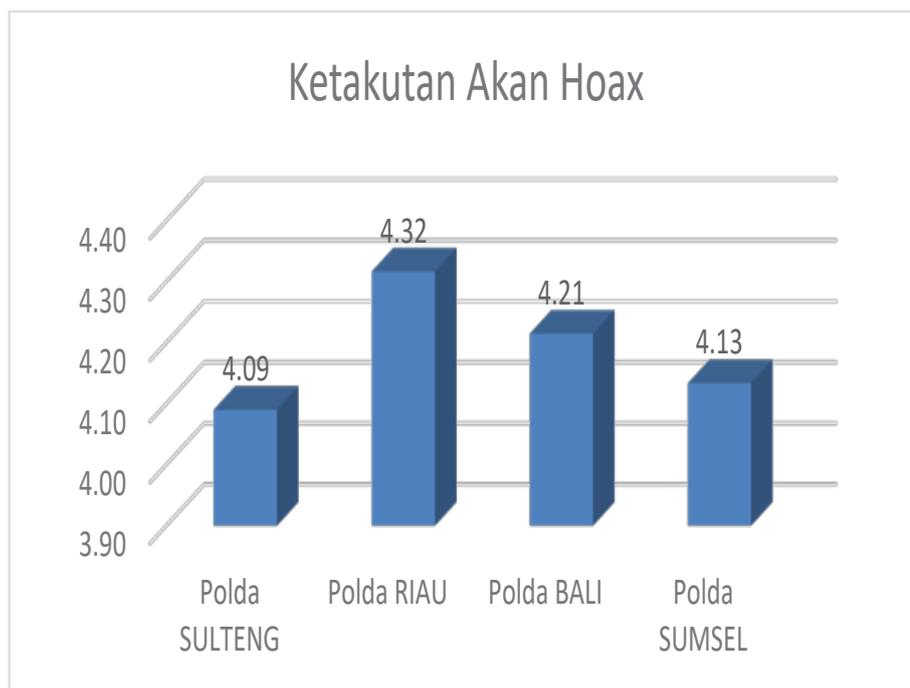
FAKTOR	Polda SULTENG	Polda RIAU	Polda BALI	Polda SUMSEL
Regulasi	4,02	4,30	4,23	4,06
SDM	4,30	4,42	4,47	4,33
IT	3,94	4,25	4,21	4,10
Anggaran	3,97	4,24	3,77	3,93
Sinergitas	4,22	4,38	4,40	4,24
Total	4,09	4,32	4,21	4,13

Dari tabel dan grafik di atas jelas bahwa anggota Polri yang ada pada daerah penelitian diketahui:

1. Anggota Polri di Polda Sulawesi Tengah paling kurang memahami Regulasi Hoax (4,02)
2. Anggota Polri di Polda Sulawesi Tengah merasa SDM belum begitu cakap dalam memahami Hoax (4,30)
3. Anggota Polri di Polda Sulawesi Tengah masih sangat kurang *high-tech* dalam IT (3,94)
4. Anggota Polri di Polda Sumatera Selatan yang merasa paling kurang dalam anggaran untuk antisipasi Hoax isu Terorisme dan Radikalisme (3.93)
5. Anggota Polri di Polda Sulawesi Tengah yang merasa sinergitasnya paling rendah dalam penanganan terorisme dan radikalisme (4,22).

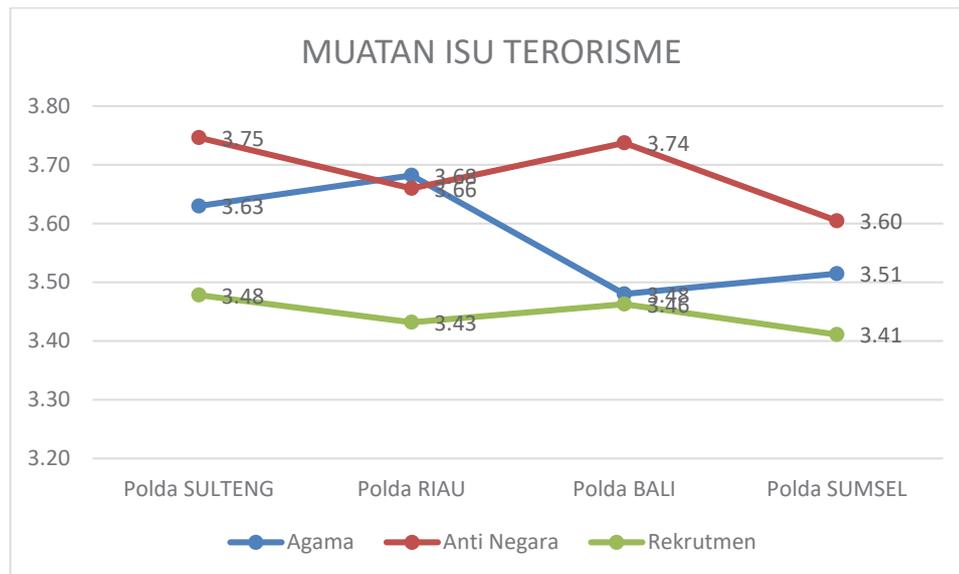
Dengan demikian jelas, bahwa ada anggota Polri yang terbanyak merasa kurang dalam penanganan kasus berita hoax isu terorisme dan radikalisme adalah di Sulawesi Tengah, baik dalam isu Regulasi, SDM, IT dan Sinergitas. Di samping itu hanya pada isu anggaran saja Polda Sumatera Selatan mengaku sangat kurang dan minim untuk membahas dan mengalokasikan.

Penilaian Anggota Polri Terhadap Penanganan Hoax



Dari grafik di atas jelas bahwa anggota Polri yang paling yakin bisa menangkal Hoax dikaitkan dengan Regulasi, SDM, IT dan Sinergitas adalah anggota di Polda Riau (4,32), sedangkan Polda yang paling tidak percaya bisa menangani dan mengatasi berita Hoax adalah polda Sulawesi Tengah (4,09). Hal inilah yang perlu dicermati dan diperkuat pada sisi anggota Polr di Polda lapangan tentang terorisme dan radikalisme.

Rating Informasi Hoax di Media Sosial Bagi Anggota Polri Di Lapangan



FAKTOR	Polda SULTENG	Polda RIAU	Polda BALI	Polda SUMSEL
Agama	3,63	3,68	3,48	3,51
Anti Negara	3,75	3,66	3,74	3,60
Rekrutmen	3,48	3,43	3,46	3,41
total	3,62	3,59	3,56	3,51

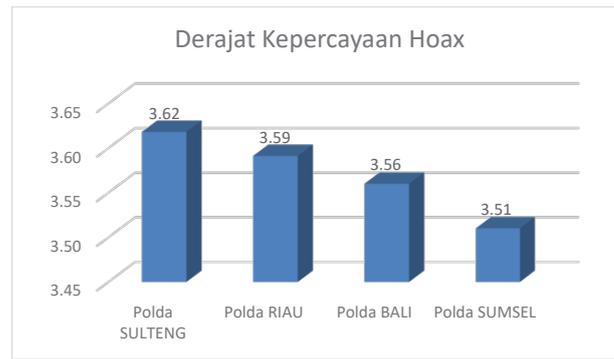
Dari tabel dan grafik di atas jelas, bahwa anggota Polri di beberapa wilayah Polda di Indonesia menanggapi media sosial dan hoax dalam kasus terorisme dan radikalisme sebagai berikut:

1. Anggota Polri di Polda Bali tidak yakin, bahwa terorisme dan radikalisme selalu membawa isu Agama (3,48).
2. Anggota Polri di Polda Sumatera Selatan tidak yakin, bahwa terorisme dan radikalisme selalu membawa isu anti Negara (3,60)
3. Anggota di Polda Sumatera Selatan tidak yakin, bahwa isu hoax akan melakukan rekrutmen untuk anggota baru terorisme dan radikalisme (3,41) tidak kepada anggota Polri dalam teroris dan radikalisme.

Dengan demikian jelas, bahwa masih ada anggota Polri yang masih kurang sensitif dan mengakui bahwa pesan informasi hoax di media sosial itu nyata ada prasangka bahwa hoax yang dilakukan oleh pelaku teroris dan radikalisme adalah palsu.

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa anggota Polri di Polda Sumatera Selatan sampai ada nilainya yang kurang dari lebih dari 3 maka tingkatan tersebut memang masih belum mengkhawatirkan karena masih dalam taraf normal dan biasa saja (3,51). Di sini dapat dikatakan bahwa meski masih tidak mengkhawatirkan namun tetap saja pemahaman dan sikap pengabaikan anggota Polri akan hoax isu terorisme dan radikalisme di masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang ada.

Tingkat Kepercayaan Anggota Akan Berita Hoax Isu Terorisme dan Radikalisme



Dari data di atas jelas di jajaran Polda Sulawesi Tengah anggota Polri menanggapi Hoax isu terorisme dan radikalisme ini paling serius dan yakin ada (3,62%). Berbeda dengan itu anggota Polri di Polda Sumatera Selatan paling tidak percaya muatan Hoax bisa menimbulkan rasa konflik agama, anti negara dan rekrutmen (3,51). Dengan demikian kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena terlihat bahwa anggota Polri di lapangan masih meremehkan hoax isi media sosial berkaitan dengan hoax dan radikalisme dan ini bisa membahayakan dalam praktik kerja di lapangan.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Isu Hoax Terorisme dan Radikalisme Pada Anggota Polri

Dari survei ini dilakukan pengujian hipotesis menyoal pengaruh berita hoax isu terorisme dan radikalisme terhadap sikap kepercayaan pada terorisme dan radikalisme di anggota Polri di beberapa Polda di Indonesia.

		SIKAPTERORISME	BERITAHOAX
Pearson Correlation	SIKAPTERORISME	1.000	-.046
	BERITAHOAX	-.046	1.000
Sig. (1-tailed)	SIKAPTERORISME	.	.108
	BERITAHOAX	.108	.
N	SIKAPTERORISME	742	742
	BERITAHOAX	742	742

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1			
1	.046 ^a	.002	.001	1.27831	.002	1.538	1	740	.215	1.228

a. Predictors: (Constant), BERITAHOAX

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.087	.310		13.170	.000						
	BERITAHOAX	-.090	.072	-.046	-1.240	.215	-.046	-.046	-.046	1.000	1.000	

a. Dependent Variable: SIKAPTERORISME

Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak ada pengaruh berita hoax di media komunikasi terhadap sikap terorisme dan radikalisme yang ada di anggota Polri terlihat nilai *P*value sebesar 0,108 (> 0,05). Terlihat pengujian korelasi dalam penerimaan H0 dan penolakan HA yang dapat diartikan tidak ada hubungan dan pengaruh antara hoax isu terorisme dan radikalisme terhadap sikap dan perilaku pada anggota Polri di lapangan.

Bila dilihat dari nilai *r square* pearson sebesar 0,002 (0,2%) saja dilihat dari pengaruh yang ada. Dari nilai ini jelas sangat kecil sekali pengaruh yang ada terhadap perubahan sikap terorisme dan radikalisme pada anggota Polri di lapangan. Bila dilihat lagi dari nilai koefisien terlihat nilai *Pvalue* sebesar (0,215 > 0,05) dapat dikatakan ini berada dalam pengujian penerimaan *H0* dan penolakan *HA* dengan demikian dapat dipertegas, bahwa isu Hoax terorisme dan radikalisme di jejaring internet tidak mempengaruhi sikap anggota Polri untuk menjadi pro terorisme dan radikalisme yang ada.

Kesimpulan

1. Tidak ada pengaruh berita hoax terhadap sikap anggota Polri akan tindakan terorisme dan radikalisme. Terlihat dari pengukuran menunjukkan tidak ada pengaruh hoax isu terorisme dan radikalisme terhadap sikap pro atau membela terorisme dan radikalisme.
2. Anggota Polri di Polda Sumatera Selatan yang menilai, bahwa Mabes Polri kurang bisa menangani Hoax isu terorisme dan radikalisme. Berbeda dengan itu anggota di Polda Sulawesi Tengah yang paling percaya bahwa Polri mampu dan bisa menangani dan mengatasi Hoax isu terorisme dan radikalisme.
3. Anggota di Polda Sulawesi Tengah adalah yang paling percaya bahaya hoax dan terorisme sangat memungkinkan terjadi melalui jejaring internet dibandingkan dengan Polda yang lain.
4. Perhatian tertinggi hoax isu terorisme dan radikalisme melalui jejaring internet ada pada anggota Polri di Polda Riau dibandingkan Polda yang lain.

Saran

Dari saran penelitian ini, akan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan Polri untuk penanggulangan terorisme dan radikalisme, dan ini dalam beberapa tingkatan, pertama jangka pendek, kedua jangka menengah dan ketiga adalah jangka Panjang.

Strategi Jangka Pendek

1. Perlu adanya kerjasama lintas sektoral terutama penentuan kebenaran simpang siur informasi yang ada dari unsur hoax isu terorisme dan radikalisme, terutama dengan KOMINFO tingkat pusat dan daerah juga instansi samping penentu kebenaran dari Hoax tersebut.
2. Perlu penanganan serius penegakan hukum yang tegas terhadap berita Hoax dengan memberikan efek jera yang mengarah pada perlindungan akan kenyamanan dan penjagaan diri dari anggota Polri di lapangan. Perlindungan kepada anggota Polri di lapangan akan terpapar pada pengaruh terorisme dan radikalisme.
3. Strategi pemantauan ketat pimpinan kepada bawahan dengan menyortir dan memilah konten informasi media sosial yang memungkinkan muncul dan akan menyebabkan prasangka menyimpang pada anggota Polri tentang isu terorisme dan radikalisme.
4. Strategi penguatan kompetensi IT dan komunikasi intelijen kepada anggota Polri sehingga bisa mencegah dan menangkal aksi hoax yang dilakukan oleh teroris dan pelaku radikal.

Strategi Jangka Menengah

1. Strategi pencegahan hoax ke jajaran anggota Polri dengan memberikan secara berkala arahan dan sosialisai kampanye sehat dalam menggunakan telepon cerdas dan pemahaman akan anti terorisme pada narasi di media social pada anggota Polri dan masyarakat sekitar.
2. Pembuatan agenda setting akan isu-isu terorisme dan radikalisme dan kemungkinan kemunculan tema-tema baru pada kasus terorisme dan radikalisme yang ada.

Strategi Jangka Panjang

1. Dari penelitian strategi pencegahan hoax dan penyebaran radikalisme dan terorisme ini disarankan agar untuk lulusan STIK PTIK dapat mengembangkan kurikulum komunikasi sosial dan manajemen media, Manajemen Keamanan Informasi, terorisme dan Radikalisme, Konflik Sosial, dan Statistik Kepolisian,
2. Strategi untuk melengkapi sarana dan prasana IT terbaru dan terkini yang *high tech* dengan upaya membendung dan mencegah penyebaran hoax isu terorisme dan radikalisme yang ada di masyarakat.
3. Strategi Penyuluhan dan sosialisasi intens dan serius secara ketat dan terjaga akan bahaya terorisme dan radikalisme karena begitu kecilnya pemahaman anggota Polres jajaran akan bahaya terorisme dan radikalisme.

Penghargaan

Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada STIK PTIK, LEMDIK POLRI, dan MABES Polri yang sudah membiayai penelitian ini sepenuhnya sehingga bisa dilaksanakan penelitian survei ini. Demikian juga dengan penyelenggaraan dan pihak-pihak yang sudah sudi membantu berjalannya penelitian ini di Polda-Polda sasaran.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Rabiah, Yunos Zahri (2012). a Dynamic cyber terrorism frame work, *International Journal of Computer Science and Information Security*; Pittsburgh, Feb 2012
- Andersen, T.J. (2008). "The Performance Relationship of Effective Risk Management, Exploring the firm specific investment rationale, *long range planning*, Vol. 41. No. 2
- Astuti, Sri Ayu (2015). *Law Enforcement of Cyber Terrorism in Indonesia* Vol. 2 (2), December 2015, (tersedia di <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee>)
- Bambang A.S, Idealisa Fitriana (2017). Cyber terrorism: Suatu tantangan komunikasi asimetris Bagi ketahanan Nasional. *Jurnal Komunisasi*, Vol 2, No.1. (tersedia di <file:///C:/Users/Asus/Downloads/12-43-1-PB%20%281%29.pdf>).
- Banez, Justin D (2010). *The Internet and The Homegrown Jihadist Terrorism: Assessing U.S. Detection*

- Techniques (*Thesis, Naval Postgraduate School, California*). Retrieved from <https://www.hsdl.org/?view&did=11245>
- Chin, S. T. S., R. N. Anantharaman, (et. al). (2011). "The Roles of Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence at the Workplace." *Journal of Human Resources Management Research* 2011: 1-9.
- Collin, B. L. Collin, "The Future of Cyberterrorism: Where the Physical and Virtual Worlds Converge," in *11th Annual International Symposium Criminal Justice Issues*, 1996, vol. 93, no. 4. d
- COSO, (2004). *Enterprise risk management– integrated framework. Committee of Sponsoring Organizations* (tersedia www.coso.org/Publications/ERM/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf).
- Covey, Stephen R. (1989). *The 7 Habits of Highly Efektif People*, (Newyork: Simon & Schuster.
- Deni, Andriana (2010). *Triangulasi dan Keabsahan Data dalam Penelitian Goyang Karawang*. (tersedia di <http://www.goyangkarawang.com/2010/02/25>). [diakses 16 Januari 2019].
- Ivanovich, Agusta (2009). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. (tersedia di <http://www.ivanagusta.files.wordpress.com/2009>). [diakses 11 Januari 2019].
- Judhita, Christiany (2018). "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation" *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44. Jakarta: Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Karim, Abdul and Firdaus Wajdi (2019). Propaganda and Da'wah in Digital Era (A Case of Hoax Cyber- Bullying Against Ulama), *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* Vol. 27 No. 1, June 2019, pp. 171-202 (tersedia di <file:///C:/Users/Asus/Downloads/1921-5412-1-PB.pdf>).
- Prisgunanto, Ilham (2010). *Komunikasi dan Polisi Edisi 3*. Jakarta: Prisani Cendekia
- Prisgunanto, Ilham (2020). *Aplikasi Teori Dalam Sistem Komunikasi di Indonesia*. Jakarta: Prenada
- Prisgunanto, Ilham (2021). *Public Speaking: Praktik dan Pengukuran*. Jakarta: Prisani Cendekia.
- Rahadi, Dedi Rianto (2017), Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.5 no.1 (tersedia di <file:///C:/Users/Asus/Downloads/1342-3734-1-PB.pdf>).
- Shorten, Allison and Joanna Smith (2017). Mixed methods research: expanding the evidence base, *Evid Based Nurse July 2017*, volume 20, number 3. (tersedia di <http://dx.doi.org/10.1136/eb-2017-102699>).



Strategi Penguatan Sinergitas Polri dengan Kementerian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di Indonesia dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri

Bima Anggalaksana

2021104006

(Email : bimaanggalaksana71@gmail.com)

Abstract

The synergy between the National Police and the ministries of institutions to tackle the factual misuse of radioactive materials is still not ideally supported to maintain stability in domestic security in terms of communication, coordination and collaboration. Efforts to increase the synergy between the Indonesian National Police and ministry institutions through the strategy of strengthening the MoU between the National Police and Bapeten and strengthening Indonesia's position within the International Atomic Agency (IAEA)..

Keywords: INP, Radioactive, contingent impact crime.

Abstrak

Sinergitas Polri dengan kementerian lembaga untuk menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif secara faktual dirasakan masih belum didukung secara ideal untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri baik dalam hal komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Upaya untuk meningkatkan sinergitas Polri dengan kementerian lembaga melalui strategi penguatan MoU antara Polri dan Bapeten dan penguatan posisi Indonesia di dalam Badan Atom Internasional (IAEA).

Kata Kunci : Polri, Radioaktif, Kejahatan berimplikasi kontijensi.

Pendahuluan

Latar Belakang

Perwujudan keamanan dalam negeri (Kamdagri) adalah amanah Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam pasal 1 ayat (5) berbunyi “Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Hal ini ditandai dengan adanya suatu kondisi yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tegak dan tertibnya hukum, dan juga terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, dijelaskan bahwa fase pembangunan jangka menengah dalam bidang keamanan memiliki fokus pada Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri. Dalam naskah disebutkan indikator dalam Pembangunan Jangka Menengah Bidang Keamanan dilihat dari: 1) Rasa aman di lingkungan masyarakat; 2) Pemenuhan akses terhadap keadilan; 3) Angka kejahatan dan pelanggaran hukum; 4) Tingkat penyebaran paham radikal

Perwujudan Keamanan Dalam negeri (Kamdagri) adalah amanah Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam pasal 1 ayat (5) berbunyi “Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Hal ini ditandai dengan adanya suatu kondisi yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tegak dan tertibnya hukum, dan juga terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam dokumen RPJMN 2020–2024, dijelaskan bahwa fase pembangunan jangka menengah dalam bidang keamanan memiliki fokus pada Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri. Dalam Naskah disebutkan Indikator dalam Pembangunan Jangka Menengah Bidang Keamanan dilihat dari: 1. Rasa aman di lingkungan masyarakat. 2. Pemenuhan akses terhadap keadilan. 3. Angka kejahatan dan pelanggaran hukum. 4. Tingkat penyebaran paham radikal. Sementara Arah Kebijakan Polri pada Renstra Polri 2020–2024 menyebutkan bahwa Visi Kepolisian Negara Republik Indonesia : “Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib”. Makna Visi Polri : Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Polri : “Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”. Makna : Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat dalam rangka Memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum. Mengacu kepada sasaran impact (SI) yaitu “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, maka sasaran strategis Polri 2020-2024 adalah : 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) layanan publik Polri yang prima; 3) penegakkan hukum secara berkeadilan; 4) profesionalisme SDM; 5) modernisasi teknologi; 6) efektifitas operasional; 7) *good governance & clean government*; 8) akuntabilitas pengelolaan anggaran; 9) regulasi dan sistem pengawasan yang efektif; Dari semua instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa upaya negara melindungi segenap bangsa indonesia, berbicara terkait keamanan dan ketertiban maka tidak lepas dari adanya gangguan keamanan yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis sebagai dampak globalisasi yang menjadi ancaman keamanan, Keamanan berasal dari kata pokok “aman” yang berarti : bebas, terlindung dari bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Sedangkan

”keamanan memiliki arti “suasana aman” ketenteraman, ketenangan (Peter Salim, 2002). Selanjutnya Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram”, dan “tertib” yang pengertiannya menurut Suradinata Ermaya (2005:65) tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran) misalnya baru merasa tentram hatinya artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik. Berdasarkan kedua pengetahuan diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap suatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan praxis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun itulah yang disebut terciptanya suasana tentram. Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain (dalam Umar, Husain. 2011:73) mendefinisikan bahwa ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban selalu harus di jaga demi kelancaran pekerjaan. Berdasarkan defenisi tersebut pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah dan orang- orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana non alam yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.

Teknologi nuklir merupakan sarana penting dalam mendukung program pembangunan nasional di Indonesia. Terutama di bidang energi, kesehatan, makanan dan pertanian, manajemen sumber daya air, perlindungan lingkungan. Pemanfaatan zat radioaktif di bidang kesehatan digunakan untuk radioterapi, kedokteran nuklir dan radiodiagnostik. Pemanfaatan zat radioaktif di bidang industri diantaranya digunakan untuk radiografi, logging dan gauging. Contoh pemanfaatan zat radioaktif di bidang penelitian digunakan untuk perunut, pertanian, peternakan dan produksi radioisotop. Sedangkan bahan nuklir digunakan dalam pengoperasian instalasi nuklir.

Semua kegiatan tersebut mempunyai potensi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Zat Radioaktif dapat disalahgunakan untuk membuat senjata radiologi. Sedangkan bahan nuklir dapat disalahgunakan untuk membuat senjata nuklir. Senjata radiologi dan senjata nuklir dapat digunakan dengan target fasilitas umum, obyek vital, penyelenggaraan kegiatan yang bersifat massal dan sebagainya. Disamping itu, pelaku kejahatan dapat melakukan sabotase terhadap fasilitas nuklir, instalasi nuklir, fasilitas radiasi, atau pengangkutan zat radioaktif dengan memanfaatkan informasi keamanan nuklir. Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau dapat menjadi akses yang sangat mudah terhadap keluar-masuknya zat radioaktif dan bahan nuklir secara ilegal untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan. Disamping itu, di Indonesia ditengarai adanya jaringan teroris yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional yang diduga terlibat pada beberapa kejadian pengeboman di wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran dimana

zat radioaktif, bahan nuklir, bahan terkait nuklir, instalasi nuklir dan fasilitas radiasi disalahgunakan atau disabotase oleh teroris. Berkenaan dengan berbagai kejahatan terhadap keamanan nuklir sebagaimana telah diuraikan di atas, negara harus melakukan berbagai upaya agar tercipta kondisi yang aman, tentram, dan damai.

Secara legal, amanat pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir ini selaras dengan tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal ini terhadap potensi bahaya radiasi dari pemanfaatan tenaga nuklir. Bahkan secara khusus, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran memberikan kewenangan atau amanat kepada BAPETEN untuk melaksanakan tiga pilar utama pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yaitu penyusunan peraturan, perizinan, dan inspeksi serta penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan pengguna tenaga nuklir terhadap peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan dan garda-aman.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu : (1) penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia dan (2) upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat baik secara materiil dan immateriil dari faktor-faktor kriminogen. Seluruh lapisan masyarakat dengan segenap potensinya harus dijadikan sebagai faktor utama yang mendukung dalam upaya penanggulangan kejahatan. Potensi-potensi yang dimiliki masyarakat perlu digali, dimanfaatkan dan dikembangkan, serta pula diefektifkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “Strategi Optimalisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Radioaktif Guna Terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional”

Kerangka Teori

Deardorff dan Williams (2006, 103) mengemukakan bahwa sinergi merupakan sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan dapat menghasilkan pengaeih gabungan yang lebih besar jika dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Sinergi memiliki makna yang dapat melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang memungkinkan energi pekerjaan akan berlipat ganda secara eksponensial.

Sinergi sering dikaitkan dengan gabungan dimana dua organisasi yang bersatu akan lebih efisien dibandingkan jika dua organisasi berjalan sendiri-sendiri. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu :

a. Komunikasi

Sofyandi dan Garniwa (2007), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- 1) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh- sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
- 2) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

b. Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (2005, h.18). Silalahi (2011, koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama” (Moekijat (1994, h.39)

Penelitian sebelumnya

Penelitian Ana Sanchez Cobaleda pada tahun 2015 dengan judul *The Chemical, Biological, Radiological And Nuclear (Cbrn) Risk Mitigation Centres Of Excellence Of The European Union: The Case Of Morocco*. Pada penelitian ini peneliti membahas pengembangan kapasitas Pusat Keunggulan Keamanan KBRN di Maroko terkait peningkatan gangguan keamanan yang terjadi, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya Pusat Keunggulan ini akan meningkatkan keamanan sebuah negara dari ancaman KBRN melalui kerjasama antar negara. Pada penelitian yang akan dilaksanakan peneliti akan membandingkan beberapa hal dengan mengacu kepada penelitian terdahulu, diantaranya adalah perlunya membangun kerjasama antar kementerian dan lembaga dalam membangun keamanan KBRN.

Penelitian Encik Mochammad Burhansyah A pada tahun 2016 dengan judul *Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)- Australian Federal Police (Afp) Sektor Capacity Building Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia Periode 2012-2014*. Pada penelitian ini Pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa tindakan yakni dengan memberikan kesempatan bagi Polri untuk menjalin kerjasama dengan AFP di sektor *capacity building* guna menekan angka *cyber crime* di Indonesia dan untuk meningkatkan kinerja aparat kepolisian. Kerjasama yang dijalin antara Polri-AFP sektor *capacity building* sejak tahun 2012-2014 di bidang *cyber crime*.

Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana strategi Polri dalam memperkuat sinergitas antar kementerian dan lembaga guna meningkatkan keamanan nuklir di Indonesia?
- b. Bagaimana hambatan dalam memperkuat sinergitas antar kementerian dan lembaga guna meningkatkan keamanan nuklir di Indonesia?

Metodologi Penelitian

Terkait dengan permasalahan penelitian yang spesifik membahas mengenai penguatan sinergitas POLRI dengan kementerian lembaga guna meningkatkan keamanan nuklir di Indonesia, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kasus. Metode ini dianggap sesuai karena objek penelitian yang ditetapkan di dalam penelitian ini adalah kebijakan yang akan senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Oleh sebab itu, maka di dalam penelitian ini, selain diperlukan analisis yang mendalam, juga perlu mempertimbangkan adanya batasan-batasan yang jelas dan tepat, seperti misalnya konteks waktu, ruang lingkup, dan lain sebagainya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Creswell, (2016, 19) bahwa studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, seringkali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake, 1995; Yin, 2009, 2012) dalam Creswell (2016).

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Kapasitas sumber daya organisasi Polri untuk mendukung penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif

Sumber daya organisasi menurut Harrington Emerson dalam Herujito (2001: 6) sumber daya organisasi itu menyangkut aspek 4M yaitu Man, Money, Material dan Method, dalam sebuah organisasi sumber daya organisasi sangat mempengaruhi pengelolaan kinerja, dimana kondisi sumberdaya organisasi Korps Brimob Polri dalam mendukung penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif sehingga stabilitas keamanan dalam negeri belum optimal, belum optimalnya sumber daya organisasi dapat kami analisis sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (*Man*)

Sumber Daya Manusia (*Man*), merujuk pada SDM organisasi, Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan, sekaligus melakukan proses untuk mencapai tujuan. Berikut ini merupakan data faktual terkait sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Kimia Biologi adalah sebagai berikut

Tabel 3.2

Jumlah Personil Satuan KBR

NO	FUNGSI	DSP	RUIL
1.	Staff Sat KBR	95	44
2.	Detasemen A	248	64
3.	Detasemen B	248	61
4.	Detasemen C	248	0
	JUMLAH	839	169

Sumber LKIP Satuan KBR Tahun 2020

Dari tabel diatas maka secara kuantitatif sumber daya manusia masih belum sesuai dengan kebutuhan dari 839 personil baru ada 169 personil sehingga mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif, selanjutnya secara kualitas dapat penulis uraikan terkait data pendidikan sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.3
Pendidikan Personil Satuan KBR

No	Satker	DSP	Riil	Strata III	Strata II	Strata I	SMA
1	Satuan KBR	839 pers	169 pers	0	6 pers	40 pers	168 pers

Sumber LKIP Satuan KBR Tahun 2020

Dari tabel diatas maka kondisi pendidikan personil satuan KBR yang memiliki latar belakang pendidikan strata I dan II dibandingkan dengan berlatar belakang SMA masih kurang dan latar pendidikan strata I dan II belum memenuhi kategori yang dapat mendukung penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif.

Tabel 3.4
Personil Satuan Kbr Yang Mengikuti Pelatihan Terkait Keamanan Radioaktif

No	Nama Pelatihan	Jumlah Pers
1	Pelatihan Radiological and Nuclear Smuggling and Detection Course	12 pers
2	Pelatihan pembinaan teknis kesiapsiagaan dan kedaruratan nuklir	20 pers
3	Pelatihan rencana taktis penanganan senjata pemusnah massal	8 pers

Dari tabel didapatkan data bahwa dari 169 personil KBR baru terdapat 40 orang yang telah mengikuti pelatihan secara spesifik terkait penanganan penyalahgunaan bahan radioaktif .

Tabel 3.5
Data Dikbangspes personil Satuan KBR

No	Jenis Dikbangspes	Personil
1	Daspa Brimob	16 pers
2	Dasba Brimob	54 pers
3	Dasta Brimob	97 pers
4	Jungle Warfare	2 pers
5	Pelopop	10 pers
6	KBR Dasar	150 pers
7	KBR Lanjutan	5 pers

Dari data tabel diatas tersebut sebanyak 150 personil (88%) telah mengikuti dikbangspes KBR dasar dan hanya sebanyak 5 personil (2,9%) yang telah mengikuti dikbangspes KBR lanjutan, sedangkan personil yang telah mengikuti pelatihan terkait keamanan radioaktif hanya sebanyak 32 personil (18%) sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kualitas dan profesionalisme dalam mendukung penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif

2. Anggaran (*Money*)

Merupakan basis perhitungan rasional, dalam hal ongkos tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang diperoleh. Secara rinci pagu TA. 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Data Anggaran Satuan KBR Tahun 2021

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PAGU T.A 2021
1	2	3
1	Sterilisasi dan Deteksi KBR	220.500.000
2	Pengawasan dan Sistem Pembinaan Tanggap Darurat KBR	27.000.000
3	Penanganan Material KBR Berbahaya	103.060.000
4	Latihan penanganan ancaman KBR dengan metode TTX	99.000.000
5	Pelatihan Harpuan Tim Entry KBR	6.500.000
6	Pelatihan Harpuan Penggunaan Almatsus KBR	6.500.000

Data : RKAKL Satuan KBR TA 2021

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran Satuan KBR sesuai dengan DIPA yang dapat digunakan untuk mendukung program penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif belum memadai mengingat pengguna bahan radioaktif yang tersebar di seluruh Indonesia, sementara anggaran yang ada hanya mengakomodir perjalanan dinas dalam kota saja. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif yang dilakukan oleh Satuan KBR Pasukan Gegana Korp Brimob Polri selain itu penyebab lain adalah

- 2.1 Anggaran pengawasan dan sistem pembinaan tanggap darurat KBR masih belum direncanakan dengan baik, baik dari segi penganggaran maupun sasaran pengawasannya;
- 2.2 Anggaran pengawasan material radioaktif belum masuk kedalam norma indeks Polri, hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam proses perencanaan anggaran;
- 2.3 Anggaran pelatihan tidak dapat mencakup kebutuhan pelatihan terkait pencegahan penyalahgunaan radioaktif, hal ini dikarenakan Satuan KBR bukan merupakan satuan latihan sehingga tidak dapat mengajukan anggaran latihan dalam jumlah yang besar.

3. Sarana dan prasarana (*Material*)

Merupakan pelengkap bagi unsur Man. Materi dan manusia tidak dapat dipisahkan; tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. sarana dan prasarana yang dimiliki belum sepenuhnya memadai dan sesuai yang diharapkan. Peralatan pendukung yang dimiliki oleh Satuan KBR dalam rangka pencegahan penyalahgunaan bahan radioaktif adalah sebagai berikut

Tabel 3.7
Data Peralatan Satuan KBR Deteksi Radioaktif

No	Nama Peralatan	Jumlah
1	Portal monitoring radioaktif	4 buah
2	Deteksi dan dosimeter radiasi perorangan	30 buah
3	Deteksi kontaminasi radiasi	6 buah
4	Tongkat deteksi radiasi	5 buah
5	Deteksi dan identifikasi radiasi	9 buah

Sumber : LKIP Satuan KBR 2021

Dari data diatas peralatan dapat dilihat masih adanya kekurangan sarana prasarana pendukung yang digunakan oleh Satuan KBR dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif, antara lain sebagai berikut :

- 3.1 Belum adanya peralatan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Satuan KBR dalam menerapkan sistem data base yang terintegrasi, antara Mabes Polri dengan seluruh kewilayahan untuk mempermudah inventarisasi dan informasi terkait penyalahgunaan bahan radioaktif di seluruh Indonesia;
- 3.2 Penyiapan sarana dan prasarana yang ada baik alsus maupun alat untuk mendukung tugas Satuan KBR tidak semuanya dalam keadaan ready to use (siap pakai) karena memerlukan kalibrasi khusus sehingga menghambat kinerja;
- 3.3 Kurang disiapkan perangkat pengolah data (komputerisasi) secara khusus diperuntukkan untuk mengolah data;
- 3.4 Belum adanya sistem yang terkoneksi dengan fungsi kepolisian lain dalam sistem jaringan intranet untuk saling berbagi data dan informasi yang diperlukan.

4. Metode (Method)

Suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi dimana antara satu sama lainnya saling terkait dan saling mempengaruhi.

Metode yang digunakan Satuan KBR dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif adalah dengan metode pengawasan dan sistem pembinaan tanggap darurat KBR dengan melaksanakan kunjungan ke perusahaan yang memiliki bahan radioaktif dalam proses produksinya. Dalam pelaksanaannya metode ini pada tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 12 giat dari target 36 giat (33,3 %) (sumber : LKIP Satuan KBR TA 2020). Data tersebut menunjukkan pelaksanaan pengawasan tersebut belum optimal.

Sinergitas Polri dengan Kementerian Lembaga untuk menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif sehingga stabilitas keamanan dalam negeri terjaga

Sinergitas antara Polri dengan kementerian lembaga dalam untuk menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif telah diwujudkan dalam kegiatan kolaborasi sebagaimana Mou Polri dan Bapeten terkait penanganan Bahan Radioaktif, namun dari pelaksanaannya masih terdapat

persoalan yang penulis tinjau dari aspek komunikasi, koordinasi dan kolaborasi menurut Thomson dan Perry dalam Keban (2007:28), "Kerjasama memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (cooperation) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu collaboration. Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana cooperation terletak pada tingkatan yang paling rendah. Sedangkan collaboration pada tingkatan yang paling tinggi". Adapun uraian belum optimalnya sinergita Polri dengan kementerian dan Lembaga sebagai berikut beberapa langkah yaitu:

1. Polri dengan Bapeten

1.1 Terkait Koordinasi

Polri dan Bapeten telah menandatangani MoU (nota kesepahaman) yang berisi tentang komitmen untuk memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi nuklir yang kini semakin dibutuhkan di Indonesia. Kerjasama yang terjalin diharapkan untuk dapat memberikan rasa aman terhadap pemanfaatan teknologi nuklir dan terhindar dari penyalahgunaan yang berujung pada perbuatan tindak pidana. Akan tetapi MoU antara Polri dan Bapeten ini belum ditindaklanjuti oleh Polri dan Satuan KBR.

1.2 Terkait Komunikasi

Satuan KBR telah melaksanakan FGD terkait bahan berbahaya KBR pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan di bidang kimia, biologi dan radioaktif seperti Bapeten, Badan tenaga atom nasional (BATAN), kementerian perindustrian, Balai Besar Veteriner (Bbalitvet), Baintelkam Polri, dan Bareskrim Polri. Hasil dari pelaksanaan FGD tersebut adalah adanya kesepahaman diantara para pemangku kepentingan akan perlunya peningkatan keamanan dibidang kimia, biologi dan radioaktif.

1.3 Terkait Kolaborasi

Satuan KBR telah melaksanakan operasi gabungan bersama dengan Bapeten guna menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif pada beberapa event besar diantaranya adalah event Asian Games 2018 yang melibatkan personil dan peralatan dari Satuan KBR, selain itu pada penegakan hukum terkait penyalahgunaan bahan KBR berbahaya Satuan KBR dan Bapeten telah bekerja sama dalam proses deteksi dan identifikasi hingga proses analisa bahan radioaktif yang ditemukan di Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang.

Berdasarkan uraian kondisi faktual diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kondisi tersebut belum sesuai seperti yang diharapkan, sehingga akan berimplikasi sebagai berikut:

Implikasi belum optimalnya penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif guna terpeliharanya keamanan dalam negeri

1.4 meningkatnya peredaran dan penyelundupan bahan radioaktif secara ilegal;

1.5 tidak terkontrolnya peredaran bahan radioaktif di Indonesia yang akan berakibat kepada terganggunya keamanan dalam negeri;

Implikasi belum optimalnya penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif pada kurang terdukungnya pembangunan nasional

- 2.1 Terkendalanya pengembangan sumber energi terbarukan yang menggunakan energi nuklir dan akan menghambat pembangunan nasional;
- 2.2 tidak dapat ditanggulangnya penyalahgunaan bahan radioaktif untuk digunakan sebagai bahan senjata pemusnah massal (WMD / weapon mass destruction) dan akan menghambat pembangunan nasional.

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sinergitas Polri dengan kementerian lembaga untuk menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif secara faktual dirasakan masih belum didukung secara ideal untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri baik dalam hal komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Upaya untuk meningkatkan sinergitas Polri dengan kementerian lembaga melalui strategi penguatan MoU antara Polri dan Bapeten dan penguatan posisi Indonesia di dalam Badan Atom Internasional (IAEA).

Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis yakni sebagai berikut untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang keamanan bahan radioaktif yang mengatur peran seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif sehingga tata kelola bahan radioaktif di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik dari hulu hingga ke hilir.

Daftar Pustaka

- Gibson, J.L., Mlvancevich, John, & Donelly, J.H. 2000. *Organizations: Behaviour, Structure, and Process*. Irwin: McGraw-Hill.
- Kuncoro, Murdijat. 2006. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Moekijat. (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju
- Paul Shemella, 2016. *Global Responses To Sibere Violence: Cooperation and Collective Action*, California: Stanford University Press.
- Pearce, John A. dan Robinson, Richard B.. 1997. *Manajemen Strategik (Formulasi, Implementasi dan Pengendalian)*, Jilid I, Terjemahan, Alih Bahasa Agus Maulana, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Robbins, Stephen P., 2003. *Perilaku Organisasi. Indeks*. Jakarta.
- Van Wart, Montgomery. 2005. *Dynamics of Leader in Public Service*. New York : M.T. Sharpe Inc.

Sinergi Polisi-Masyarakat Dalam Pencegahan Potensi Radikalisme

Sutrisno

trisosuki@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Zulkarnein Koto

zul_ptik@yahoo.co.id
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Abstract

Measuring the performance of the police in the formation of modernity is not on how many people can be arrested and then processed, but it lay on their ability to control the reality that produces security disturbances. Especially against the phenomenon of radicalism which is much different from the reality of conventional crime. The potential for radicalism -- as a deviant ideological movement in the community -- is impossible for the police to work alone. The urgency of this research is to see the synergy between the police and the community in controlling radicalism, using a survey method accompanied by focused discussions. As a result, the strength or quality of the synergy between the police and the community rests on the prerequisites for public trust in the police. So far, the community still puts their trust in the police, although aggregatively it differs in each province.

Keywords: Synergy; Radicalism; Interactional

Abstrak

Mengukur kinerja kepolisian dalam formasi modernitas bukan pada berapa jumlah orang yang bisa ditangkap dan kemudian diproses, tetapi pada seberapa kuat kemampuannya dalam mengendalikan realitas yang memproduksi gangguan keamanan. Apalagi terhadap fenomena radikalisme yang jauh berbeda dengan realitas kejahatan konvensional. Potensi radikalisme -- sebagai gerak ideologi menyimpang ditengah masyarakat -- mustahil polisi bekerja sendiri. Urgensi penelitian ini melihat sinergi polisi dengan masyarakat dalam mengendalikan radikalisme itu, menggunakan metode survey disertai dengan diskusi terfokus. Hasilnya, kekuatan atau kualitas sinergi polisi dengan masyarakat bertumpu pada prasyarat kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Sejauh ini masyarakat masih meletakkan kepercayaan terhadap polisi, meskipun secara agregatif berbeda disetiap wilayah provinsi.

Kata Kunci: Sinergi; Radikalisme; Interaksional

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Istilah ‘polisi modern’ sejak dipopulerkan Robert Peel pada 1829 yang paling utama bukan penekanan pada kemampuannya memburu kejahatan atau kecanggihan teknologi meskipun tentu saja keduanya sangat penting, tetapi menyangkut model hubungan polisi dengan masyarakatnya. Relasinya dengan masyarakat ini yang membedakan cara kerja polisi lama (kuno) dengan polisi modern dalam mengemban paran dan tugasnya. Istilah populer di Indonesia ‘polisi pelayan masyarakat’ merupakan jargon yang mempunyai benang merah mengacu pada referensi Robert Peel. Ini semacam perubahan paradigma menyangkut formulasi tugas dan peran polisi dari polisi kuno ke polisi modern. Polisi kuno bekerja sendirian. Polisi kuno hanya kompatibel dalam sistem feodal atau otoritarian.

Dalam konteks semacam itulah dapat ditarik signifikansi hadirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme 2020 – 2024 atau disebut RAN PE. Pemikiran dasar Perpres ini strategis dalam pembacaan semangat polisi *modern* yang digagas Robert Peel: ikhwal sinergitas polisi-masyarakat. Bukan semata-mata dalam kerangka pragmatik pengelolaan keamanan -- meskipun hal ini sangat mendasar-- tetapi lebih dari pada itu, pelibatan elemen-elemen di luar negara (state) dalam penanggulangan keamanan dan ketertiban merupakan keniscayaan sosiologis (*conditio sine qua non*) dalam demokrasi. Robert Peel merumuskan sinergitas polisi-masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan keamanan merupakan keniscayaan perpolisian era modern itu. Bahkan, efektifitas (kerja) kepolisian tidak dapat melulu diletakkan diukur pada jumlah penangkapan, tetapi disandarkan pada kurangnya gangguan atas rasa aman dan kejahatan. Paralel dengan sejarawan Charles Reith dalam *New Study of Police History* (1956). Menurut Reith, prinsip pendekatan pemolisian modern bukan pada mengambil berjarak dengan masyarakat tetapi kerjasama publik dengan polisi. Secara simplistik batas cara kerja kepolisian tradisional dengan kepolisian modern dengan demikian terletak pada kemampuannya dalam mensinergikan dirinya dengan masyarakat.

Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan sebagaimana disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 atau radikalisme dengan aneka konstruksi definisi yang “hidup” dalam masyarakat hampir tidak mungkin tanpa melibatkan masyarakat. Dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban relasi polisi-masyarakat membutuhkan format tertentu yang tidak bisa digeneralisir di setiap kultur dan struktur sosial. Prinsipnya, sinergi polisi-masyarakat merupakan hal vital dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Penelitian ini melihat ikhwal sinergi polisi-masyarakat dalam pencegahan potensi radikalisme.

Kerangka Konseptual

Sinergi. Konsep “sinergi” meskipun akrab di dalam wacana birokrasi dan pemerintahan tetapi pada dasarnya sangat terbatas dapat ditemui ketegasan definisinya baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun di Wikipedia. Bahkan, diksi ini tidak dijumpai dalam kamus bahasa Inggris. Secara sangat minimal Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan diksi sinergi ini, yaitu: 1. Kegiatan atau operasi gabungan; 2 sinergisme. Bersinergi/ber·si·ner·gi/ v melakukan kegiatan atau operasi gabungan.

Akan lebih relevan menelusuri konsep ini melalui dimensi sosiologik. Sinergi secara substantif merupakan konsep yang mengacu model relasi sosial. Sinergi merupakan sebuah model dari kualitas relasi sosial. Relasi sosial (dalam konteks ini diparalelkan dengan ‘interaksi sosial’) mempunyai tiga model: model kooperasi, model kompetisi; dan, model konflik. Sinergi adalah bagian dari kooperasi atau kerja sama yang mempunyai kualitas tertentu. Secara definitif, istilah ini mengacu pada penyatuan energi yang meliputi aneka sumber daya pada satu aktifitas tertentu. Jadi, sinergi tidak sekedar sebutan bentuk kerja sama (kooperatif), tetapi istilah ini mengandaikan kerjasama yang bersifat khusus, yaitu: ‘menyatukan energi dari dua atau lebih entitas’. Jika masing-masing bekerja sendiri-sendiri tidak disebut sebagai synergy.

Secara pragmatik untuk melihat indikasi sinergitas adalah pada sisi (agenda) program, misalnya, sejauhmana agenda-agenda masyarakat itu masuk pada program birokratik. Namun demikian, konsep ini secara metodik juga bisa ditangkap melalui survei, utamanya ditanyakan kepada responden, misalnya, ikhwal yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dalam mengendalikan radikalisme dan potensinya. Kepercayaan ini selanjutnya paralel pula dengan, misalnya pertanyaan tentang kemauannya bekerja sama.

Radikalisme. Konsep radikalisme ini mempunyai sejumlah similaritas. Misalnya dengan konsep ekstrimisme, fanatisme, dan fundamentalisme. Regulasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tidak ditemukan diksi radikalisme, tetapi menggunakan istilah ekstrimisme. Regulasi ini pada prinsipnya adalah pencegahan kekerasan berbasis agama. Merujuk pada penelusuran sejarah munculnya konsep radikalisme, yaitu mengacu pada pengertian sebuah gerakan isme atau pemikiran yang bersifat “mendasar”. Dipopulerkan oleh Charles James Fox. Fox menggunakannya untuk mengidentifikasi pergerakan yang mendukung reformasi parlemen di Inggris pada tahun 1797. Yaitu perombakan secara mendasar sistem pemilihan dengan cara mendeklarasikan ‘reformasi radikal’. “Mendasar” (menggunakan apostrop) karena pada dasarnya dalam perspektif sosiologis pengertian ini bersifat sublime, kalau tidak bisa dikatakan bersifat relatif. Karena apa yang dimaksud “mendasar” oleh entitas sosial tertentu tidak sertamerta disepakati oleh entitas sosial lain sebagai hal yang mendasar.

Jadi, “mendasar” adalah sebuah kleim definisi atas realitas: sebuah persepsi entitas sosial tertentu atas realitas sosial. Tentu, definisi ini dengan demikian selalu bergerak, tidak tetap. Di dalam masyarakat terdapat pertarungan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “mendasar” ini. Intrumen untuk menancapkan tentang apa yang dipandang “mendasar” sangat dipengaruhi model sistem sosio-politik. Dalam sistem otoritarian instrumen menancapkan definisi yang “mendasar” dilakukan melalui ketegasan jalannya kekuasaan. Dalam konstelasi demokrasi, instrument untuk menancapkan definisi ini di kalangan masyarakat, meminjam Anthonio Gramsci diperoleh melalui hegemoni. Dalam kerangka semacam inilah istilah “radikalisme” diserahkan kepada definisi masyarakat (kontekstual).

Sartono Kartodirdjo (1985). Radikalisme, menurutnya, adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.

Penelitian Sebelumnya. Relatif banyak literatur penelitian tentang radikalisme. Misalnya, Ahyar (2015) tentang pembacaan sosiologis atas gerakan radikalisme di Indonesia. Bahwa radikalisme

bukan melulu persoalan meng-ideologikan agama, tetapi kehadirannya menyangkut fenomena sosial masyarakat yang kompleks yang meliputi kesenjangan, kekerasan budaya, pendidikan, pergulatan identitas. Karenanya ia tidak akan menyelesaikan persoalan sekedar pada penegakan hukum dan merevisi penafsiran ayat-ayat kekerasan. van Bruinessen (2002) melihat asal-usul lahirnya islam radikal di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru. Faktor yang merangsang lahirnya islam radikal di Indonesia adalah konflik-konflik berbasis agama di sejumlah wilayah di Indonesia setelah kejatuhan Suharto. Hasil penelitian Bruinessen ketika penelitian penjangkaran data di lapangan masih merasakan psikologi pasca konflik itu.

Namun, penelitian yang mempunyai semilaritas dengan penelitian ini, berkenaan dengan sinergi dalam pengendalian potensi radikal, apalagi menyangkut kepolisian belum ditemukan. Kecuali, penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 yang dilakukan oleh PTIK, Relasi Polisi – Masyarakat Dalam Mengendalikan Keamanan: Studi Tentang Perkembangan Radikal. Dalam penelitian tahun 2020 yang dilakukan oleh PTIK itu ditemukan bahwa, radikal bersifat gradatif. Aspek interaksional yang membangun potensialitas konflik merupakan unsur penting sebagai indikasi kategorik radikal. Gradasi ini, misalnya, sejak dari “liyan”; menyerang pemerintah (atas nama amar ma’ruf) dalam ceramah; membid’ahkan’ takfiri; hingga latihan militer. (Kesadaran) masyarakat mengendalikan fenomena radikalisme dengan cara mempercayakan kepada kepolisian masih cukup bagus, bahwa terhadap gejala radikalisme yang mereka temui mereka melaporkannya kepada kepolisian, diatas separuh responden, 57,7 persen. Dan, strategi kepolisian membangun relasi dengan masyarakat tidak mempunyai pola seragam, sangat bersifat “actor” ketimbang system.

Permasalahan dan Gap Analysis. Sinergitas polisi dengan masyarakat yang menjadi ikon pemolisian modern secara sosiologis bukanlah fenomena interaksional yang linier sederhana. Sinergi sebagai sebuah konsep, mengacu pada pada kandungan kualitas interaksional. Dengan demikian, sinergi polisi dengan masyarakat dalam penanggulangan potensi radikalisme merupakan realitas interaksi sosial yang kompleks. Bahkan, mempunyai logika sirkuler. Yaitu, Sinergi yang baik membutuhkan prasyarat kepercayaan masyarakat, sementara kepercayaan masyarakat terhadap polisi membutuhkan prasyarat profesionalitas polisi itu sendiri. Dan, profesionalisme polisi bukan hadir dalam ruang sosial yang kosong. Peneliti sadar bahwa logika sirkuler adalah dimensi tak terjamah dalam penelitian ini, sehingga menelusuri hanya pada sinergitas yang diturunkan pada sejumlah ukuran variable tentu sebuah kelemahan tersendiri dalam penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Realitas sosial yang bersifat ‘pandangan’ atau ‘persepsi’ survey atau questioner; Sementara realitas sosial yang memerlukan kedalaman kualitas argumentatif ditangkap melalui wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Meskipun demikian, survey dalam keterbatasan tertentu masih bisa untuk memotret gambar besar tentang aspek sinergitas ini, minimal pada permukaan.

Secara simulatif, dapat digambarkan dalam tabel berikut,

WILAYAH	KEGIATAN MENJARING DATA	
	FOCUS GROUP DISCUSSION/ WAWANCARA	QUESTIONER
POLDA	1) Dit. Intelkam; 2) Dit. Bimas; 3) Tokoh agama atau Majelis Ulama Indonesia	-
POLRES	1) Kasat Bimas; 2) Kasat Intel; 3) Kasat Serse; 4). Tokoh Masyarakat (dua orang)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Setiap Satuan Fungsi di Polres (masing-masing minimal 5 anggota). ➤ Anggota masyarakat minimal 30 setiap Polres.

Metode FGD atau diskusi terbatas di kalangan peserta yang dipilih secara purposiv untuk mendapatkan data yang secara sekaligus (bisa) saling silang berkontestasi pendapat. Data ini secara sekaligus memperkuat proposisi temuan, atau semacam triangulasi. Peserta diskusi terbatas ini di level Polda adalah Dit. Intelijen Keamanan dan Dit. Binmas, dan mengedarkan kuesioner terhadap masyarakat. Pada level Polres adalah Kasat Intel; Kasat Reskrim, Kasat Binmas; dan, dua sampai empat orang tokoh masyarakat/agama.

Wilayah Penelitian. Penelitian ini tidak mempunyai tendensi representasi generalisasi wilayah Indonesia, karena sejumlah wilayah penelitian ini disadari secara metodologik tidak kuat secara representatif. Pertama, Wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung, penelitian dilakukan pada: a) Mapolda Kep. Bangka Belitung; b) Polres Pangkalpinang; c) Polres Bangka; d) Polres Bangka Barat; e) Polres Bangka Tengah, dan f) Polres Bangka Selatan. Kedua, wilayah Sulawesi Tenggara, meliputi: a) Mapolda Sulawesi Tenggara; b) Polres Konawe Utara; c) Polres Konawe Selatan; d) Polres Bombana; e) Polres Kolaka; f) Polres Konawe; g) Polres Kendari. Ketiga, wilayah Kalimantan Barat, adalah: a) Mapolda Kalimantan Barat; b) Polres Sanggau; c) Polres Sekadau; d) Polres Sintang; e) Polres Melawi; f) Polres Landak; g) Polres Singkawang; h) Polres Sambas; i) Polres Bengkayang; j) Polres Mempawah; k) Polres Kubu Raya; l) Polresta Pontianak.

Analisis data. Penggunaan alat penelitian yang berupa wawancara dan FGD, penelusuran dokumen, dan survey secara simultan menghasilkan jenis data yang berupa data verbal (kualitatif) dan angka (kuantitatif). Masing-masing jenis data ini diolah sebagai berikut :

Peneliti melakukan transkripsi terbatas terhadap hasil wawancara, data etnographi/observasi dan hasil penelusuran dokumen. Proses selama pengumpulan data atau informasi merupakan bagian tidak terpisah dari upaya analisisnya. Data tersebut akan masuk dalam satu dokumen untuk memudahkan analisis menurut item-item materi yang dibutuhkan dalam proses kategorisasi yang disebut coding. Langkahnya: reduksi data (data reduction), penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Alat analisis yang dipergunakan untuk memahami makna sikap/tindakan sosial itu yaitu *verstehen* (interpretative understanding) dan “perbandingan terkendali”. Bahasan masalah dikemukakan dalam suatu penjelasan struktural (structural explanation). Model pembahasan ini bagian dari causal explanation (Daniel Little: 1991). Data yang diperoleh melalui survey diolah menggunakan SPSS. Menggunakan cross-tab, untuk menemukan hubungan antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Pembahasan

Aspek interaksional polisi dengan masyarakat mempunyai pengaruh aspek sinergi. Oleh karena itu, sinergitas diletakan saebagai dimensi kualitas dalam interaksi sosial. Aspek ini membutuhkan sejumlah dimensi persyaratan yang diantaranya meliputi: 1) kepercayaan publik terhadap polisi; 2) kemauan melakukan diskusi antara warga dengan polisi; 3) kemauan melaporkan gejala (potensi) radikal kepada polisi; 4) keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan. Poin ini mengenai seberapa kuat warga masyarakat melibatkan polisi atas gejala (potensi) radikal; 5) Respon masyarakat terhadap ajakan polisi.

Kepercayaan publik terhadap otoritas negara seperti kepolisian merupakan dasar bagi kepolisian dalam melakukan tugas-tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban. Proposisi ini selain menjadi jargon kepolisian modern sebagaimana diintroduksi Sir Robert Peels berlaku umum, termasuk dalam pengendalian potensi rasdikalisme. Bagi Peels, membangun kepercayaan publik merupakan bagian dari kerja-kerja kepolisian yang panjang. Kepercayaan publik terhadap kepolisian ini dapat diartikulasikan dalam sejumlah indikator, yaitu:

Kepercayaan Masyarakat

Di bawai ini konsep kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dirujuk pada dua dimensi. Pertama, berkenaan dengan penilaian masyarakat terhdap kemampuan kepolisian dalam mengendalikan radikalisme; dan kedua, pengendalian radikalisme yang dilakukan oleh kepolisian di lingkungan terdekat, pada sisi eksistensi/keberadaan aksi pengendalian itu. Perbedaan dua dua dimensi ini adalah, dimensi yang pertama menyangkut realitas opini yang bersifat umum atu pendapat yang bisa saja mereka menjawab tidak dengan cara melihat atau merasakan secara empirik, sementara yang kedua menyangkut eksistensi empirik. Artinya, untuk dimensi kedua ini mereka melihat, menyaksikan dan merasakan

Pertama, kepercayaan terhadap gejala umum. Terhadap responden masyarakat diberikan pernyataan dan pilihannya, sebagai berikut. Terhadap gejala perkembangan radikalisme: a) Saya yakin polisi akan bisa mengendalikan; b) Saya tidak yakin polisi bisa mengendalikan; c).....

Diperoleh jawaban sebagai berikut,

Provinsi * Kepercayaan terhadap Polisi atas Pengendalian Radikalisme Crosstabulation

			Kepercayaan terhadap Polisi atas Pengendalian Radikalisme				Total
			Yakin / Percaya	Tidak Yakin / Tidak Percaya	Lain-Lain	4	
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Count	0	129	30	20	1	180
	% within Provinsi	0.0%	71.7%	16.7%	11.1%	0.6%	100.0%
	% of Total	0.0%	18.7%	4.3%	2.9%	0.1%	26.1%
Sulawesi Tenggara	Count	6	137	30	7	0	180
	% within Provinsi	3.3%	76.1%	16.7%	3.9%	0.0%	100.0%
	% of Total	0.9%	19.9%	4.3%	1.0%	0.0%	26.1%
Kalimantan Barat	Count	3	246	47	32	2	330
	% within Provinsi	0.9%	74.5%	14.2%	9.7%	0.6%	100.0%
	% of Total	0.4%	35.7%	6.8%	4.6%	0.3%	47.8%
Total	Count	9	512	107	59	3	690
	% within Provinsi	1.3%	74.2%	15.5%	8.6%	0.4%	100.0%
	% of Total	1.3%	74.2%	15.5%	8.6%	0.4%	100.0%

Secara total secara keseluruhan di wilayah Polda yang menjadi penelitian ini masyarakat masih mempercayai polisi dalam mengendalikan (potensi) radikal. Jauh melampaui separuhnya, sebesar 74,2 persen menjawab bahwa mereka percaya terhadap kepolisian atas pengendalian radikalisme; hanya 15,5 persen responden masyarakat yang menjawab tidak percaya. Jika diperhatikan detail menurut wilayah Polda maka kepolisian Sulawesi Tenggara yang mendapat skor paling tinggi diantara dua Polda lain.

Diskusi Dengan Warga (responden Polisi). Istilah “diskusi” dalam perspektif sosiologi adalah melebihi interaksi spontan, oleh karena itu perlu dipahami dalam pengertian dimensional. Sehingga pengertiannya bukan sekedar diskusi tetapi didalamnya mengandung semacam koordinasi dan antisipasi. Pertanyaan yang diajukan adalah: “Sebagai aparat keamanan, apakah Anda pernah mendiskusikan fenomena radikal dengan otoritas masyarakat (RT/RW/Tokoh Masyarakat):

Polda * Diskusi tentang Radikalisme dengan otoritas Masyarakat Crosstabulation

			Diskusi tentang Radikalisme dengan otoritas Masyarakat				Total
			Tidak Pernah	Pernah	Sering	Lain-Lain	
Polda	Kep Babel	Count	56	110	13	1	180
		% within Polda	31.1%	61.1%	7.2%	0.6%	100.0%
		% of Total	7.0%	13.8%	1.6%	0.1%	22.6%
	Sulawesi Tenggara	Count	46	111	19	1	177
		% within Polda	26.0%	62.7%	10.7%	0.6%	100.0%
		% of Total	5.8%	13.9%	2.4%	0.1%	22.2%
	Kalimantan Barat	Count	141	270	23	6	440
		% within Polda	32.0%	61.4%	5.2%	1.4%	100.0%
		% of Total	17.7%	33.9%	2.9%	0.8%	55.2%
Total		Count	243	491	55	8	797
		% within Polda	30.5%	61.6%	6.9%	1.0%	100.0%
		% of Total	30.5%	61.6%	6.9%	1.0%	100.0%

Dari tiga wilayah hukum Polda, Sulawesi Tenggara merupakan Polda yang paling kuat melakukan diskusi polisi dengan masyarakat terhadap fenomena radikalisme, yaitu sebesar 10,7 persen responden kalangan internal kepolisian menjawab bahwa mereka sering diskusi tentang radikalisme dengan otoritas masyarakat. Sementara Bangka Belitung dan Kalimantan Barat masing-masing 7,2 persen dan 5,2 persen yang menjawab sering diskusi tentang radikalisme dengan otoritas masyarakat.

Dengan demikian berarti Sulawesi Tenggara dibandingkan dua Polda lain --Bangka Belitung dan Kalimantan Barat-- dibandingkan dua Polda lain membangun kewaspadaan dan diteksi dini terhadap gejala radikalisme.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.444 ^a	6	.207
Likelihood Ratio	8.191	6	.224
N of Valid Cases	797		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.78.

Asymp. Sig adalah 0,207, atau probabilitas di atas 0,05, maka H_0 diterima. Artinya, tidak ada hubungan antara kuatnya mendiskusikan fenomena radikal dengan otoritas masyarakat dengan wilayah provinsi.

Pelibatan Dalam Pengendalian Radikalisme

Bukan hanya dalam entitas sosial tertentu dimana informasi yang bersifat “internal” hanya layak dikonsumsi dan diketahui anggotanya secara terbatas, masyarakatpun mempunyai hal yang sama. Paling tidak informasi tertentu yang bersifat khusus hanya layak diketahui kalangan khusus pula. Meminjam tata pikir Ulrich Beck mengandung informasi ‘rahasia’ karenanya selalu mengandung resiko. Risiko mengacu pada pengertian implikasi tersembunyi dibalik informasi. Rahasia dalam konteks ini adalah bahwa tak semua komunitas luar dirinya dipandang layak mendapatkan informasi yang sepadan dengan anggota internal. Dengan demikian kemauan berbagi dengan entitas sosial di luar dirinya membutuhkan prasyarat, misalnya kedekatan, kepercayaan.

Inisiatif masyarakat untuk melibatkan polisi dalam urusan-urusan entitas internal masyarakat, apalagi semacam radikal dan gejalanya merupakan poin mendasar sebagai sebuah sinergi antara polisi-masyarakat dalam mengendalikan keamanan pada umumnya. Tentu, dalam kerangka model pemolisian modern sebagaimana dikemukakan Robert Peels inisiatif masyarakat berbagi dengan polisi bagian dari “prestasi” tersendiri bagi kerja-kerja kepolisian.

Untuk menelusuri hal ini pertanyaan yang diajukan kepada responden kepada anggota kepolisian, “Di lingkungan tempat tinggal Anda, apakah masyarakat melibatkan Anda terhadap gejala radikalisme ?

Pelibatan Dalam gejala Radikalisme

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	428	53.5	53.6	53.6
	Pernah	267	33.4	33.5	87.1
	Sering	42	5.3	5.3	92.4
	Selalu	46	5.8	5.8	98.1
	Lain-Lain	15	1.9	1.9	100.0
	Total	798	99.8	100.0	
Missing	System	2	.3		
Total		800	100.0		

Polda * Pelibatan Dalam gejala Radikalisme Crosstabulation

			Pelibatan Dalam gejala Radikalisme					Total
			Tidak Pernah	Pernah	Sering	Selalu	Lain-Lain	
Polda	Polda Kep Babel	Count	97	54	17	8	4	180
		% within Polda	53.9%	30.0%	9.4%	4.4%	2.2%	100.0%
		% of Total	12.2%	6.8%	2.1%	1.0%	0.5%	22.6%
Polda Sulawesi Tenggara	Polda Sulawesi Tenggara	Count	102	54	11	9	2	178
		% within Polda	57.3%	30.3%	6.2%	5.1%	1.1%	100.0%
		% of Total	12.8%	6.8%	1.4%	1.1%	0.3%	22.3%
Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Count	229	159	14	29	9	440
		% within Polda	52.0%	36.1%	3.2%	6.6%	2.0%	100.0%
		% of Total	28.7%	19.9%	1.8%	3.6%	1.1%	55.1%
Total	Total	Count	428	267	42	46	15	798
		% within Polda	53.6%	33.5%	5.3%	5.8%	1.9%	100.0%
		% of Total	53.6%	33.5%	5.3%	5.8%	1.9%	100.0%

Terhadap gejala radikalisme lebih dari separuh responden, yaitu 53,6 persen, menurut kalangan kepolisian, masyarakat tidak pernah melibatkan polisi. Hanya 33,5 persen menjawab “pernah”, dan 5,3 persen sering. Jika diperhatikan detail angka perbandingan pada sitemiap wilayah Polda, terdapat kecenderungan atau tendensi jawaban yang sama.

Reaksi Masyarakat ketika mendapatkan gejala radikal

Bagian ini adalah untuk mendeteksi konsistensi pertanyaan di atas tentang pelibatan polisi ketika mereka mendapati gejala radikal. Meskipun lebih dari separuh responden polisi merasa bahwa masyarakat tidak melibatkan mereka (polisi) terhadap gejala radikal, namun tetap saja sebetulnya masyarakat secara imperatif tidak bisa mengabaikan fungsi kepolisian di dalamannya. Pertanyaan yang diajukan kepada responden polisi ini adalah, Ketika masyarakat di lingkungan Anda mendapati gejala semacam kemungkinan gejala radikal, apa reaksi yang mereka berikan terhadap Anda:

Polda * Reaksi Masyarakat Ketika Mendapati Gejala Radikal Crosstabulation

			Reaksi Masyarakat Ketika Mendapati Gejala Radikal				Total
			Mengajak Anda Diskusi	Tidak Mengajak Anda	Pasiv	Lain-Lain	
Polda	Polda Kep Babel	Count	97	9	57	17	180
		% within Polda	53.9%	5.0%	31.7%	9.4%	100.0%
		% of Total	12.2%	1.1%	7.2%	2.1%	22.7%
Polda Sulawesi Tenggara	Polda Sulawesi Tenggara	Count	106	4	31	33	174
		% within Polda	60.9%	2.3%	17.8%	19.0%	100.0%
		% of Total	13.4%	0.5%	3.9%	4.2%	21.9%
Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Count	296	6	63	74	439
		% within Polda	67.4%	1.4%	14.4%	16.9%	100.0%
		% of Total	37.3%	0.8%	7.9%	9.3%	55.4%
Total	Total	Count	499	19	151	124	793
		% within Polda	62.9%	2.4%	19.0%	15.6%	100.0%
		% of Total	62.9%	2.4%	19.0%	15.6%	100.0%

Lebih dari separuhnya, hingga 62,9 persen responden memandang bahwa ketika (anggota masyarakat) mendapati gejala semacam kemungkinan gejala radikal, reaksi terhadap kepolisian adalah mengajak diskusi. Tentu saja, pertanyaan semacam ini merupakan pertanyaan ‘impersonal’. Masyarakat memahami sepenuhnya tentang tugas kepolisian kaitannya dengan fenomena yang dipandang mengganggu keamanan dan ketertiban. Artinya, meskipun lebih dari separuh melakukan tindakan mengajak diskusi polisi tetapi dalam kondisi normal masyarakat sebetulnya enggan mendiskusikan dalam pengertian secara terencana sistematis mendiskusikannya.

Terdapat dua dimensi yang berbeda dalam dua pertanyaan ini. Secara simplistik dapat dikatakan bahwa dalam keadaan normal dan dalam keadaan agak darurat atau spontan. Dalam keadaan normal dimaksudkan sebuah kondisi dimana ancaman belum hadir, sementara dalam keadaan agak darurat (dengan segala gradasinya) mengacu pada kondisi pertarungan terhadap ancaman atau gangguan ketertiban. Oleh karena itu angka-angka statistik itu tidak saling kontradiktif. Fungsi kepolisian sebagai instrument negara dipahami sebagai pemelihara keamanan bersifat imperatif; tetapi, sekali lagi, masyarakat nampaknya enggan dalam keadaan normal.

Respon Masyarakat Terhadap Ajakan Polisi

Deskripsi di atas tentang keengganan masyarakat melibatkan kepolisian dalam wacana radikal, tentu saja, fenomena ini harus ditempatkan bahwa masyarakat dalam suasana normal. Pengertian yang mendasar terhadap fenomena umum bahwa masyarakat enggan “berurusan” dengan aparat hukum. Tetapi sebetulnya masyarakat menyambut antusias terhadap inisiatif polisi dalam berwacana ikhwal gejala radikalisme. Tabel di bawah ini menjelaskan antusias masyarakat terhadap inisiatif kepolisian. Pertanyaan yang diajukan adalah, Otoritas masyarakat di lingkungan tempat saya tinggal, bila hendak diajak diskusi dan mengendalikan indikasi radikal ini di lingkungan terdekat saya, reaksinya

Polda * Reaksi Masyarakat Ketika Diajak Diskusi Crosstabulation

			Reaksi Masyarakat Ketika Diajak Diskusi			Total
			Pasif Saja	Antusias Menyambut Ajakan Saya	Lain-Lain	
Polda	Kep Babel	Count	100	60	20	180
		% within Polda	55.6%	33.3%	11.1%	100.0%
		% of Total	13.3%	8.0%	2.7%	24.0%
	Sulawesi Tenggara	Count	33	118	22	173
		% within Polda	19.1%	68.2%	12.7%	100.0%
		% of Total	4.4%	15.7%	2.9%	23.1%
	Kalimantan Barat	Count	63	260	74	397
		% within Polda	15.9%	65.5%	18.6%	100.0%
		% of Total	8.4%	34.7%	9.9%	52.9%
Total	Count	196	438	116	750	
	% within Polda	26.1%	58.4%	15.5%	100.0%	
	% of Total	26.1%	58.4%	15.5%	100.0%	

Sebesar 58,4 persen responden polisi mengaku bahwa tokoh atau otoritas masyarakat memberikan respon antusias ketika diajak berdiskusi perihal radikalisme. Hanya sebesar 26,1 persen yang menjawab bahwa masyarakat menyambut secara pasif saja.

D. Simpulan

Faktor kepercayaan masyarakat terhadap polisi merupakan aspek penting sebelum aksi-aksi untuk mengukur sinergitas. Masyarakat secara masih mempercayai polisi dalam mengendalikan (potensi) radikal. Namun demikian secara agregatif pada level wilayah Polda relatif menunjukkan perbedaan, yaitu wilayah Kalimantan Barat yang mendapat skor paling tinggi diantara dua Polda lain. Fenomena ini berbanding lurus (linier) dengan kekuatan atau intensitas diskusi warga dengan kepolisian tentang potensi radikalisme.

Aspek diskusi merupakan aspek mendasar sebagai instrumen penting sinergi polisi – masyarakat. Karena pada dasarnya didalam aspek ini mengandung sisi antisipasi terhadap (perkembangan) potensi radikalisme yang hidup di kalangan masyarakat. Sehingga, logika linearitas ini, ditemukan bahwa misalnya, antusiasme masyarakat terhadap diskusi adalah di Kalimantan Barat. Melalui metode diskusi terbatas dengan kalangan tokoh masyarakat, pelibatan secara institusional (yaitu universitas) dalam pengendalian terhadap potensi radikalisme juga berbanding lurus dengan gambaran antusiasme dalam diskusi.

Sinergitas polisi – masyarakat dalam pengendalian potensi radikalisme pada akhirnya terjadi pada dua level. Pertama, level institusional. Pada level institusional ini interaksi bersifat kelembagaan. Kalimantan Barat menunjukkan intensitas intraksi kuat melalui universitas dengan institusi kepolisian di level Polda. Dan, kedua pada level interaksional warga. Interaksi pada level warga ini lebih mendasar karena menyangkut deteksi dini hadirnya potensi radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, Muzayyin. *Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam*, Jurnal Walisongo, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015
- Al-Azhary, Usamah Sayyid. 2015. *Islam Radikal, Telaah Kritis Radikalisme: Dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS*, Terj. M. Hidayatullah, Pen. Dar al-Faqih, Abu Dhabi, Uni Ermitat Arab.
- Arifin, Syamsul. *Membendung Arus Radikalisasi Di Indonesia*, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman . Volume 8, Nomor 2, Maret 2014; ISSN 1978-3183; 392-420
- Berger, Peter L dan Hansfried Kellner. 1985. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali*, terj. Herry Joediono, LP3ES, Jakarta.
- Bruinessen, Martin van. 2002. *Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia*, South East Asia Research vol. 10, no. 2 (2002), 117-154.
- Chaubet, Francois. 2013. *Globalisasi Budaya*, terj. Feybe I. Mokoginta, Jalasutra, Yogyakarta.
- Dahrendorf, Ralf. 1985. *Law and Order*, Westview Press, Colorado.
- David A. Sklansky. *Police And Democracy*, The Social Science Research Network Electronic Paper Collection: <http://ssrn.com/abstract=710701>
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
- Fromm, Erich. 2010. *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, terj. Imam Muttaqin, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara*, terj. Zaim Rofiqi, Gramedia, Jakarta.
- Husaini, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos. 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.
- Gibbons, Michael T. at al. 2002. *Tafsir Poliltik: Interpretasi Hermeneutis Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Terj. Ali Noer Zaman, Penerbit Qalam, Yogyakarta.
- Jum'ah, Ali. 2014. *Bukan Bid'ah: Menimbang Jalan Pikiran Orang-Orang yang Bersikap Keras dalam*

Beragama, terj. Baba Salem, Pen. Lentera Hati, Tangerang Selatan.

Hafez, Mohammed M. 2018. *Encyclopedia of Politics and Religion Islam, Radical*, Publishing Company: CQ Press, Washington.

Hikam, Muhammad A.S. 2016. *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalisme (Deradikalisasi)*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Kartodirjo, Sartono. 2005. *Ratu Adil*, Sinar Harapan, Jakarta.

Levashov, Viktor. 2003. *Globalization and Public Security*, Journal Social Science, Academic Research Library, p.51

Suharto, Toto dan Ja'far. *Membendung Arus Paham Keagamaan Radikal Di Kalangan Mahasiswa PTKIN Assagaf*, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 14, No. 1 Mei 2014: 157-180



Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik

Thomas Agung Kurnianto*, **Puguh Santoso****,
Anang Puji Utama***

Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI

Kawasan Indonesia Peace and Security Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat

thomasagung95@gmail.com

Abstract

Konflik di Papua merupakan salah satu ancaman serius bagi keutuhan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Mediasi humanistik oleh Umbreit (1997) merupakan salah satu metode yang fokus pada 'keterbukaan' dan 'pengungkapan publik' untuk membantu menyelesaikan konflik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya Indonesia di dalam mencegah konflik Papua dengan pendekatan mediasi humanistik. Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan mengandalkan kajian pustaka sebagai metode analisis. Temuan dari tulisan ini adalah melalui mediasi humanistik, pemerintah Indonesia melakukan dialog dua arah untuk mendengar aspirasi dan keinginan masyarakat Papua. Pemerintah juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat Papua di dalam mewujudkan keinginan tersebut.

Kata Kunci: Konflik Papua, Mediasi Humanistik

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Papua memiliki kekayaan sumber sosial, budaya dan sumber alam yang berlimpah namun bertolak belakang dengan tingkat keamanan di kawasan tersebut. Papua terus-menerus mengalami pertikaian yang timbul dari perbedaan persepsi tentang sejarah integrasinya ke dalam negara Indonesia, pemiskinan yang terus berlanjut dan kompleks inferioritas yang diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan martabat orang Papua. Selain itu, ketidakpuasan secara ekonomis juga memunculkan semangat bagi orang-orang asli Papua untuk berusaha memerdekakan diri yang berujung gerakan separatisme dan terorisme (Chauvel & Bhakti, 2004).

Menilik sejarah, konflik di Papua sudah berlangsung sejak tahun 1945, yakni pada awal kemerdekaan, perebutan atas wilayah Papua mulai mencuat dengan melibatkan pemerintah Indonesia yang baru saja merdeka dengan pihak Kerajaan Belanda (Chauvel & Bhakti, 2004).

Selanjutnya pada tahun 1965, terbentuklah Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau *Free Papua Movement* yang merupakan organisasi perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Menurut Tebay (Hadi, 2016), tujuan organisasi ini adalah untuk memerdekakan Papua dari kekuasaan Indonesia. Hingga kemudian pada tahun 2002, dilakukan konferensi di Papua yang dipelopori oleh aktivitas-aktivitas kemanusiaan melalui *Peace Conference in West Papua* guna membicarakan masalah di Papua. Sejak saat itu, menurut McLeod, proses perjuangan kemerdekaan Papua beralih dari yang awalnya *violent struggle* menjadi *nonviolent struggle* (Hadi, 2016).

Separatisme merupakan salah satu ancaman serius bagi keutuhan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Gerakan ingin memerdekakan diri di Papua menjadi salah satu perhatian pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu yang dituangkan dalam berbagai kebijakan khusus untuk mengatasi gerakan tersebut, mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid yang mengizinkan pengibaran bendera kemerdekaan West Papua (Chauvel & Bhakti, 2004), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Majelis Rakyat Papua (PPA) dan mendorong penerapan UU Otonomi Khusus, hingga Presiden Joko Widodo yang membebaskan tapol dan membuka akses bagi jurnalis asing untuk memasuki Papua (Fujikawa, 2017). Kendati begitu, Konflik Papua pun terus memanas dalam dua tahun terakhir, dan tidak ada tanda-tanda konflik ini akan teresolusi dalam waktu dekat. Pemicunya antara lain serangan yang menewaskan 31 pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga pada 1 Desember 2018 (BBC, 2018), dan serangkaian unjuk rasa di Papua pada Agustus–September 2019 (Tempo, 2019).

Berangkat dari rentetan panjang konflik yang terjadi di Papua, diperkuat fakta bahwa konflik Papua adalah konflik vertikal terlama yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia (dan masih berlangsung hingga saat ini), diperlukannya skema dengan penyesuaian yang baru untuk menyelesaikan konflik ini. Pendekatan humanistik sangat menarik penulis untuk mencoba mengurai permasalahan yang menjadi ujung pangkal konflik di Papua.

2. Kerangka Teori

Mediasi adalah proses negosiasi kooperatif di mana pihak ketiga, mediator, membantu para pihak untuk merundingkan masalah yang disengketakan, untuk mencoba mencapai kesepakatan atau penyelesaian (Roberts 1998; Stintzing 1994; Van Zyl 1997, dalam (Boniface & E., 2012)). Para pihak perlu diorientasikan melalui konsiliasi untuk berkomunikasi satu sama lain secara objektif dan rasional (Scott-MacNab dan Mowatt 1987; Levy dan Mowatt 1991 dalam (Boniface & E., 2012)) Bagaimanapun, mediasi dapat mengurangi kepahitan dan konflik di antara para pihak, tetapi tujuan mediasi mungkin berbeda, tergantung pada gaya mediasi yang digunakan (Roberts 1998 dalam (Boniface & E., 2012)). Berbagai gaya atau model mediasi ditemukan karena lebih menekankan pada proses dalam mediasi daripada struktur (Faris 2006 dalam (Boniface & E., 2012)). Namun, sebagian besar gaya ini berfokus pada hubungan antara para pihak dan tidak melihat komunitas.

Teori humanistik merupakan teori yang memberikan penjelasan tentang bagaimana memanusiakan manusia dan mengaktualisasikan kemampuan untuk menerapkan dalam lingkungan sekitar (Umbreit, 1997). Teori ini memberikan atau menekankan tentang kognitif dan afektif dalam mempengaruhi sebuah proses yang ada. Dalam menerapkan teori humanistik harus mempunyai kemampuan untuk menggali dan merasakan apa yang menjadi masalah dan harus diselesaikan dalam teori humanistik ini.

Dalam mediasi humanistik, 'keterbukaan' dan 'pengungkapan publik' adalah hal yang umum dan dapat dilihat sebagai membantu orang sembuh karena kebenaran 'diberitahukan' dan 'dibuka'; sedangkan di sebagian besar gaya mediasi Barat, mediasi biasa dilakukan 'di balik pintu tertutup' – meskipun dalam mediasi aktivis, komunitas dilibatkan (Boniface & E., 2012). Model mediasi humanistik, dalam beberapa hal, sejajar dengan gaya psikoterapi atau pengajaran humanistik yang menekankan pentingnya hubungan antara terapis dan klien atau guru dan siswa dan mencakup keyakinan kuat dalam kapasitas setiap orang untuk pertumbuhan, perubahan, dan transformasi (Umbreit, 1997).

Meminjam teori mediasi humanistic yang dikemukakan Umbreit (1997), terdapat delapan langkah di dalam penyelesaian konflik Papua yang akan dianalisis penulis di dalam tulisan ini, yaitu:

- a. *Centering*. Membersihkan pikiran dari kekacauan dan memusatkan perhatian pada tugas penting perdamaian yang ada.
- b. *Re-framing* Peran Mediator. Memfasilitasi proses dialog dan saling membantu alih-alih mengarahkan proses yang didorong oleh penyelesaian.
- c. Melakukan Sesi Pra-meditasi. Mendengarkan cerita masing-masing pihak, memberikan informasi, memperoleh partisipasi sukarela, menilai kasus, mengklarifikasi harapan, mempersiapkan mediasi
- d. Menghubungkan Para Pihak. Membangun hubungan dan kepercayaan dimulai pada fase persiapan.
- e. Mengidentifikasi dan Memanfaatkan Kekuatan Para Pihak. Dimulai pada fase premediasi.
- f. Pelatihan Komunikasi. Jika diperlukan, selama sesi persiapan.
- g. Menggunakan Gaya Mediasi Nondirektif
- h. Duduk Berhadapan antar Para Pihak. Kecuali tidak pantas karena budaya pihak atau permintaan individu.)
- i Pengakuan dan Menggunakan Kekuatan Diam
- j. Melakukan Sesi Tindak Lanjut

3. Penelitian Sebelumnya

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan guna menganalisis cara-cara atau metode penyelesaian konflik di Papua. Penelitian Febrianti dkk (2019) menganalisis proses penyelesaian konflik internal antara Pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis di Papua (Organisasi Papua Merdeka atau OPM) dengan menggunakan mekanisme horse-trading. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Horse Trading sudah digunakan untuk menyelesaikan konflik Gerakan Papua Merdeka dan Pemerintah Indonesia, namun belum mencapai resolusi baru. Mekanisme perdagangan kuda secara efektif menyelesaikan konflik ketika kepercayaan telah dicapai di antara mereka untuk mengomunikasikan keduanya di mana mereka dapat menyampaikan tujuan mereka secara terbuka (Febrianti, Arum, Dermawan, & Akim, 2019).

Selanjutnya, analisis metode berlian *counter-insurgency* oleh McCormick sebagai strategi militer Indonesia menumpas gerakan insurgensi Papua juga telah dilakukan oleh Ramdhan (2019). Penelitian dengan metode kualitatif studi literature ini menyatakan bahwa pengaplikasian strategi COIN McCormick secara sempit tidak hanya gagal dalam menyelesaikan konflik Papua, tapi juga memberi ruang terbentuknya dinamika baru dalam dimensi internasionalnya, sehingga perlu adanya interpretasi baru terhadap model COIN di Papua, yaitu dengan memberikan solusi terhadap eliminasi akar konflik ketimbang eliminasi total dengan militer (Ramdhan, 2021). Anriani, Rahayu dan Salomo (2021) menganalisis Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan kerangka integrative Tata Kelola Kolaboratif. Dari kajian berbasis kerangka integratif model *Collaborative Governance* menunjukkan bahwa proses kolaborasi di pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus belum berhasil dan kurang efektif (Anriani, Rahayu, & Salomo, 2021).

4. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan alasan untuk menemukan pemahaman baru dalam pendekatan mediasi humanistik yang dilakukan Indonesia di dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua. Analisis data menggunakan kajian pustaka dari buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian dan dokumentasi website terkait dengan upaya Indonesia menyelesaikan konflik Papua secara humanis.

5. Pembahasan

1. Analisis Akar Masalah Konflik Papua

Papua merupakan daerah yang terbesar dan paling timur dari Indonesia, yang terdiri dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Luas total Papua sendiri adalah 421,981 km² (3,5 lebih besar daripada Pulau Jawa) dan secara topografi terdiri dari area pegunungan dan tanah rawa di sepanjang pantai. Papua berbatasan dengan negara Papua Nugini di bagian timur, Provinsi Maluku Utara dan Maluku di barat, Samudra Pasifik di utara, dan Laut Arafura di selatan. Secara konstitusional, Papua juga merupakan wilayah paling timur dari kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 19 November 1969 melalui proses resolusi PBB No. 2504. Selanjutnya, Papua disahkan sebagai daerah otonom pada tahun yang sama melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten/Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Rumbiak, 2005).

Konflik Papua telah berlangsung selama lebih dari setengah abad, tetapi terus memanas dalam dua tahun terakhir. Dalam tiga tahun terakhir, beberapa kali terjadi baku tembak antara aparat keamanan (TNI dan Polri) dan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang selanjutnya dianggap kelompok teroris di wilayah Papua. Data *Armed Conflict Location and Event Data Project* (ACLED) mencatat bahwa pada 1 Januari 2019 - 15 Desember 2021 terdapat 407 peristiwa konflik di Papua dan Papua Barat, yang terdiri atas 107 pertempuran, 206 kerusuhan, dan 88 kekerasan terhadap warga sipil, dengan jumlah korban jiwa mencapai 123 orang (ACLED, 2020). Data di atas menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah

berbasis keamanan dan militer terhadap konflik Papua ternyata justru berdampak semakin meningkatkan jumlah korban.

Sebenarnya, selain pendekatan keamanan, pemerintah pada masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) juga telah meningkatkan fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua. Pendekatan ini juga diperpanjang dalam periode kedua Jokowi sekarang. Akan tetapi, selain pendekatan ekonomi, hal yang lebih mendesak adalah pemerintah harus memecahkan akar penyebab konflik Papua, yang hingga sekarang masih belum terselesaikan (Chairil & Sadi, 2020). Analisis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam *Papua Road Map* (PRM) merupakan acuan utama ketika berbicara tentang akar konflik Papua (Rusdiarti & Pamungkas, 2017). Dalam analisisnya, empat isu menjadi sumber utama konflik Papua, yakni: (1) Marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua, (2) kegagalan pembangunan ekonomi yang tidak menyertakan aspek sosial-budaya, (3) kekerasan dan pelanggaran HAM oleh negara, dan (4) Perbedaan persepsi dalam konstruksi sejarah pengintegrasian Papua ke Indonesia pada tahun 1969.

Secara spesifik, PRM menjadi acuan utama penulis untuk untuk analisis penyelesaian konflik Papua dengan pendekatan mediasi humanis. Dalam hal ini, pemerintah tidak lagi menggunakan sistem senjata utama, melainkan sistem senjata sosial sebagai upaya penyelesaian konflik Papua. Seperti telah disampaikan oleh LIPI (Rusdiarti & Pamungkas, 2017), penyelesaian akar masalah konflik Papua hanya dapat dilakukan dengan dialog, tidak dapat dengan intervensi kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memulai dialog dengan tokoh sentral OPM di bawah mediasi pihak ketiga yang netral.

2. Pendekatan Mediasi Humanistik dalam Penyelesaian Konflik Papua

Setelah bertahun-tahun diterapkan dalam berbagai situasi, ranah mediasi sekarang menghadapi peluang bagus untuk membangun banyak cerita anekdot tentang bagaimana mediasi secara berkala sering kali jauh lebih baik dari sekadar menghasilkan penyelesaian. Dengan beralih dari pendekatan mediasi yang didorong oleh penyelesaian ke pendekatan yang didorong oleh dialog, praktik mediasi dapat lebih konsisten memanfaatkan kekuatan transformatif dan rekonsiliasinya (Umbreit, 1997). Kekuatan rekonsiliasinya ini bersifat intrinsik dalam proses menengahi konflik antar individu tetapi perlu secara sadar ditarik keluar dan dimanfaatkan.

Dalam budaya Barat, dimensi transformatif mediasi telah dengan fasih dijelaskan oleh Bush dan Folger (1994) dalam buku mereka yang diakui secara luas *The Promise of Mediation* (Umbreit, 1997). Mereka menekankan pentingnya pemberdayaan yang tulus dan pengakuan timbal balik atas kemanusiaan masing-masing pihak di samping nilai kekuatan belas kasih di antara pihak-pihak yang berkonflik. Aplikasi khusus dari praktik mediasi transformatif, yang sangat cocok untuk mediasi keluarga, komunitas, tempat kerja, dan korban-pelanggar adalah model mediasi humanistik (Umbreit, 1997).

Berbicara lagi tentang konflik Papua, teori mediasi humanistik yang dikemukakan Umbrei (1997) bisa dijadikan acuan baru untuk pemerintah Indonesia di dalam mencapai kata damai dengan kubu OPM Papua dan hidup berdampingan di wilayah NKRI. Pemerintah pusat seharusnya tidak melakukan pendekatan keamanan yang berlebihan tetapi negara

harus menganggap bahwa mereka yang berkonflik adalah warga negara yang sah di mata hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bahwa menyelesaikan konflik di Papua sebaiknya menggunakan cara-cara humanis (CNN, 2021). Suasana kodusif salah satunya perlu dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua, baik dari tokoh-tokoh adat, agama, yang berasal kalangan pemuda, perempuan, dan berbagai klaster.

Membuka dialog adalah kunci dari pendekatan mediasi humanistik untuk penyelesaian konflik di Papua. Di dalam dialog penyelesaian konflik internal antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok OPM perlu dicari titik temu tentang isu-isu apa saja yang bisa diperjualbelikan, tentunya isu yang layak untuk dicapai kedua belah pihak. Beberapa isu yang berkembang di Papua yang bereaksi terhadap munculnya ketidakpuasan publik Papua, antara lain masalah optimalisasi pelayanan publik, masalah pembangunan manusia yang masih memperhatikan nilai-nilai budayanya, pembangunan infrastruktur, keadilan politik, masalah rasisme, dan sebagainya masih dalam koridor wacana nasional dan bukan separatisme. Masyarakat Papua juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah di Papua, baik provinsi maupun kabupaten, ormas, masyarakat adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sebagainya. Mereka adalah kelompok di luar gerakan separatis Papua yang dapat melakukan dialog konstruktif dengan pemerintah pusat untuk menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat.

Setelah dialog sebagai bentuk mediasi dilakukan, barulah pemerintah Indonesia menggandeng dan memberdayakan masyarakat Papua di dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di tanah Papua, dari segi pendidikan, ekonomi, politik, hingga kebudayaan asli di wilayah tersebut. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat-martabat masyarakat (Supardan, 2020). Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan berfokus pada pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan kondisi pendidikan dan kesehatan di tanah Papua yang masih sangat memprihatinkan (Budiarti 2017 dalam (Rusdiarti & Pamungkas, 2017). Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan langkah untuk mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi pembangunan.

Sebagai penutup, salah satu aspek di dalam mediasi humanistic yang diterapkan di dalam penyelesaian konflik di Papua adalah dengan mengubah aktor yang terlibat dalam dialog. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus menekankan hasil yang ingin dicapai. Pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pembangunan di Papua namun juga upaya pemulihan situasi di Papua. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek lain seperti kekerasan, diskriminasi dan bentuk-bentuk ketimpangan lainnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa pendekatan mediasi humanistic ini harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk penghapusan segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan di Papua.

6. Kesimpulan

Konflik Papua merupakan konflik vertikal terlama yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia (dan masih berlangsung hingga saat ini). Berbagai pendekatan sudah banyak dilakukan, salah satunya dengan cara militer. Namun, pendekatan ini justru meningkatkan korban masyarakat sipil karena pendekatan ini mengarah pada kekerasan dan bentrokan antara kedua belah pihak, yakni

pemerintah Indonesia dan Gerakan Papua Merdeka.

Diperlukan skema dengan penyesuaian yang baru untuk menyelesaikan konflik ini. Pendekatan mediasi humanistik dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketegangan sekaligus mengurasi masalah yang menjadi penyebab konflik di Papua. Melalui pendekatan ini, pemerintah Indonesia disarankan melakukan dialog dua arah untuk mendengar aspirasi dan keinginan masyarakat Papua. Pemerintah juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat Papua di dalam mewujudkan keinginan tersebut. Lebih penting lagi, pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pembangunan di Papua namun juga upaya pemulihan situasi di Papua. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek lain seperti kekerasan, diskriminasi dan bentuk-bentuk ketimpangan lainnya.

Daftar Pustaka

- ACLED. (2020). *Armed Conflict Location and Event Data Project*. Retrieved Desember 15, 2021, from <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>
- Anriani, S., Rahayu, A., & Salomo, R. (2021). Indonesian collaborative governance analysis facing Free Papua movement. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(2), 89-108.
- BBC. (2018, Desember 1). *Pembunuhan pekerja Papua: Lima hal pokok sejauh ini*. Retrieved Desember 14, 2021, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46479140>
- Boniface, & E., A. (2012). A Humanistic Approach to Divorce and afamily mediation in the South African context: A compaarative study of Western=stylemediation and African humanistic mediation. *African Journalon Conflick Resolution*, 12(3), 101-130.
- Chairil, T., & Sadi, W. A. (2020). Konflik Papua: Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis. *CBDS Commentaries*. Jakarta Pusat: Binus.
- Chauvel, R., & Bhakti, I. (2004). The Papua Conflict: Jakarta's Perception and Policies. *Publick Adminitration Review*, 66, 44-55.
- CNN. (2021, November 7). *Ma'ruf Pesan ke Panglima Baru TNI agar Sikapi Papua dengan Humanis*. Retrieved Desember 15, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211106213729-20-717605/maruf-pesan-ke-panglima-baru-tni-agar-sikapi-papua-dengan-humanis>
- Febrianti, S. W., Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim. (2019). Internal Conflict Resolution between Government of Indonesia and Separatist Movement in Papua using Horse-Trading Mechanism. *Society*, 7(2), 83-100.
- Fujikawa, K. (2017). Drifting between accommodation and repression: explaining Indonesia's policies toward its separatists. *The Papcific Review*, 30(5), 655-673.

- Hadi, R. P. (2016). Tantangan Keamanan Nasional Indonesia dalam Menyikapi Transformasi Separatisme dan Cyberprotest di Papua. *Joint Seminar on Public and International Affairs UUM-Unair* (pp. 1-10). Universitas Utara Malaysia.
- Ramadhan, M. A. (2021). Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua dalam Model Counterinsurgency (COIN). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(1), 139-151.
- Rumbiak, Y. P. (2005). *Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme di Daerah Krisis Integrasi*. Jakarta: Papua International Education.
- Rusdiarti, S. R., & Pamungkas, C. (2017). *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua*. Yogyakarta: Yayasan Obor.
- Supardan, D. (2020). Alienasi sosial dan budaya masyarakat Papua: Sebuah refleksi. *Jurnal Ilmu Politik*, 21, 189-212.
- Tempo. (2019). *Papua Dikepung Unjuk Rasa, Ini 6 Lokasinya*. Retrieved Desember 14, 2021, from <https://nasional.tempo.co/read/1241922/papua-dikepung-unjuk-rasa-ini-6-lokasinya>
- Umbreit, M. S. (1997). Humanistic Mediation: A Transformative Journey of Peacemaking . *Center for Restorative Justice & Peacemaking* , 1-10.